



# BUKU PANDUAN



SEMINAR INTERNASIONAL  
BAHASA, SASTRA, BUDAYA, DAN PENGAJARAN  
BAHASA - SASTRA

## FORKIBASTRA 1

POLITIK IDENTITAS:  
LOKALITAS BERKONTEKS GLOBAL  
DALAM WACANA MULTIKULTURAL

PUSAT BAHASA  
BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN  
FORKIBASTRA  
HOTEL SANDAJA, PALEMBANG  
1-2 JUNI 2010



SONDA FM 102.6  
PALEMBANG



*W. J. P. 1PK13 Rub*



# BUKU PANDUAN



SEMINAR INTERNASIONAL  
BAHASA, SASTRA, BUDAYA, DAN PENGAJARAN

## FORKIBASTRA 1

**POLITIK IDENTITAS:  
LOKALITAS BERKONTEKS GLOBAL  
DALAM WACANA MULTIKULTURAL**



BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN  
FORKIBASTRA  
1-2 JUNI 2010, HOTEL SANDJAJA  
PALEMBANG

PUSTAKAAN BADAN BA

PB Klasifikasi 499.210 6 BUK 6	No. Induk : 143 Tgl. : 18-3-2013 Ttd. : _____
--	---

## 1. Pendahuluan

Identitas dalam kehidupan global merupakan hal yang mutlak dimiliki dan diusahakan oleh setiap bangsa untuk menunjukkan eksistensi diri di antara bangsa lain. Bangsa-bangsa di dunia berupaya memperjuangkan identitas tersebut demi pengakuan akan keberadaan mereka dan posisi yang dikehendaknya. Posisi yang menyangkut identitas sebuah bangsa setidaknya memang bergantung dari cara pandang bangsa lain. Akan tetapi, hal tersebut dapat diusahakan dengan berbagai upaya dan strategi agar identitas terbentuk seperti yang diharapkan. Di sinilah perlunya politik identitas dirancang dan disusun. Bagi bangsa yang menghargai hak-hak warga negaranya, berbagai elemen bangsa merupakan pendukung dan penyusun gerakan tersebut, sekali pun pada akhirnya menjadi tugas pengambil kebijakan untuk menentukan arah politik tersebut.

Identitas ditandai oleh perbedaan dan dialami secara sosial yang secara simbolis dapat dideteksi dari bahasa serta wujud budaya lain yang dipakai dalam kehidupan sebagai sebuah representasi. Bila premisnya demikian, di dalam kehidupan sosial diasumsikan terdapat berbagai identitas. Pada gilirannya berbagai identitas tersebut menandakan adanya kepluralan. Negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia dalam ranah global merupakan wujud pluralitas tersebut. Di dalam kepluralan dan di era globalisasi, unsur pembeda merupakan hal penting. Sayangnya, kenyataan dewasa ini unsur pembeda itu sangatlah kentara. Konsep barat-timur, utara-selatan, negara adikuasa-negara ketiga, serta konsep lain dengan berbagai representasi ideologinya telah menjadi oposisi-oposisi biner yang dikonstruksi dalam pemikiran hegemoni sebelah kiri, yaitu barat, utara, dan adikuasa; langsung maupun tidak serta dalam ruang publik maupun privat.

Wacana multikultural dengan berbagai aspek yang muncul beberapa puluh tahun terakhir (sejak tahun 1980-an) mencoba mengatasi hal tersebut. Dalam wacana multikultur, kondisi pluralitas dihadapi dengan menghargai kemajemukan dan menjalin kebersamaan. Konsep seputar lokal-global maupun negara-bangsa dalam menentukan posisi identitas menjadi sebuah hal yang secara koheren dimaknai seimbang. Global bukan berarti meniadakan lokal. Bahkan kelokalan merupakan aset yang perlu diperjuangkan sebagai penguat identitas. Namun, kelokalan dalam pengertian ini seyogyanya harus dibedakan dengan upaya mencari jati diri atau identitas daerah yang ujung-ujungnya menjadi sebuah isu primordialisme yang esensialis. Wacana multikultural di samping menangkal hegemoni, juga sebagai jalan tengah bagi upaya fanatisme daerah, yaitu dengan mengangkat isu-isu yang memajukan hibriditas dan

kemajemukan untuk merobohkan sekat-sekat identitas yang etnosentris. *Think globally-act locally* merupakan slogan lama yang dapat dimaknai secara luas dan kontekstual dalam upaya pembentukan identitas.

Wacana globalisasi membuka secara luas keluar-masuknya ideologi-ideologi dunia ke dalam ruang privat sebagai sebuah *soft-power*. Hal tersebut, secara langsung maupun tidak, telah ikut andil dalam pembentukan identitas bangsa. Ia merambah dan menginternalisasi hingga ke bentuk-bentuk budaya manusia, bahkan mampu mengubah wujud, perilaku, dan ide atau pemikiran manusia. Di sinilah peran pemerhati masalah humaniora tersebut, yaitu melalui sumbangsih pemikiran tentang bahasa, budaya, sastra, dan aplikasinya (pengajaran dan pembelajaran) bahasa, sastra, dan budaya. Hasil pengamatan kenyataan di lapangan, bukti teks, serta abstraksi dari hal tersebut dapat menginspirasi pemikiran-pemikiran yang muaranya menuju penguatan jati diri bangsa di tengah arus global.

Berkenaan dengan hal tersebut, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan melalui FORKIBASTRA (Forum Kajian Identitas Bahasa, Sastra, dan Budaya), sebuah forum yang akan berkonsentrasi pada pengkajian identitas bahasa, budaya, dan sastra beserta pengajaran dan pembelajarannya, akan menyelenggarakan seminar internasional yang berkenaan dengan masalah-masalah tersebut.

## **2. Tujuan kegiatan ini adalah**

- a. Menggali identitas yang tercermin dalam bahasa, sastra, dan budaya.
- b. Meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa dan sastra dalam dunia pendidikan menghadapi era global.
- c. Menumbuhkembangkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra lokal sebagai bagian budaya dunia.

## **3. Tema**

Tema seminar internasional ini adalah *Politik Identitas: Lokalitas Berkonteks Global dalam Wacana Multikultural*.

## **4. Pemakalah**

Seminar internasional ini akan menghadirkan 1 pemakalah kunci (*keynote speaker*) dan 6 pemakalah utama dalam forum pleno dengan topik yang sesuai tema utama serta mengundang 50 pemakalah pendamping yang akan ditampilkan dalam forum paralel dengan memilih topik yang sudah ditentukan panitia.

#### 4.1 Pemakalah Kunci dan Pemakalah Utama

Pemakalah Kunci dalam seminar ini adalah Gubernur Sumatera Selatan yang memiliki kapabilitas dalam memaparkan identitas Sumatera Selatan di mata dunia. Pemakalah Utama adalah pemakalah yang akan ditampilkan di awal seminar dan di akhir seminar dalam sidang pleno. Pemakalah Kunci dan Pemakalah Utama dalam seminar Internasional ini adalah:

1. Ir. H. Alex Noerdin, S.H. (Gubernur Sumatera Selatan, Indonesia)
2. Ir. H. Eddy Santana Putra, M.T (Walikota Palembang)
3. Prof. Dr. Siti Zainon Ismail (Universitas Kebangsaan Malaysia, Malaysia)
4. Dr. Azhar Ibrahim Alwee (Universitas Nasional Singapura)
5. Dr. Sugiyono (Pusat Bahasa, Indonesia)
6. Prof. Dr. Hasyim (Brunai Darussalam)
7. Prof. Dr. Faruk H.T (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
8. Prof. Chuzaimah Diemroh, Ph.D. (Universitas Sriwijaya, Indonesia)
9. Drs. C. Ruddyanto, M.A. (Kepala Balai Bahasa Denpasar)

#### 4.2 Pemakalah Pendamping

Pemakalah pendamping adalah peserta yang mengajukan makalah untuk topik khusus yang berhubungan dengan tema seminar. Abstrak dikirim ke panitia paling lambat tanggal 7 April 2010 dan makalah lengkap dari abstrak yang lolos seleksi dikirimkan kepada panitia paling lambat tanggal 8 Mei 2010 melalui pos elektronik (*email*) [forkibastra@yahoo.com](mailto:forkibastra@yahoo.com) atau [forkibastra@gmail.com](mailto:forkibastra@gmail.com). Adapun topik-topik yang ditawarkan kepada pemakalah pendamping adalah sebagai berikut.

##### 1. Bidang Bahasa

- a. Revitalisasi Bahasa Daerah menuju Preservasi Budaya
- b. Bahasa sebagai media Transformasi Sosial Budaya
- c. Tipologi Bahasa
- d. Vitalitas Bahasa
- e. Bahasa dan Identitas

##### 2. Bidang Sastra

- a. Identitas Kelokalan dalam Sastra
- b. Multikultural Sastra Berwarna Lokal
- c. Sastra Lintas Budaya dan *National Building*
- d. Ideologi Kebangsaan dalam Sastra Berwarna Lokal
- e. Sastra Poskolonial dalam Pembentukan Identitas Bangsa
- f. Pengembangan Sastra Lokal

### **3. Bidang Pengajaran**

- a. Pembelajaran Bahasa dan Sastra sebagai Sarana Peningkatan Potensi Diri
- b. Pengajaran Bahasa dan Sastra Berbasis Strategi Inovatif
- c. Problematika Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia atau Daerah
- d. Pengajaran Bahasa dan Sastra Daerah sebagai Upaya Pemertahanan Budaya
- e. Paradigma Baru dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra Daerah

### **4. Bidang Budaya**

- a. Masyarakat Multikultur dan Pembentukan Karakter
- b. Diaspora dan Identitas
- c. Akulturasi Komunitas Keturunan di Indonesia
- d. Primordialisme dalam Masyarakat di Perbatasan

### **5. Peserta**

Peserta seminar ini adalah guru, dosen, mahasiswa, peneliti, budayawan, praktisi, dan pemerhati bahasa dan sastra sebanyak kurang lebih 250 orang.

### **6. Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

Tempat seminar Hotel Sandjaja, Jalan Kapten A. Rivai No. 6193, Palembang dan dilaksanakan pada tanggal 1—2 Juni 2010.

### **7. Pendaftaran Peserta**

Pendaftaran peserta paling lambat pada tanggal 24 Mei 2010 di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Seniman Amri Yahya, Kompleks Taman Budaya Sriwijaya, SU 1, Jakabaring, Palembang, Telepon / Faksimile (0711) 7539500/(0711) 7539555. Peserta Pemakalah Pendamping dikenakan biaya sebanyak **Rp250.000,00** dan peserta umum **Rp300.000,00** sebagai pengganti perlengkapan seminar (prosiding, buku catatan, piagam, pena, dan tas), dan konsumsi (kudapan dan makan siang) selama seminar.

### **10. Penutup**

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Forum Kajian Identitas, Bahasa, Sastra, dan Budaya (FORKIBASTRA) Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dan dukungan dari berbagai pihak.

Palembang, 1 Maret 2010

**SUSUNAN PENGURUS FORKIBASTRA  
BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Pelindung : Drs. B. Trisman, M.Hum.
- Penanggung Jawab : Aminulatif Ikob, S.E.
- Ketua : Ery Agus Kurnianto, S.Pd., M.Hum.
- Wakil Ketua : M. Irsan, M.Hum.
- Sekretaris : Erlinda Rosita, S.Pd.  
Amin Mulyanto, S.S.
- Bendahara : Vita Nirmala, S.Pd.
- Bidang Humas : Dian Susilastri, M.Hum.  
Budi Agung Sudarmanto, S.S.,M.Pd.
- Bidang Seminar : Dyah Susilawati, M.Hum.

**SUSUNAN KEPANITIAAN  
SEMINAR INTERNASIONAL FORKIBASTRA 1  
BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Pelindung : Drs. B. Trisman, M.Hum.
- Penanggung Jawab : Aminulatif, S.E.
- Ketua : Ery Agus Kurnianto, S.Pd.,M.Hum.
- Wakil Ketua : M. Irsan, M.Hum.
- Sekretariat : Erlinda Rosita, S.Pd.  
Amin Mulyanto, S.S.  
Sri Vidiafika, S.Pd.  
Supriyadi, A.Md.
- Bendahara : Vita Nirmala, S.Pd.  
Eka Susanti, S.E.
- Bidang Humas : Dian Susilastri, M.Hum.  
Budi Agung Sudarmanto, S.S.,M.Pd.
- Bidang Seminar : Dyah Susilawati, M.Hum.
1. Seksi Sidang 1 (Ruang Bahasa)
    - a. Novita Anggraeni, S.Pd.,M.Si.
    - b. Frenky Daromes, S.Pd.
    - c. Dian Susilastri, M.Hum.
  2. Seksi Sidang 2 (Ruangan Bahasa)
    - a. Taufik Awaludin, S.S.
    - b. Budi Agung Sudarmanto, S.S., M.Pd.
    - c. Basuki Sarwo Edi, S.Pd.

3. Seksi Sidang 3

(Ruang Pengajaran Bahasa dan Sastra)

- a. Mulawarman, S.S.
- b. Dyah Susilawati, M.Hum.
- c. Yeni Mastuti, S.Pd.

4. Seksi Sidang 4 (Ruang Budaya)

- a. Fendi Sidin, S.Pd.
- b. Yulia Masithoh, S.Pd.
- c. Erlinda Rosita, S.Pd.

Seksi Protokoler :

1. Ery Agus Kurnianto, S.Pd.,M.Hum.
2. Muhammad Irsan, M.Hum.
3. Budi Agung Sudarmanto, S.S.,M.Pd.
4. Dian Susilastri, M.Hum.
5. Dyah Susilawati, M.Hum.

Seksi Pendaftaran, Piagam, dan Seminar Kit

1. Vita Nirmala, S.Pd.
2. Evi Siswanti
3. Hadiah, A.Md.
4. Yeni Mastuti, S.Pd.
5. Yulia Masithoh, S.Pd.
6. Sri Vidiafika, S.Pd.

Seksi Peralatan

1. Amin Mulyanto, S.S.
2. Romyansyah
3. Suherlan
4. Yudi Satriawan

Seksi Pubdekdok dan Pameran

1. Arief Wihargo, S.S.
2. Supriyadi, A.Md.
3. Kusnadi, S.Sos.

Seksi Transportasi

1. Ery Agus Kurnianto, S.Pd.,M.Hum.
2. Budi Agung Sudarmanto, S.S.,M.Pd.
3. Rizal Khotob
4. Romyansyah.

Seksi Cenderamata dan Hiburan

1. Basuki Sarwo Edi, S.Pd.
2. Novita Anggraeni, S.Pd.,M.Si.
3. Evi Siswanti.

Seksi Konsumsi

1. Hadiah, S.E.
2. Sri Vidiafika, S.Pd.
3. Evi Siswanti
4. Suherlan
5. Yudi Satriawan

Seksi Reservasi

1. Arief Wihargo, S.S.
2. Suherlan

## TATA TERTIB DALAM PERSIDANGAN

### 1. Persidangan

- a. Sidang berlangsung tepat waktu
- b. Sidang terdiri atas dua macam, yaitu
  - (1) tiga sesi sidang pleno dengan tujuh pemakalah utama
  - (2) tujuh sesi sidang paralel yang dibagi masing-masing dalam empat ruang sesuai bidang ilmu (bahasa, sastra, budaya, dan pengajaran)
- c. Sidang dipimpin oleh seorang pemandu yang didampingi oleh dua pencatat
- d. Pemakalah, pemandu, dan pencatat harus hadir di ruang sidang yang telah ditentukan 5 menit sebelum sidang dimulai
- e. Pencatat membuat laporan sidang atas persetujuan pemandu sidang.

### 2. Pemakalah

- a. Pemakalah, baik dalam sidang pleno maupun sidang paralel, menyajikan pokok-pokok makalahnya dengan mengikuti aturan yang diberikan pemandu.
- b. Pemakalah memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan selama waktu yang disediakan.
- c. Pemakalah memperhatikan tanda yang diberikan pemandu.
- d. Pemakalah harus mengakhiri penyajian makalahnya apabila penyajian itu telah berlangsung melebihi waktu yang ditentukan.

### 3. Pemandu

- a. Pemandu memperkenalkan pemakalah kepada peserta sidang.
- b. Pemandu mempersilakan pemakalah menyampaikan pokok-pokok makalah selama 10 menit.
- c. Pemandu mengingatkan dan menghentikan penyajian makalah apabila pemakalah telah menyampaikan pokok-pokok makalah melebihi 10 menit.
- d. Pemandu secara adil memberikan kesempatan bertanya kepada peserta sidang.
- e. Pemandu membatasi jumlah pertanyaan (satu atau dua pertanyaan) kepada setiap penanya.
- f. Pemandu berhak menegur penanya yang menyampaikan pertanyaan bertele-tele.

- g. Pemandu menyelaraskan antara maksud penanya dan jawaban pemakalah jika terjadi kesenjangan.
- h. Pemandu menampung pertanyaan tertulis yang tidak sempat disampaikan secara lisan.
- i. Pemandu dapat menyimpulkan pokok-pokok isi diskusi sebelum persidangan berakhir.
- j. Pemandu (dan pencatat) melaporkan hasil persidangan secara tertulis kepada panitia

#### 4. Pencatat

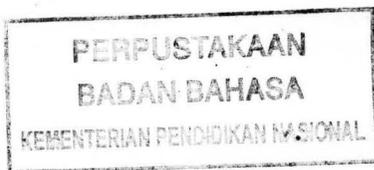
- a. Pencatat membuat rangkuman makalah yang disajikan.
- b. Pencatat mencatat nama dan instansi penanya atau penanggung; inti pertanyaan, tanggapan, atau usul; jawaban atau tanggapan pemakalah atau panelis.
- c. Pencatat mencatat rumusan hasil sidang dan meminta tanggapan pemandu untuk setiap catatan hasil sidang.
- d. Pencatat meminta tanda tangan persetujuan kepada pemandu untuk setiap catatan hasil sidang.
- e. Pencatat menyerahkan hasil catatan kepada seksi pelaporan.

#### 5. Peserta

- a. Peserta mempunyai hak mengajukan pertanyaan atau tanggapan.
- b. Peserta mengajukan pertanyaan atau tanggapannya dengan terlebih dahulu menyebutkan nama dan instansi/lembaga tempat tugas.
- c. Peserta mengajukan pertanyaan atau tanggapan secara singkat, jelas, dan lugas sesuai dengan topik bahasan yang disajikan.
- d. Peserta dapat memilih sidang kelompok yang diminati berdasarkan ketersediaan tempat duduk.
- e. Peserta dan pemakalah akan memperoleh piagam pada saat berakhirnya seminar.

#### 6. Lain-lain

Hal-hal lain yang berkaitan dengan seminar yang belum diberitahukan akan diumumkan pada saat pelaksanaan seminar.



**JADWAL SEMINAR INTERNASIONAL BAHASA, SASTRA, BUDAYA,  
DAN PENGAJARAN BAHASA-SASTRA  
FORKIBASTRA (FORUM KAJIAN IDENTITAS BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA)  
BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN  
1—2 JUNI 2010, HOTEL SANDJAJA, PALEMBANG**

NO.	HARI/TANGGAL	JAM	ACARA	KETERANGAN	
1.	Senin, 31 Mei 2010	19.30—selesai	Jamuan makan malam ( <i>welcome party</i> )	Gurbenur Provinsi Sumatera Selatan (Griya Agung)	
2.	Selasa, 1 Juni 2010	07.00—08.00	Registrasi Peserta	Panitia	
		08.30—10.00	Pembukaan Seminar	Ery Agus Kurnianto, S.Pd., M.Hum. Drs. B. Trisman, M.Hum.	
			1. Tarian Selamat Datang 3. Laporan Ketua Panitia 4. Sambutan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 6. Sambutan Pusat Bahasa 7. Sambutan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan ceramah pembicara pembuka sekaligus membuka kegiatan 8. Doa		Dra. Yeyen Maryani, M.Hum. Ir. H. Alex Noerdin, S.H.
		10.00—10.15	Kudapan	Mulawarman, S.S.	
		10.15—12.15	Sidang Pleno I		1. Dr. Sugiyono (Pusat Bahasa) 2. Prof.Dr.H. Hashim (Brunei Darussalam) 3. Prof. Chuzaimah Dahlan Diem, M.L.S., Ed.D. (Univ. Sriwijaya)
		12.15—13.15	Istirahat makan siang dan sholat		
		13.15—14.15	Sidang Paralel 1	Petugas Sidang	
		14.15—15.15	Sidang Paralel 2	Panitia Sidang	
		15.15—15.30	Kudapan	Panitia Sidang	
15.30—17.00	Sidang Paralel 3	Panitia Sidang			
		19.00—selesai	Wisata Musi	Balai Bahasa Prov. Sumsel dan Pemerintah Kota Palembang	

3.	Rabu, 2 Juni 2010	08.00—09.30	Sidang Pleno II	1. Prof. Dr. Siti Zainon (PADAT Malaysia) 2. Dr. Faruk H.T (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) 3. Drs. C. Ruddyanto, M.A (Balai Bahasa Denpasar)
		09.30—09.45	Kudapan	
		09.45—11.00	Sidang Paralel 4	Panitia Sidang
		11.00—12.00	Sidang Pararel 5	Panitia Sidang
		12.00—13.00	Istirahat makan siang dan sholat	
		13.00—14.00	Sidang Paralel 6	Panitia Sidang
		14.00—15.00	Sidang Paralel 7	Panitia Sidang
		15.00—15.15	Kudapan	
4.		15.15—16.45	Pleno III	1. Ir.H.Eddy Santana Putra, M.T.* 2. Dr. Azhar Ibrahim Alwee (Universitas Nasional Singapura)
		16.45—17.15	Penutupan	
			1. Pembukaan 3. Sambutan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 4. Sambutan Wali Kota Palembang Sekaligus menutup acara 5. Doa 6. Penutup	Drs. B. Trisman, M.Hum. Ir. H. Edy Santana, M.T.* Mulawarman, S.S.
		17.15—17.30	Pembagian Piagam	Panitia

**JADWAL PERSIDANGAN**  
**SEMINAR INTERNASIONAL BAHASA, SASTRA, BUDAYA DAN PENGAJARAN BAHASA-SASTRA**  
**TEMA “POLITIK IDENTITAS:**  
**LOKALITAS BERKONTEKS GLOBAL DALAM WACANA MULTIKULTURAL”**  
**FORKIBASTRA, BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**HOTEL SANDAJAJA, PALEMBANG 1—2 JUNI 2010**

<b>A. Pembicara Inti</b>			
Waktu	Pembicara	Tempat	Keterangan
Selasa, 1 Juni 2010 09.00—10.00	<b>Ir. H. Alex Noerdin, S.H.</b> Gubernur Sumatera Selatan	<b>Ruang Syailendra</b>	

<b>A. Sidang Pleno 1</b>			
Waktu	Pemakalah dan Judul Makalah	Tempat	Keterangan
Selasa, 1 Juni 2010 10.15—12.15	<p><b>Dr. Sugiyono (Pusat Bahasa)</b> Bahasa sebagai Identitas dalam Masyarakat Multikultur</p> <p><b>Prof. Dr. H. Hashim (Brunei Darussalam)</b> Sastra sebagai Elemen Peradaban dan Identitas Kebangsaan dalam Dimensi Multikultural</p> <p><b>Prof Dr. Chuzaimah Dahlan Diem, M.L.S., Ed.D (Universitas Sriwijaya Plbg)</b> Kecintaan akan multibudaya Lokal dan kegemaran membaca: Dua identitas bangsa tak Terpisahkan</p>	<b>Ruang Syailendra</b>	<p>Moderator: Rita Inderawaty Rudy</p> <p>Pencatat: Yeni Mastuti/ Yulia Masitho</p>

Sidang Paralel 1				
Waktu	Pemakalah	Judul Makalah	Tempat	Keterangan
Selasa 1 Juni 2010 (13.15—14.15)	<b>A.</b>		<b>Ruang Sriwijaya</b>	Moderator A: Mulyadi
	1) <b>Falantino Eryk</b> (Universitas Pattimura, Ambon)	Friksi Kesadaran dan Perilaku Terhadap Warna Kulit dalam Lirik Lagu-Lagu Populer Maluku (Kajian Poskolonial)		
	2) <b>Suyono Suyatno dan Dwi Pratiwi (Pusat Bahasa)</b>	Rivalitas Tradisi—Modernitas dalam Perspektif Poskolonial: Telaah Atas Sejumlah Sajak Abad 20	<b>Ruang Syailendra</b>	Moderator B: Daru Kabeka Janarto
	<b>B.</b>			
1) <b>Tubiyono (Universitas Airlangga)</b>	Degradasi Matakuliah Bahasa Indonesia Melemahkan Identitas Nasional Berdasarkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Nomor 9 Tahun 2009	Pencatat A: Frenky Daromes/ Mutiya Desri		
2) <b>Dr. Chan Tze Haw</b>	Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Kalangan Mahasiswa Antarabangsa: Konteks Malaysia		Pencatat B: Basuki Sarwoedi/	

<p>Selasa 1 Juni 2010 13.15—14.15</p>	<p><b>C.</b> 1) <b>Zainal A. Naning (FKIP Universitas Sriwijaya Palembang) dan Nia Rohayati (FKIP Universitas Siliwangi)</b></p>	<p>Pemahaman Lintas Budaya, Peranan Penerjemahan dan <i>Nation Building</i></p>	<p><b>Ruang Ramayana</b></p>	<p>Moderator C: Retno Wulandari</p>
	<p>2) <b>Puji Santosa (PusatBahasa)</b></p>	<p>Semangat Nasionalisme Sastra Postkolonial dalam Pembentukan Identitas Bangsa</p>		<p>Pencatat C: Erlinda Rosita/ Tuty Kusmaini</p>
	<p><b>D.</b> 1) <b>Dr. Subadiyono (Universitas Sriwijaya)</b></p>	<p>Bahasa dan Identitas</p>	<p><b>Ruang Yudistira</b></p>	<p>Moderator D: Mugijatna</p>
	<p>2) <b>Prof. Dr.Amrin Saragih (Balai Bahasa Medan)</b></p>	<p>Penguatan Jati Diri Bangsa Melalui Peningkatan Apresiasi Masyarakat Terhadap bahasa Indonesia</p>		<p>Pencatat D: Mulawarman/</p>

## Sidang Paralel 2

Waktu	Pemakalah	Judul Makalah	Tempat	Keterangan
Selasa, 1 Juni 2010 14.15—15.15	A. 1) Maimunah (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga)	Identitas dan Lokalitas Suku Asmat dalam Novel <i>Namaku Terverawat</i> Karya Ani Sekarningsih	<b>Ruang Sriwijaya</b>	Moderator A : Mulyadi
	2) Christina Suprihatin dan Eva Catarina (Universitas Indonesia)	Kapital Budaya dalam Tiga Karya Sastra Migran: Kader Abdolah, Marion Bloem dan Naïma El Bezaz dalam Masyarakat Multikultural Belanda		Pencatat A: Mutia Dessri
	B. 1) Lee Tan Luck Mohd Amin Ahmad, Zailani Shafie, dan Zamri Miskam	Pendidikan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu dalam Pembangunan Kerohanian Insaniah Masyarakat Majmuk Malaysia	<b>Ruang Syailendra</b>	Moderator B: Daru Kabeka Janarto
	2) Claudia Dhian Ariani Harbelubun (PGSD FKIP Atmajaya)	Pentingnya Pragmatik di dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar		Pencatat B: Basuki Sarwoedi
	C. 1) Hasanuddin (Universitas Andalas Padang)	Diaspora dan Identitas Etnik Minangkabau	<b>Ruang Ramayana</b>	Moderator C: Retno Wulandari
	2) Efilina Kissiya (Universitas Pattimura Ambon)	PAPALELE (Suatu Tinjauan Historis Terhadap Budaya Masyarakat Ambon)		Pencatat C: Erlinda Rosita

<p>Selasa 1 Juni 2010 14.15—15.15</p>	<p>D. 1) <b>Dr. Hj. Azmi Abdullah (Universiti Brunei Darussalam, Brunei)</b>  2) <b>Drs. Widada Hadisaputra, M.Hum. (Balai Bahasa Prov. Jawa Tengah)</b></p>	<p>Penyumbangan Bahasa Lokal Terhadap Bahasa Nasional Memantapkan Semangat Nasionalisme dalam Konteks Negara Brunei Darussalam  Strategi Pemertahanan Bahasa Jawa dalam Era Global</p>	<p><b>Ruang Yudistira</b></p>	<p>Moderator D: Mugijatna  Pencatat D: Mulawarman</p>
---	--	--	-------------------------------	---

Sidang Paralel 3				
Waktu	Pemakalah	Judul Makalah	Tempat	Keterangan
Selasa 1 Juni 2010 15.30—17.00	<b>A.</b>			
	1) <b>Norlizawati Md. Nor, MA. dan Rahimah A, Hamid, PhD</b>	Identiti Lokal dalam Sastra Lisan Masyarakat Petalangan, Riau: <i>Bujang Tan Domang</i>	<b>Ruang Sriwijaya</b>	Moderator A: Saksono Prijanto
	2) <b>Puji Retno Hardiningtyas (Balai Bahasa Denpasar)</b>	Konsep Ideologi Perempuan Jawa dalam Lintasan Sejarah: Sebuah Kajian Novel Warna Lokal <i>Madam Kalinyamat</i>		Pencatat A: Novita A/Frenky Daromes
	3) <b>Siti Suwadah Rimang (Universitas Negeri Surabaya)</b>	Kearifan Lokal dalam Sinrili “Syeh Yusuf Tuanta Salamaka” di Sulawesi Selatan		
	<b>B.</b>			
	1) <b>Sofendi (Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya)</b>	Errors Made by The Second Year Students of SMP Srijaya Negara Palembang In Using The English Comparisons of Adjectives	<b>Ruang Syailendra</b>	Moderator B: Tubiyono
2) <b>Chew Fong Peng (Universiti Malaya, Malaysia)</b>	Isu-isu Pengajaran dan Pembelajaran KOMSAS di Sekolah Menengah Kebangsaan	Pencatat: Taufik Awaludin		
3) <b>Susi Rita Sahara (SMU Kusuma Bangsa Palembang)</b>	Pembentukan Harga Diri Bangsa Melalui Pembelajaran Sastra Melayu Klasik (Studi Kasus Kisah Puteri Sri Laut di Kelas X SMA Kusuma Bangsa)			

<p>Selasa 1 Juni 2010 15.30—17.00</p>	<p>C.</p> <p>1) <b>Teguh Santoso, S.S., M.Hum.</b> (Balai Bahasa Banda Aceh)</p>	<p>Ketahanan Budaya Lisan Pascatsunami dan Pascakonflik di Aceh</p>	<p><b>Ruang Ramayana</b></p>	<p>Moderator: Triyoga Dharma Utami</p>
	<p>2) <b>Sumimam Udu</b></p>	<p>Tradisi Lisan <i>Kabanti</i>: Ruang Akulturasi Budaya Lokal dan Global dalam Masyarakat Buton</p>		<p>Pencatat: Yulia Masitho</p>
	<p>3) <b>Rosida Erowati</b></p>	<p>Sang Liyan dalam Drama Kwee Hoay “Bunga Roos dari Tjikembang” (1927)</p>		
	<p>D.</p> <p>1) <b>R. Arief Nugroho</b> (Univ. Dian Nuswantoro Semarang)</p>	<p>Akomodasi pada Konsep Jumbhing Kawulo Gusti: Analisis terhadap Hirarki Berbahasa Masyarakat Jawa Masa Kini</p>	<p><b>Ruang Yudistira</b></p>	<p>Moderator: Mukhamdanah</p>
	<p>2) <b>I Nyoman Adi Jaya Putra</b> (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja)</p>	<p>Penggunaan dan Pemertahanan Bahasa Bali oleh Diaspora Muslim Bali yang Multilingual dan Multikultural: Suatu Perilaku Identitas</p>		<p>Pencatat: Yeni Mastuti</p>
	<p>3) <b>Agusniar Dian Savitri</b> (Univ. Negeri Surabaya)</p>	<p>Bahasa Madura di Mojokerto: Penanda Identitas Etnis Madura-Pendulungan</p>		

## A. Sidang Pleno II

Waktu	Pemakalah dan Judul Makalah	Tempat	Keterangan
<p>Rabu, 2 Juni 2010 08.00—09.30</p>	<p><b>Prof Dr. Siti Zainon (PADAT Malaysia)</b> Keberkesanan Lokalitas Dalam Puisi Melayu : Satu Kajian Identitas Kembara Budaya Global</p> <p><b>Dr. Faruk H.T (Universitas Gajah Mada Yogyakarta)</b> Dari Kesatuan ke Kebersamaan Identitas nasional dalam Masyarakat Indonesia yang Plural</p> <p><b>Drs C. Ruddyanto, M.A (Balai Bahasa Denpasar)</b> Merajut Identitas Melalui Revitalisasi Bahasa Lokal</p>	<p><b>Ruang Syailendra</b></p>	<p>Moderator: Ahmad Rapanie Igama</p> <p>Pencatat: Linny Oktovianny</p>

**Sidang Paralel 4**

Waktu	Pemakalah	Judul Makalah	Tempat	Keterangan
Rabu, 2 Juni 2010 09.45—11.00	<b>A.</b>		<b>Ruang Syailendra</b>	Moderator A: Liny Oktovianny
	1) Mulyadi (Balai Bahasa Padang)	Membayangkan Kembali Identitas dalam Novel <i>Tambo, Sebuah Pertemuan</i> Gus TF Sakai		
	2) Muhammad Walidin, M.Hum. (IAIN Raden Patah Plbg)	Puisi Ratap, Sebuah Tradisi Lisan Masyarakat Semende di Sumatera Selatan		
	3) Dian Roesmiati (Balai Bahasa Jawa Timur)	Pengembangan Sastra Lokal di Jawa Timur		Pencatat A: Mutiya Dessri/ Frenky Daromes
	<b>B.</b>		<b>Ruang Ramayana</b>	Moderator B: Susi Rita Sahara
	1) Daru Kabeka Janarto dan Suryanling (Binus International School Simprug - Jakarta)	Pembelajaran Interdisipliner: Upaya untuk meningkatkan Pemahaman dan Apresiasi Sastra Secara Holistik		
2) Fendi, S.Pd. (Balai Bahasa Palembang)	Pemertahanan Budaya di Era Globalisasi melalui Pengajaran Sastra Daerah dengan Metode Bermain Peran			
3) Nia Kurnia (Balai Bahasa Bandung)	<i>Kaulinan Barudak Bubuyungan</i> dalam Pembelajaran Puisi di SD		Pencatat B: Basuki Sarwoedi	

<p>Rabu 2 Juni 2010 09.45—11.00</p>	<p><b>C.</b> 1) Retno Wulandari Setyaningsih dan Titien diah Soelistyarini (Universitas Airlangga)  2) Yoseph Yapi Taum (Universitas Sanata Dharma)  3) Triyoga Dharma Utami (Universitas negeri Semarang)</p> <p><b>D.</b> 1) Nani Darheni (Balai Bahasa Bandung)  2) Mukhamdanah (Pusat Bahasa)  3) Ernalida, S.Pd. (FKIP Universitas Sriwijaya Palembang)</p>	<p>Model Seni Pertunjukan Sastra Lokal dalam Pembelajaran: Upaya menciptakan Industri Kreatif di Sumatera selatan</p> <p>Pemertahanan Bahasa di Era Globalisasi melalui Pengajaran Sastra daerah dengan Metode Barmain peran</p> <p>Bahasa dan Alam: Upaya Membangkitkan Kesadaran Identitas kelokalan dan Kekayaan Ekologis melalui Legenda dan Tradisi</p> <p>Bahasa Sunda Perbatasan (<i>Borderland</i>) di Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah: Primodialisme Masyarakat Perbatasan Jawa tengah dan Jawa Barat</p> <p>Daya Hidup Bahasa Tana di Maluku: Bahasa Samasuru di Negeri Samasuru</p> <p>Komunikasi Verbal: Upaya Membangun Identitas Penutur Bahasa Melayu Palembang di Perkotaan</p>	<p><b>Ruang Sriwijaya</b></p> <p><b>Ruang Yudistira</b></p>	<p>Moderator C: Efilina Kissiya</p> <p>Pencatat: Nursis Twilovita</p> <p>Moderator D: Arief Nugroho</p> <p>Pencatat: Mulawarman</p>
---	--	---	---	---

**Sidang Paralel 5**

Waktu	Pemakalah	Judul Makalah	Tempat	Keterangan
Rabu, 2 Juni 2010 11.00—12.00	<b>A.</b>		<b>Ruang Syailendra</b>	Moderator A : Linny Oktovianny  Pencatat:
	1) <b>Dr. Houtman, M.Pd.</b> (Universitas PGRI Palembang)	Kapital Budaya dalam Tiga Karya Sastra Migran: Kader Abdolah, Marion Bloem dan Naima El Bezaz dalam Masyarakat Multikultural Belanda		
	2) <b>Dad Murniah</b> (Pusat Bahasa)	Suara Lokal <i>Tarian Bumi</i> dan <i>Gelombang Sunyi</i>		
	<b>B.</b>		<b>Ruang Ramayana</b>	Moderator B: Susi Rita Sahara  Pencatat:
1) <b>Rita Inderawati.R, Zahra Alwi dan Rita Hayati (JPBS FKIP Universitas Sriwijaya Palembang)</b>	Model Seni Pertunjukan Sastra Lokal dalam Pembelajaran: Upaya Menciptakan Industri Kreatif di Sumatera selatan			
	2) <b>Fatma Hetami (Universitas Negeri Semarang)</b>	Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Mata Kuliah Drama (Teater) Berbahasa Inggris Berbasis Identitas Kelokaan		

Rabu, 2 Juni 2010 11.00—12.00	C.			
	1) Ahmad Rapanie Igama (Museum Negeri Sumatera Selatan)	Representasi Dulmuluk dalam Politik Identitas	<b>Ruang Sriwijaya</b>	Moderator C: Efilina Kissiya
	2) Eva Krisna (Kantor Bahasa Padang)	Wacana Oksidentalisme pada Kaba Minangkabau: Kajian Postkolonialisme terhadap Sastra Lokal di Indonesia		Pencatat:
	D.			
	1) Sumadi (Balai Bahasa Prov. Kalimantan Tengah)	Interfensi Leksikal dalam Bahasa Jawa Krama	<b>Ruang Yudistira</b>	Moderator: Arief Nugroho
	2) Hidayatul Astar (Kantor Bahasa Bengkulu)	Bahasa Dai di Maluku Barat Daya: Vitalitasnya Saat Ini dan Masa yang Akan Datang		Pencatat:
	3) R. H. M. Ali Masri (FKIP Universitas Sriwijaya Palembang)	Melayu – Jawa sebagai Kerangka Budaya Bahasa Palembang		

**Sidang Paralel 6**

Waktu	Pemakalah	Judul Makalah	Tempat	Keterangan
<p>Rabu, 2 Juni 2010 13.00—14.00</p>	<p><b>A.</b></p>			
	<p>1) <b>Sakdiah Wati</b></p>	<p>Penerapan Model Sinektik Suatu Paradigma Baru dalam Pengajaran Menulis Sastra yang Kreatif dalam Wacana Multikultural</p>	<p align="center"><b>Ruang Syailendra</b></p>	<p>Moderator : Dian Roesmiati</p> <p>Pencatat:</p>
	<p>2) <b>Lilie Suratminto (FIB Universitas Indonesia)</b></p>	<p>Perbaikan Pelapalan Mahasiswa Jepang dan Korea dalam Belajar bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing melalui pendekatan Semiotik</p>		
	<p><b>B.</b></p>			
	<p>1) <b>Dra. Masnidar Tanjung, M.Pd (UNPAD Bandung)</b></p>	<p>Pengembangan Materi <i>on line Learning</i> Bahasa Melayu Toba sebagai Muatan Lokal untuk Siswa SD kelas IV di Daerah Pinggiran Kabupaten Tapanuli Tengah</p>	<p align="center"><b>Ruang Ramayana</b></p>	<p>Moderator B: Claudia Dhian Ariani</p> <p>Pencatat:</p>
	<p>2) <b>Rita Inderawati Rudy (JPBS FKIP Universitas Sriwijaya Palembang)</b></p>	<p>Menggagas Konsep <i>Literature for All</i> dalam Pengembangan Sastra Lokal Sebagai <i>Panasea</i> bagi Pembentukan Karakter Bangsa</p>		
<p>3) <b>Endro Sutrisno IKIP PGRI Madiun dan Susi Harliani (Poltek Elektronik ITS)</b></p>	<p>Bahasa Indonesia dalam Pembentukan Identitas Bangsa: Kajian Semantik Bahasa dalam Komunikasi Massa</p>			

<p>Rabu, 2 Juni 2010</p> <p>13.00—14.00</p>	<p><b>C.</b></p> <p>1) <b>Avianti Agusman, MA.</b> (Universitas Indonesia)</p> <p>2) <b>Zainal Hakim</b> (Pusat Bahasa)</p> <p><b>D.</b></p> <p>1) <b>Ferry Antoni dan Sutina</b> (LBPP LIA Bandung)</p> <p>2) <b>Wati Kurniawati (Pusat Bahasa)</b></p>	<p>Sastra Imigran Jerman Karya Pengarang-Pengarang Muda keturunan Turki</p> <p>Ideologi.Kebangsaan dalam Esei-Esei Karya M.H. Rustandi Kartakusuma</p> <p>Menggunakan Bahasa Inggris di Dusun Global: Mengokohkan Jati Diri dengan Menjejal Norma Pragmatis Lokal</p> <p>Revitalisasi Bahasa Loon di Negeri Latea</p>	<p><b>Ruang Sriwijaya</b></p> <p><b>Ruang Yudistira</b></p>	<p>Moderator C: Hasanuddin</p> <p>Pencatat:</p> <p>Moderator D: Agusniar Dian Savitri</p> <p>Pencatat:</p>
---	--	---	---	--

**Sidang Paralel 7**

Waktu	Pemakalah	Judul Makalah	Tempat	Keterangan
14.00—15.00	<b>A.</b>		<b>Ruang Syailendra</b>	Moderator A: Dian Roesmiati  Pencatat:
	1) <b>Drs. Houtman, M.Pd.</b> (Universitas PGRI Palembang)	Penerapan Konsep Aspek Verbal Todorov dalam Pengidentitasan Kelokalan Sastra		
	2) <b>Zurairhan Zakaria, MA. Dan Rahimah A. Hamid, PhD</b>	Pengembangan Sastra Lokal-Memperjuangkan Kelestarian Alam dalam Puisi Mutakhir Malaysia dan Indonesia		
	<b>B.</b>		<b>Ruang Ramayana</b>	Moderator B: Claudia Dhian Ariani  Pencatat:
1) <b>Triyoga Dharma Utami, S.Pd., M.Hum.</b> (Universitas Negeri Semarang)	Bahasa dan Alam: Upaya Membangkitkan Kesadaran Identitas Kelokalan dan kekayaan Ekologis melalui Legenda dan Tradisi			
	2) <b>Muhammad Ramdani</b> (Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta)	<i>Sasak Identity on Language</i>		

<p><b>C.</b></p> <p>1) <b>Saksono Prijanto</b> (Pusat Bahasa)</p> <p>2) <b>Indawan Syahri</b> (Universitas Muhammadiyah Palembang)</p>	<p>R.A. Moerhia dan Siti Kartini: Interpretasi terhadap Wawasan Kebangsaan</p> <p>Lokalitas dan Globalitas Peran Budaya Lokal dalam Pembelajaran Bahasa Asing</p>	<p><b>Ruang Sriwijaya</b></p>	<p>Moderator C: Hasanuddin</p> <p>Pencatat:</p>
<p><b>D.</b></p> <p>1) <b>Mugijatna</b> (FSSR Universitas Negeri Surakarta)</p> <p>2) <b>Suhardi Mukmin</b> (FKIP Universitas Sriwijaya)</p>	<p>Campur Sari: Sebuah Strategi Revitalisasi Budaya Jawa</p> <p>Nilai-Nilai Edukatif dalam Petatah Petiti Baghi Bahasa Besemah</p>	<p><b>Ruang Yudistira</b></p>	<p>Moderator D: Agusniar Dian Savitri</p> <p>Pencatat:</p>

D. Sidang Pleno III

Waktu	Pemakalah dan Judul Makalah	Tempat	Keterangan
15.15—16.45	<p><b>Ir. H. Eddy Santana Putra, M.T.</b> (Walikota Palembang)</p> <p><b>Dr. Azhar Ibrahim Alwee</b> (Universitas Nasional Singapura) Pedagogi Pemberdayaan Identiti dan Multikulturalisme: Pentingnya Paduan Sastera dan Sains Sosial dalam Menghadapi Era Globalisasi</p>	<b>Ruang Syailendra</b>	<p>Moderator: Indawan Syahri</p> <p>Pencatat: Tuty Kusmaini/Yulia Masitho</p>



## Sumatera Selatan Menuju Identitas Internasional

**H. ALEX NOERDIN**  
**Gubernur Sumatera Selatan**

### I. Pendahuluan

Indonesia baru yang ditandai dengan lahirnya masyarakat baru (*civil society*), dimana rakyat tidak lagi menjadi obyek tetapi menjadi subyek kekuasaan, sehingga kekuasaan berada di tangan rakyat dan untuk rakyat. Indonesia baru yang dicita-citakan hanya dapat terwujud bila masyarakat memperoleh pendidikan yang memadai, sehingga masyarakat dapat memahami perannya dalam proses perubahan sosial secara kreatif, konstruktif, untuk mencari bentuk-bentuk sentetik baru secara tulus, damai dan mencerahkan. Untuk itu kesejahteraan rakyat seharusnya dimaknai dengan makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik agar mampu meningkatkan penghasilan secara mandiri dan kreatif.

Perubahan distribusi kewenangan berbagai sektor pembangunan, dari *sentralisasi* ke *desentralisasi* merupakan peluang sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan. Salah satunya adalah terbukanya kesempatan yang lebih luas bagi daerah untuk melakukan inovasi dan mengembangkan pembangunan yang relevan dengan situasi dan kondisi serta potensi riil daerah. Desentralisasi memerlukan dukungan masyarakat yang lebih luas pada program-program pembangunan. Karena terdapat hubungan saling memberi, saling mendukung dan saling menguntungkan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Dalam tataran mikro, baik pada perencanaan, implementasi maupun evaluasinya, masyarakat diharapkan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kelancaran proses pembangunan.

Dapatlah dipahami sekarang, bagaimana pentingnya kearifan lokal yang bukan hanya untuk menentukan titik berangkat, melainkan juga untuk dimanfaatkan sebagai wahana untuk memaksimalkan proses pembangunan. Kegiatan Jelajah Musi misalnya, dapat dimanfaatkan sebagai wahana pendidikan lingkungan hidup dan keseimbangan ekologi; kehidupan masyarakat di sekitar Sungai Musi dapat menjadi model bagaimana mereka membangun pemukiman yang selaras alam, dan seterusnya. Otonomi daerah memberikan kesempatan untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka membangun peradaban nasional serta memberikan layanan prima terhadap masyarakat. Yang harus dicegah adalah menyempit dan mengkristalnya rasa kedaerahan. Pemerintah pusat perlu memberi perhatian serius dalam program-program yang memungkinkan masyarakat merasakan keIndonesiaan.

Pemerintah Daerah memiliki peran ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan dan sekaligus penyelenggara utama dalam pembangunan di daerah. Sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah, yaitu dalam kerangka investasi dan penyediaan barang dan pelayanan publik. Sebagai upaya menjalankan peran tersebut maka diperlukan perencanaan yang terukur, dan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengatur mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Untuk memenuhi ketentuan itu, Provinsi Sumatera Selatan diwajibkan menyusun RKPD. RKPD Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan mengakomodir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang penyusunannya diarahkan untuk lebih berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Selanjutnya dokumen perencanaan ini akan dijadikan dasar atau acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini dilakukan untuk memberikan arah, bagi pencapaian sasaran yang tepat bagi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan melalui penetapan prioritas pembangunan dan program sebagai agenda tahunan dalam mencapai Visi dan Misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Di era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah adalah semua urusan pemerintahan, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) kehadiran otonomi daerah, pada hakikatnya sebuah peluang bagi Pemda untuk lebih leluasa mengelola pembangunan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh daerah ini. Berbagai upaya peningkatan kinerja pembangunan pendidikan di Sumsel akan digagas dan dilakukan.

Didasari oleh pemikiran bahwa pembangunan yang diselenggarakan harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Sumsel sebagai provinsi yang terdepan melalui peran serta masyarakat cerdas yang berbudaya, akhirnya Pemprov Sumsel Periode 2008-2013 pun telah menetapkan visi pembangunan, "*Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya*". Visi ini diterjemahkan ke dalam misi pembangunan Sumatera Selatan dengan berbagai sektor dan prioritas pembangunan. Sumatera Selatan tidak sedang bermimpi untuk mewujudkan *identitas Internasional* dengan pemberdayaan sumberdaya lokal yang berdayasaing global. Kebangkitan dan kejayaan Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada 17 Juni 683 Masehi, dapat dijadikan sumber kekuatan dan inspirasi dalam mewujudkan optimisme masyarakat Sumatera Selatan menuju terwujudnya "*episode ke-2*" keemasan Sriwijaya di bumi Sumatera Selatan.

## II. Kerjaan Sriwijaya yang Menginspirasi

Sriwijaya adalah kerajaan Melayu kuno di pulau Sumatra yang banyak berpengaruh di Nusantara. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7; seorang pendeta Tiongkok, I-Tsing, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 selama 6 bulan. Prasasti pertama mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu Prasasti Kedukan Bukit di Palembang, Sumatra, pada tahun 683.

Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang kuat di pulau Sumatra dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa,

Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam bahasa Sansekerta, *sri* berarti “bercahaya” dan *wijaya* berarti “kemenangan”. Selanjut prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu Prasasti Kedukan Bukit di Palembang, tahun 682. Sekitar tahun 1992 hingga 1993, Pierre-Yves Manguin membuktikan bahwa pusat Sriwijaya berada di Sungai Musi antara Bukit Seguntang dan Sabokingking (terletak di provinsi Sumatra Selatan, Indonesia). Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan merupakan negara maritim. Negara ini tidak memperluas kekuasaannya diluar wilayah kepulauan Asia Tenggara, dengan pengecualian berkontribusi untuk populasi Madagaskar sejauh 3.300 mil di barat. Sekitar tahun 500, akar Sriwijaya mulai berkembang di wilayah sekitar Palembang. Kerajaan ini terdiri atas tiga zona utama - daerah ibukota muara yang berpusatkan Palembang, lembah Sungai Musi yang berfungsi sebagai daerah pendukung dan daerah-daerah muara saingan yang mampu menjadi pusat kekuasaan saingan.

Berdasarkan Prasasti Kota Kapur yang berangka tahun 682 dan ditemukan di pulau Bangka, Pada akhir abad ke-7 kemaharajaan ini telah menguasai bagian selatan Sumatera, pulau Bangka dan Belitung, hingga Lampung. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa Jayanasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum Bhumi Jawa yang tidak berbakti kepada Sriwijaya, peristiwa ini bersamaan dengan runtuhnya Tarumanagara di Jawa Barat dan Holing (Kalingga) di Jawa Tengah yang kemungkinan besar akibat serangan Sriwijaya. Sriwijaya tumbuh dan berhasil mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Malaka, Selat Sunda, Laut China Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata.

Di abad ke-7, orang Tionghoa mencatat bahwa terdapat dua kerajaan di Sumatera yaitu Malayu dan Kedah dan tiga kerajaan di Jawa menjadi bagian kemaharajaan Sriwijaya. Di akhir abad ke-8 beberapa kerajaan di Jawa, antara lain Tarumanegara dan Holing berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Menurut catatan, pada masa ini pula wangsa Melayu-Budha Sailendra bermigrasi ke Jawa Tengah dan berkuasa di sana. Di abad ini pula, Langkasuka di semenanjung Melayu menjadi bagian kerajaan. Di masa berikutnya, Pan Pan dan Trambalinga, yang terletak di sebelah utara Langkasuka, juga berada di bawah pengaruh Sriwijaya.

Di abad ke-9, wilayah kemaharajaan Sriwijaya meliputi Sumatera, Sri Lanka, Semenanjung Malaya, Jawa Barat, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Filipina. Dengan penguasaan tersebut, kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang hebat hingga abad ke-13.

Sriwijaya juga berhubungan dekat dengan kerajaan Pala di Benggal, dan sebuah prasasti berangka 860 mencatat bahwa raja Balaputra mendedikasikan seorang biara kepada Universitas Nalada, Pala. Relasi dengan dinasti Chola di India selatan cukup baik dan kemudian menjadi buruk setelah *Rajendra Coladewa* naik tahta dan melakukan penyerangan di abad ke-11.

Di tahun 902, Sriwijaya mengirimkan upeti ke China. Dua tahun kemudian raja terakhir dinasti Tang menganugerahkan gelar kepada utusan Sriwijaya. Dari literatur Tiongkok utusan itu mempunyai nama Arab hal ini memberikan informasi bahwa pada masa-masa itu Sriwijaya sudah berhubungan dengan Arab yang memungkinkan Sriwijaya sudah masuk pengaruh Islam di dalam kerajaan

Pada paruh pertama abad ke-10, diantara kejatuhan dinasti Tang dan naiknya dinasti Song, perdagangan dengan luar negeri cukup marak, terutama Fujian, kerajaan Min dan negeri kaya Guangdong, kerajaan Nan Han. Tak diragukan lagi Sriwijaya mendapatkan keuntungan dari perdagangan ini. Pada tahun 903, penulis Muslim Ibn Batutah sangat terkesan dengan kemakmuran Sriwijaya. Daerah urban kerajaan meliputi Palembang (khususnya Bukit Seguntang), Muara Jambi dan Kedah.

Beberapa aspek penting yang menginspirasi yang berasal dari kerajaan Sriwijaya:

### **1. Perdagangan**

Di dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas selat Malaka dan selat Sunda. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditi seperti kamper, kayu gaharu, cengkeh, pala, kepulaga, gading, emas, dan timah yang membuat raja Sriwijaya sekaya raja-raja di India.

### **2. Kebudayaan**

Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi budaya India, pertama oleh budaya Hindu dan kemudian diikuti pula oleh agama Buddha. Agama Buddha diperkenalkan di Sriwijaya pada tahun 425 Masehi. Sriwijaya merupakan pusat

terpenting agama Buddha Mahayana. Raja-raja Sriwijaya menguasai kepulauan Melayu melalui perdagangan dan penaklukan dari kurun abad ke-7 hingga abad ke-9. Sehingga secara langsung turut serta mengembangkan bahasa Melayu dan kebudayaan Melayu di Nusantara.

### **3. Pengaruh Islam**

Sangat dimungkinkan bahwa Sriwijaya yang termahsyur sebagai bandar pusat perdagangan di Asia Tenggara, sekaligus sebagai pusat pembelajaran agama Budha, juga ramai dikunjungi pendatang dari Timur Tengah dan mulai dipengaruhi oleh pedagang dan ulama muslim. Sehingga beberapa kerajaan yang semula merupakan bagian dari Sriwijaya, kemudian tumbuh menjadi cikal-bakal kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera kelak, disaat melemahnya pengaruh Sriwijaya.

Ada sumber yang menyebutkan, karena pengaruh orang muslim Arab yang banyak berkunjung di Sriwijaya, maka raja Sriwijaya yang bernama Sri Indrawarman masuk Islam pada tahun 718. Sehingga sangat dimungkinkan kehidupan sosial Sriwijaya adalah masyarakat sosial yang di dalamnya terdapat masyarakat Budha dan Muslim sekaligus. Tercatat beberapa kali raja Sriwijaya berkirin surat ke khalifah Islam di Suriyah. Bahkan disalah satu naskah surat adalah ditujukan kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720M) dengan permintaan agar khalifah sudi mengirinkan da'i ke istana Sriwijaya.

### **4. Warisan sejarah**

Meskipun Sriwijaya hanya menyisakan sedikit peninggalan arkeologi dan terlupakan dari ingatan masyarakat Melayu pendukungnya, penemuan kembali kemaharajaan bahari ini oleh Coedès pada tahun 1920-an telah membangkitkan kesadaran bahwa suatu bentuk persatuan politik raya, berupa kemaharajaan yang terdiri atas persekutuan kerajaan-kerajaan bahari, pernah bangkit, tumbuh, dan berjaya di masa lalu.

Berdasarkan Hikayat Melayu, pendiri Kesultanan Malaka mengaku sebagai pangeran Palembang, keturunan keluarga bangsawan Palembang dari trah Sriwijaya. Hal ini menunjukkan bahwa pada abad ke-15 keagungan, gengsi dan prestise Sriwijaya tetap dihormati dan dijadikan sebagai sumber legitimasi politik bagi penguasa di kawasan ini. Bahkan Bukit Siguntang, dewasa ini dikenal oleh para peziarah yang datang dari Singapura dan Malaka sebagai tempat asal muasal pendiri Tumasik (nama awal Singapura) dan Malaka.

Di samping Majapahit, kaum nasionalis Indonesia juga mengagungkan Sriwijaya sebagai sumber kebanggaan dan bukti kejayaan masa lampau Indonesia. Kegemilangan Sriwijaya telah menjadi sumber kebanggaan nasional dan identitas daerah, khususnya bagi penduduk Sumatera Selatan, dan segenap bangsa Melayu. Bagi penduduk Sumatera Selatan keluhuran Sriwijaya telah menjadi inspirasi seni budaya, seperti lagu dan tarian tradisional Gending Sriwijaya. Hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat Thailand Selatan yang menciptakan kembali tarian Sevichai (Sriwijaya) yang berdasarkan pada keanggunan seni budaya Sriwijaya.

### III. Sumsel Menatap Masa Depan

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008-2013 maka Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah “**Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya**”

**Sejahtera** adalah keadaan di mana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, sandang, dan papan) secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah. Dengan demikian, pembangunan harus mencakup aspek yang luas, termasuk rasa aman dan kinerja pemerintah yang amanah.

**Terdepan** adalah keadaan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan dan penguasaan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) yang tinggi, berkelanjutan, berada lebih baik dan menjadi acuan bagi daerah-daerah lain.

**Cerdas** adalah sikap pikir profesional yang didasarkan pada landasan moral yang tinggi, kemampuan dan kecakapan dalam membaca situasi, menangkap dan mengolah peluang, serta merancang dan melaksanakan pemecahan masalah dalam semua situasi. Insan dan masyarakat yang cerdas akan selalu optimis dan mampu memanfaatkan peluang untuk aktivitas yang produktif.

Dalam rumusan sederhana, masa depan Sumatera Selatan yang diinginkan adalah:

1. Daerah yang memiliki sumberdaya manusia handal dengan produktivitas tinggi yang bermartabat dan berkeadilan.

2. Daerah surplus pangan yang berkelanjutan dan komoditas perdagangan yang berdayasaing tinggi.
3. Daerah lumbung energi nasional.
4. Daerah industri maju berbasis sumberdaya lokal dengan optimasi peningkatan nilai tambah dan modal.
5. Daerah yang mempunyai jati diri sejati yang tidak luntur dengan majunya ekonomi dan teknologi serta pengaruh budaya baru.

Visi tersebut dijabarkan kedalam 10 (sepuluh) Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-2013 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi pembentukan sumberdaya manusia (SDM) Sumatera Selatan yang kreatif, produktif, inovatif dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan baik formal maupun informal.
2. Membangun pertanian pangan dan perkebunan berskala teknis dan ekonomis dengan infrastruktur yang cukup dan penerapan teknologi tepat guna.
3. Mendayagunakan sumberdaya pertambangan dan energi (fossil dan terbarukan) dengan cerdas, arif dan bijaksana, demi kepentingan masyarakat luas.
4. Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdayasaing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional, dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir serta industri kecil, menengah dan besar.
5. Membangun dan menumbuhkembangkan pusat-pusat inovasi yang berbasis pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi berkelanjutan.
6. Meningkatkan dan pemeratakan pembangunan menuju kesejahteraan yang bermartabat.
7. Membangun dan memperkuat jejaring kerjasama ekonomi (industri, perdagangan) dan kelembagaan (regional, nasional, dan internasional).
8. Membangun pemerintahan yang amanah (demokratis, berkeadilan, jujur dan bertanggungjawab, serta akuntabel).
9. Mengembangkan dan membina budaya daerah yang berakar nilai-nilai luhur "Simbur Cahaya".
10. Membina toleransi dan keserasian dalam kehidupan beragam.

Menyadari besarnya tantangan dan dinamika pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka berbagai program pembangunan harus disusun secara konsisten, bertahap, dan berkesinambungan.

Sesuai dengan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2008, kemajuan yang dicapai dalam tahun 2008 dan perkiraan tahun 2009 serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2010, maka Tema pembangunan tahun 2010 adalah “Pembangunan Pertanian dan UMKMK” dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pertanian;
2. Peningkatan UMKMK;
3. Pemantapan Pengembangan SDM;
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran ; dan
5. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Strategis.

Prioritas *pertama* yaitu Pembangunan Pertanian, Fokusnya adalah: Optimalisasi Pengembangan Pertanian di Daerah Rawa. Sasarannya antara lain:

- (a) Peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam upaya peningkatan pendapatan petani;
- (b) Peningkatan produksi, produktivitas perkebunan dan pendapatan petani pekebun;
- (c) Meningkatkan produktivitas dan produksi peternakan;
- (d) Meningkatkan kualitas kinerja penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan;
- (e) Meningkatkan kualitas kinerja penyuluhan perkebunan;
- (f) Meningkatkan keahlian petani peternak dalam pembudidayaan peternakan;
- (g) Meningkatkan fungsi jaringan irigasi;
- (h) Meningkatkan jaringan rawa yang baik;
- (i) Terwujudnya perencanaan penataan ruang kawasan yang tepat dan melibatkan semua stakeholder terkait;
- (j) Optimalisasi lahan dan akses pada pembiayaan pertanian;
- (k) Pertumbuhan luas areal;

- (l) Terpenuhiya kebutuhan pangan masyarakat dan mengurangi kerawanan pangan.

Arah kebijakan prioritas Pembangunan Pertanian pada Tahun 2010 antara lain:

1. Meningkatkan produk dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura melalui mekanisasi pertanian, pengembangan perbenihan hortikultura, pelatihan petani penerapan Teknologi Tepat Guna;
2. Mengembangkan sentra-sentra produksi pertanian melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian;
3. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui bantuan penguatan modal usaha, pengembangan kelembagaan usaha wanita tani dan penumbuhan lembaga pembiayaan agribisnis pedesaan dan kemitraan usaha;
4. Meningkatkan pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
5. Meningkatkan produktivitas ternak melalui pengembangan sapi integrasi sawit, pengembangan kambing integrasi kopi, fasilitasi pengembangan kerbau rawa.

Prioritas *kedua* yaitu Peningkatan UMKMK, Fokusnya adalah: Peningkatan Kualitas Produk; Diversifikasi dan pemasaran Hasil UMKMK. Sasarannya antara Meningkatnya Modal Kerja UMKMK.

- (a) Meningkatnya Volume Usaha, SHU Modal Sendiri dan Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi;
- (b) Meningkatnya modal UMKMK dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKMK;
- (c) Meningkatnya jumlah dan omzet UMKMK.

Arah Kebijakan prioritas Peningkatan UMKMK pada Tahun 2010 yaitu:

1. Memperkuat modal UMKMK dengan memberikan modal kerja kepada 2.000 UMKMK;
2. Meningkatkan dan mengembangkan Daya Saing 400 UMKMK;
3. Meningkatkan kemampuan 250 SDM UMKMK;

4. Memperkuat kemitraan strategis antara 150 UMKMK dengan Usaha Besar;
5. Mengembangkan dan membina sentra industri kecil melalui pendekatan berbasis *One Village One Product* (OVOP).

Prioritas *ketiga* yaitu Pemantapan Pengembangan SDM, Fokusnya adalah: Pemantapan Pembangunan Sumberdaya Manusia, melalui Kesenambungan Pelayanan Sekolah Gratis dan Berobat Gratis serta Merealisasikan Berdirinya Sekolah dan Rumah Sakit Internasional. Sasarannya antara lain:

- (a) Penyediaan sarana/prasarana PAUD oleh pemerintah dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak-kanak (TK);
- (b) Pembangunan Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratorium; Rehabilitasi Gedung Sekolah yang rusak; Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI, SMP/MTs negeri/swasta;
- (c) Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana serta pendidikan, peluasan daya tampung anak usia 16-18 tahun, sehingga APK meningkat dari tahun sebelumnya;
- (d) Untuk memperluas akses pendidikan non formal dengan memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dari usia dini hingga usia lanjut melalui jalur non formal;
- (e) Terjaminnya ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.
- (f) Terjaminnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan;
- (g) Mengatasi masalah gizi utama di masyarakat terutama pada kelompok rentan.
- (h) Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular;
- (i) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
- (j) Tersedianya Diklat Teknis, Fungsional, Pemerintahan dan Politik serta Diklat Kepemimpinan berdasarkan Kebutuhan SKPD;
- (k) Meningkatnya profesionalisme, pengabdian dan kesetiaan PNS dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

- (1) Tersedianya pelayanan kepada masyarakat tidak lagi secara manual tetapi berbasis komputer.

Arah Kebijakan Prioritas Pemantapan Pengembangan SDM Tahun 2010 antara lain:

1. Pendirian TK Negeri di setiap kecamatan minimal 2 lembaga;
2. Bantuan Iuran Komite Sekolah bagi 1.125.55 siswa SD/MI, SMP/MTs;
3. Bantuan Iuran Komite Sekolah bagi 264.080 siswa SMA/SMK/MA;
4. Bantuan untuk 18 Sekolah Standar Nasional Bertaraf Internasional (SSN-SNBI) SMP;
5. Bantuan untuk Sekolah Standar Nasional Bertaraf Internasional (SSN-SNBI) 20 SMA dan 10 SMK;
6. Rehabilitasi gedung SLB;
7. Pembangunan RS Internasional;
8. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat;
9. Pemberian 583.794 paket makanan tambahan dan vitamin bagi bayi dan balita;
10. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
11. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat;
12. Meningkatkan kedisiplinannya 7.833 PNS Pemprov Sumsel.

Prioritas *keempat* yaitu Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, Fokusnya adalah: Mengurangi Angka Kemiskinan & Pengangguran serta Penyediaan Lapangan Kerja melalui Program *Pro-Poor*, *Pro-Job* dan *Pro-Growth*. Sasarannya antara lain:

- (a) Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan program-program pemberdayaan masyarakat;
- (b) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan;
- (c) Perluasan Lapangan Usaha bagi Pencari Kerja;
- (d) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri pengolahan;
- (e) Terciptanya data base hasil litbang serta sinergi kegiatan litbang;
- (f) Pengembangan Jaringan Promosi Pariwisata;

- (g) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- (h) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan.

Arah Kebijakan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Tahun 2010 antara lain:

1. Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);
2. Fasilitasi dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
3. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BLK;
4. Kegiatan Padat Karya Produktif;
5. Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat;
6. Penyelenggaraan Pelatihan Pemagangan dalam negeri dan luar negeri;
7. Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi BLK menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi;
8. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi di wilayah strategis dan cepat tumbuh;
9. Pembangunan permukiman transmigrasi di wilayah tertinggal;
10. Pengembangan TTG Energi Baru dan Terbarukan;
11. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata.

Prioritas *kelima* yaitu Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Strategis, Fokusnya adalah: Percepatan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api. Sasarannya antara lain:

- (a) Terbangunnya kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api beserta infrastruktur;
- (b) Tersedianya jaringan kereta api batubara ke Tanjung Api-Api dan Kereta Api Mahasiswa UNSRI Inderalaya;
- (c) Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan;
- (d) Meningkatnya kualitas lingkungan diperkotaan dan perdesaan;
- (e) Meningkatnya struktur dan kapasitas jalan;
- (f) Terpeliharanya jalan dan jembatan Provinsi;
- (g) Tersedianya sarana dan prasarana untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan;
- (h) Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih;
- (i) Terciptanya kesinambungan program dan kegiatan pertambangan dan energi di Sumatera Selatan;

- (j) Terjaminnya ketersediaan energi dan tenaga listrik dengan harga yang kompetitif dan terjangkau masyarakat.

Arah kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Strategis pada Tahun 2010 antara lain:

1. Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api (Tahap III);
2. Penyusunan Master Plan Transportasi Kereta Api Sumsel;
3. Studi Investasi Pemprov. Sumsel Angkutan Batubara dengan Kereta Api;
4. Pembangunan SPAM kapasitas 20 liter/detik (4 unit), kapasitas 10 liter/detik (8 unit), kapasitas 5 liter/detik (1 unit), pembangunan IKK kapasitas 10 liter/detik (8 unit), pembangunan IKK kapasitas 5 liter/detik (3 unit)

Dengan demikian, maka program utama pembangunan Sumatera Selatan terletak pada **pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja**. Ketiga aspek ini berperan sangat penting dalam menciptakan dan mewujudkan perasaan tenang di tengah masyarakat.

#### **IV. Penutup**

Hadirnya era otonomi daerah merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya, dalam berbagai sektor pembangunan. Untuk itu, Pemprov Sumsel telah berkomitmen untuk memposisikan pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja sebagai prioritas utama pembangunan. Berbagai kebijakan strategis di bidang pembangunan pun telah dirumuskan oleh pemerintah daerah ini. Di antaranya adalah pengalokasian anggaran pendidikan, kesehatan dan pembangunan bidang ekonomi. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat upaya pencapaian Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya, sebagaimana yang menjadi visi pemerintah daerah ini.

Kerajaan Sriwijaya merupakan kebanggaan tidak hanya bagi masyarakat Sumatera Selatan, akan tetapi bagi bangsa Indonesia bahkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Kejayaan Sriwijaya pada masanya telah mengilhami *spirit* membangun bagi Pemerintah dan masyarakat Sumatera

Selatan. Bila saat ini Sumatera selatan terus berupaya membangun dan komitmen mewujudkan layanan publik yang berstandar Internasional, hakekatnya hal itu telah di mulai pada era kerajaan Sriwijaya. Sesungguhnya pergaulan Internasional dalam bidang perdagangan, kebudayaan, pendidikan, politik dan lain-lain telah menempatkan kerajaan Sriwijaya sebagai kekuatan maritim di kawasan ASEAN. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama masyarakat Sumsel, berupaya mewujudkan “*episode ke-2*” keemasan Sriwijaya, dengan cara melaksanakan eksplorasi sumber daya alam (Provinsi terkaya ke-5) dan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

## Daftar Pustaka

- Asy'arie, Musa. 2001. *Keluar dari Krisis Multi Dimensi*, Yogyakarta, Lesfi.
- Bappeda, 2010. *Rencana Strategis Pembangunan Sumatera Selatan 2008-2013*.  
<http://id.wikipedia.org/wiki/Sriwijaya>
- Pidarta, Made. *Perencanaan Pendidikan Partisipatoris, dengan Pendekatan Sistem*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005)
- Tilaar, H.A.R, 2005. *Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan dari Perspektif Posmodernisme dan Studi Kultural*, Jakarta, Kompas.
- Nurhan, Kenedy (editor), 2010. *Jelajah Musi, Eksotika Sungai di Ujung Senja*, Jakarta, Kompas.
- Noerdin, Alex. 2008. *Sekolah Gratis: Sebuah Kebijakan Populis di Era Otonomi Daerah*. Palembang : PT. Rambang.
- Noerdin, Alex. 2009. *Komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel Bidang Pendidikan : Seminar Nasional PPs Universitas Negeri Jakarta*, tanggal 24 Maret 2009.
- Noerdin, Alex. 2009. *Jelajah Musi dan Peta Pembangunan*, dalam Kompas Rabu 28 April 2010.
- Sujtpto, 2009, *Sumberdaya Manusia, Otonomi Daerah dan Kearifan Lokal*, Seminar Nasional PPs UNJ, tanggal 24 Maret 2009.

# ✓ BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA MASYARAKAT MULTIKULTUR

*Dr. Sugiyono*

*Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional*  
[sh\\_sugiyono@yahoo.com](mailto:sh_sugiyono@yahoo.com)

## 1. PENGANTAR

Bahasa Indonesia yang sebenarnya berkerabat dengan bahasa Melayu (Malaysia dan Brunei Darussalam) tumbuh menjadi entitas yang makin berbeda. Perbandingan korpus ketiga bahasa ini menunjukkan perbedaan yang signifikan walaupun selain kedekatan garis sejarah upaya mendekatkan ketiga bahasa ini juga dilakukan secara sengaja dan terencana. Kajian terhadap korpus bahasa Indonesia, bahasa Melayu Malaysia, dan bahasa Melayu Brunei Darussalam menunjukkan hasil yang menarik. Kajian atas korpus yang 518.040 kata, yaitu terdiri atas 232.344 kata korpus bahasa Indonesia, 167.588 kata korpus bahasa Melayu Malaysia, dan 118.108 kata korpus bahasa Melayu Brunei Darussalam menunjukkan bahwa kemiripan tipe - konsep *type and token* - antara ketiga bahasa ini hanya berkisar 26% hingga 34% saja. Tipe bahasa Indonesia hanya 31% mirip dengan tipe bahasa Melayu Malaysia, dan bahkan hanya 26% mirip dengan tipe bahasa Melayu Brunei Darussalam:

Multikulturalisme yang melatarbelakangi kelahiran dan pertumbuhan bahasa Indonesia menjadi penyebab utama perbedaan itu. Bahasa Indonesia tumbuh dengan latar multikulturalisme yang sangat kompleks. Usaha pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern juga mempertimbangan keragaman kultur masyarakat pemilik bahasa Indonesia itu. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan bahasa Indonesia diarahkan kepada upaya pemertahanan keragaman etnis penutur bahasa Indonesia selain tentu saja harus melihat orientasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 2. MULTIKULTURALISME KELAHIRAN BAHASA INDONESIA

### 2.1 PERAN DUNIA PERDAGANGAN DAN PENYEBARAN ISLAM

Bahasa Melayu mempunyai sejarah yang cukup panjang dalam peradaban Nusantara (baca misalnya dalam Alisjahbana, 1957; Sneddon, 2003; Collins, 2004). Dalam periode sebelum bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional, adalah fakta bahwa embrio bahasa Indonesia - yaitu bahasa Melayu - telah menjadi *lingua franca*. Dalam kedudukannya sebagai *lingua franca* itu bahasa Melayu mempunyai sebaran yang mencakupi seluruh wilayah Nusantara, terutama daerah persisir. Bahasa Melayu itu kemudian “menyelinap” masuk ke ranah-ranah lain yang strategis, seperti ranah politik, ranah pendidikan, ranah kebudayaan, dan ranah keagamaan.

Persebaran penggunaan bahasa Indonesia di ranah perdagangan, ranah pendidikan, ranah kebudayaan, dan ranah keagamaan tidak terlepas dari peran perkumpulan-perkumpulan dagang seperti Serikat Dagang di Solo (1905), Serikat Dagang Islamijah (1909), Serikat Dagang Islam di Bogor dan Surabaya (1911), Sarekat Islam, serta Muhammadiyah (1912). Peran perkumpulan Sarekat Islam dengan anggota sekitar tiga juta orang (baca Usman, 1964:86) mempunyai pengaruh yang menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Dalam kegiatan organisasinya, perkumpulan Sarekat Islam selalu menggunakan bahasa Melayu sehingga sebaran bahasa ini pun menjadi semakin luas. Selain perkumpulan itu, organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta juga mempunyai peran penting. Dua perkumpulan ini mempunyai keleluasaan dalam menyebarkan bahasa Melayu karena pada dasarnya keduanya mengedepankan misi syiar Islam dan oleh karenanya tidak mendapat kawalan yang terlalu ketat oleh pemerintah yang berkuasa ketika itu. Bahkan, perkumpulan Muhammadiyah yang ketika itu memang tidak pernah terjun dalam percaturan politik gerak langkahnya menjadi lebih leluasa dibandingkan Sarekat Islam. Selain misi syiar Islam, organisasi ini juga mempunyai misi sosial dan misi pendidikan

sehingga dapat diduga bahasa Melayu di wilayah Nusantara tidak hanya menyebar dikalangan umat Islam saja.

Persebaran bahasa Indonesia melalui cara ini mempunyai keleluasaan sehingga dapat menembus batas-batas geografis dan kultural Nusantara sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia kemudian menjadi wahana komunikasi di Nusantara yang mampu menghubungkan atau menjadi jembatan komunikasi antara etnis yang satu dengan etnis yang lain yang sangat banyak dan beragam-ragam coraknya. Keperluan untuk memahami syiar Islam yang sama, untuk berdagang, untuk melakukan upaya pendidikan, serta untuk mengemban misi-misi sosial membuat masyarakat meletakkan bahasa tertentu - yaitu bahasa Melayu - sebagai bahasa bersama dan mengesampingkan bahasa etnis mereka.

Oleh karena itu, bahasa Melayu ketika itu mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi - walaupun masih lebih rendah daripada bahasa Belanda. Orang yang mampu berbahasa Melayu mempunyai kedudukan yang terpandang di mata masyarakat karena mereka dapat menghubungkan dan membuka kungkungan etnisitas dengan dunia luar yang lebih luas cakupannya daripada lingkup kedaerahan mereka. Atas nama keperluan-keperluan komunikasi itu, penggunaan bahasa Melayu di Indonesia menjadi semakin meluas dan kerangka efektifitas dan efisiensi komunikasi yang dicapai dengan media bahasa Melayu itulah yang kemudian menjadi latar yang sangat kuat untuk mewujudkan bahasa persatuan.

## 2.2 PERAN DUNIA POLITIK

Pada awal abad ke-20, semasa pendudukan Belanda, orientasi penguasaan bahasa Belanda di Indonesia sangatlah kuat. Bahasa Belanda perlu diajarkan kepada bangsa Indonesia (Bumiputera) khususnya untuk menguasai ilmu pengetahuan. Pendapat itu dikemukakan dalam *Nederlandsche taal en Letterkundig Kongrés* tahun 1890 yang kemudian memicu berdirinya *Nederland Verboon* yang diberi tugas mempropagandakan pelajaran bahasa Belanda. Bahasa Belanda dianggap penting pada waktu itu karena tiga hal (baca *Alisjahbana*, 1957:6-7), yaitu bahwa

- (1) tidak ada satu pun bahasa di Indonesia (bahasa anak negeri) yang dapat digunakan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan,
- (2) bahasa Belanda merupakan jalan bagi pribumi (bumiputra) untuk meningkatkan derajat, dan
- (3) bahasa Belanda dapat menjadi penghubung yang baik antara orang Belanda dan orang pribumi.

Dalam kondisi itu, apa yang terjadi dengan bahasa Melayu yang telah menjadi lingua franca? Tentu saja bahasa Melayu tersisih. Akan tetapi, bersamaan dengan bangkitnya kesadaran bangsa Belanda yang sesungguhnya tidak mau disamakan dengan bangsa pribumi - yang waktu itu di sebutnya *inlander* - bahasa Melayu mendapat posisi yang lebih baik. Penggunaan bahasa Belanda dalam rapat-rapat dan surat kabar, mulai didesak penggunaan bahasa Melayu.

Bagaimana bahasa Melayu ketika itu bisa menggeser bahasa Belanda yang semula diyakini akan menjadi alat diplomasi pemerintah Belanda yang ampuh? Selain adanya kesadaran bahwa bangsa Belanda harus berada dalam posisi yang lebih tinggi daripada orang-orang pribumi, juga ada kesadaran para cerdik cendekia pribumi - yang telah dididik dalam bahasa Belanda itu - akan perlunya membangun harga diri. Alisjahbana (1957:8) mengatakan bahwa rupanya penyebaran bahasa Belanda di kalangan bangsa Indonesia menyebabkan berkurangnya perbedaan antara bangsa Belanda dan bangsa pribumi dan orang Belanda sangat takut apabila derajatnya menjadi sama dengan orang-orang pribumi itu. Oleh karena itu, pada masa itu, bahasa Melayu mendapat keuntungan dari dua sisi. Dari sisi Belanda, bahasa Melayu dapat kembali menciptakan jarak dengan orang pribumi, sedangkan dari sisi bangsa Indonesia bahasa Melayu dapat merealisasikan harga diri yang sedang dibangunnya.

Penggunaan bahasa Melayu di percaturan politik dimulai pada tahun 1918 ketika Dewan Rakyat dibuka dan R.O.S. Tjokroaminoto dan A.

Muis menjadi anggota dewan itu. R.O.S. Tjokroaminoto adalah anggota yang diangkat pemerintah, sedangkan A.Muis adalah anggota dewan yang dipilih rakyat. Kedua anggota dewan dari bangsa Indonesia ini merasakan perlunya bangsa Indonesia mempunyai bahasa persatuan dan menggunakan bahasa persatuan itu di dalam persidangan Dewan Rakyat. Ini merupakan tonggak penting karena dengan diplomasi politis yang tidak terlalu lama akhirnya penggunaan bahasa Melayu itu mendapat persetujuan dari Ratu Belanda pada tanggal 25 Juni 1918. Persetujuan Ratu Belanda itu membuka peluang penggunaan bahasa melayu dalam percaturan politik secara pasti. Bahasa Melayu yang semula hanya merupakan *lingua franca* kemudian dapat menjadi bahasa resmi dalam percaturan politik di antara bahasa Belanda yang memang dikondisikan menjadi bahasa utama penyelenggaraan pemerintahan ketika itu. Fakta ini yang kemudian diikuti oleh banyak peristiwa untuk memperkuat posisi bahasa Melayu dalam dinamika politik bangsa Indonesia di Nusantara sehingga bahkan bahasa Melayu itu kemudian perlu dilahirkan sebagai bahasa baru yang diberi bahasa Indonesia.

Pemilihan nama *bahasa Indonesia*, bukan *bahasa Melayu* mempunyai latar pemikiran politis yang sangat hebat. Sekali lagi, pertimbangan keragaman etnis Indonesia sebagai bangsa yang akan diikat menjadi satu ikatan politis menjadi pertimbangan utama. Sebutan *bahasa Melayu* menyiratkan bahwa bahasa itu hanya milik sebagian etnis di wilayah Nusantara, sementara sebutan *bahasa Indonesia* yang sesungguhnya berupa konstruksi posesif - bahasa milik Indonesia - menghapus batas-batas etnis yang sangat banyak. Konstruksi posesif yang mengarah kepada etnis tertentu potensial dapat memicu disintegrasi, sementara upaya menggalang kebersamaan dan persatuan sedang digalakkan. Itulah sebabnya, bunyi ikrar Sumpah Pemuda yang semula berbunyi "Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu" yang diusulkan oleh Moh. Yamin, diubah menjadi "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia" oleh M. Tabrani dan kawan-kawan. Dengan istilah *bahasa Indonesia*, maka siapapun di wilayah Indonesia merasa ikut memiliki bahasa itu apapun etnisnya, atau apapun latar belakang kulturalnya.

### 3. MULTIKULTURALISME KORPUS BAHASA INDONESIA

#### 3.1 SISTEM AKSARA

Tradisi tulis di Indonesia telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Sistem ortografi daerah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia umumnya diturunkan dari ortografi Pallawa dan Arab. Hingga abad ke-19, sekurang-kurangnya ada sebelas ortografi local yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, yaitu aksara Jawa, Sunda, Bali, Bugis, Karo, Mandailing, Lampung, Rejang, Toba, dan aksara Kerinci. Beberapa di antaranya, misalnya aksara Jawa, dan Bali, masih digunakan secara baik hingga sekarang, tetapi secara umum aksaraitu tidak lagi digunakan.

Dilihat dari sebarannya, maka sistem aksara yang berkembang di Indonesia itu mempunyai cakupan penggunaan yang sangat luas. Secara umum, aksara yang berkembang di Asia Selatan dan Asia Tenggara diturunkan dari system aksara Brahmi. Baik langsung maupun tidak langsung, terdapat sekurang-kurangnya 200 sistem aksara yang dipengaruhi oleh aksara Brahmi ini. Cakupan wilayah penggunaan system aksara ini meliputi misalnya Burma, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, dan Filipina.

Ketika peradaban Islam masuk ke Nusantara, aksara Arab kemudian juga mewarnai system aksara daerah di Indonesia. Aksara Arab kemudian diadopsi oleh bahasa Melayu menjadi aksara Jawi dengan penyesuaian dan penambahan 6 huruf untuk melambangkan bunyi-bunyi khusus dalam bahasa Melayu. Karena aksara ini sesungguhnya aksara Arab tetapi disesuaikan dengan bahasa Melayu, maka ortografi ini kemudian juga disebut *Arab-Melayu*. Sistem aksara ini bahkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di daerah-daerah yang telah lebih dahulu mengenal system aksaranya sendiri yang diturunkan dari ortografi Palava atau Bhrami. Di Jawa yang telah mempunyai aksara Jawa, misalnya, aksara Arab-Melayu itu juga digunakan secara luas dengan nama *pegon*.

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa bangsa Indonesia tidak mengusung bahasa Melayu lengkap dengan sistem aksaranya itu menjadi bahasa Indonesia. Bukankah aksara Jawi juga mempunyai sebaran yang sangat luas di wilayah Nusantara, mengikut sebaran

bahasa Melayu itu sendiri? Tampaknya penggunaan sistem aksara yang telah ada tidak mendukung upaya penyatuan bangsa Indonesia. Sekali lagi kemenangan cirri kultur tertentu di dalam membangun kebersamaan adalah hal yang harus dihindari. Penggunaan sistem aksara tertentu ke dalam sistem bahasa persatuan justru akan memicu sentimen perpecahan. Oleh karena itu, Kelahiran ejaan Van Ophuisjen tahun 1901 yang berbasis aksara Latin ini membawa bahasa Melayu menjadi lebih berkembang dibandingkan ketika bahasa itu menggunakan aksara Jawi. Sistem ejaan ini kemudian digunakan dalam karya-karya yang dipublikasi oleh *Commissie voor de Volkslektuur* - yang pada tahun 1917 berubah namanya menjadi Balai Pustaka - dan juga sebagian besar surat kabar pada masa itu. Kehadiran sistem ejaan ini boleh dikatakan merupakan peletakan dasar sistem ejaan Latin bahasa Melayu yang pada akhirnya menjadi dasar pengembangan sistem ejaan bahasa Indonesia. Pertumbuhan publikasi Balai Pustaka dan penerbitan dunia pers berbahasa Melayu kemudian disuburkan dengan hadirnya sistem aksara itu. Bahasa Melayu yang semula merupakan bahasa yang sangat dipengaruhi istana, kemudian berkembang menjadi bahasa yang dibentuk oleh gaya bahasa tokoh-tokoh pergerakan dan tentu saja juga oleh gaya bahasa surat kabar. Balai Pustaka dan berbagai surat kabar seperti *Bintang Timur* (Jakarta), *Pewartu Deli* (Medan), *Suara Umum* (Surabaya), dan *Persamaan dan Sinar Sumatra* (Padang) telah membentuk bahasa Melayu ketika itu sehingga kesan ragam Melayu Tinggi mulai ditinggalkan. Ini merupakan peran besar media massa dalam perluasan sebaran bahasa Melayu walaupun jangkauannya tidak seluas jangkauan perkumpulan Sarekat Islam dan Muhammadiyah.

Kongres Bahasa Indonesia pertama pada tanggal 25-27 Juli 1938 yang diselenggarakan di Solo bahkan menuntut agar diadakan sistem ejaan baru dan mendesak agar orang Indonesia selalu menggunakan ejaan itu selain juga mengajarkan sistem ejaan internasional di dalam pendidikan menengah. Sejak itu, dari satu periode ke periode berikutnya sistem aksara Indonesia yang dikembangkan dari dasar aksara Latin semakin dimantapkan. Dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata pilihan atas aksara Latin sebagai dasar ortografi Indonesia memang sangat tepat karena selain dapat mengatasi masalah keragaman sistem aksara etnis manapun di Indonesia, sistem aksara ini juga mempunyai orientasi ke depan yang sangat terbuka. Manfaatnya sangat dirasakan ketika teknologi dan informasi kemudian dikembangkan dengan basis aksara Latin sehingga

bahasa Indonesia dapat secara mudah di dalam teknologi informasi tanpa kendala ortografi. Sementara untuk dapat menggunakan aksara daerah, registrasi *unicode* aksara itu bukan saja memerlukan waktu yang panjang, tetapi juga dana dan tenaga yang tidak sedikit.

### 3.2 PEMERKAYAAN KOSAKATA

Untuk meningkatkan daya ungkap bahasa Indonesia atas semua konsep keindonesian dan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi modern, bahasa Indonesia selalu dikembangkan dengan menambah perbendaharaan kosakata. Dari satu kongres ke kongres berikutnya, perintah pemerikayaan kosakata dan strategi yang harus ditempon di dalam pemerikayaan itu selalu dinyatakan. Kongres Bahasa Indonesia pertama (1938), misalnya, mengamanatkan pengembangan bahasa Indonesia dengan mengambil kata-kata per-bendaharaan umum bahasa asing. KBI Kedua (1954) selain mendesak untuk menerima istilah-istilah yang sudah lazim digunakan dan istilah ilmiah internasional, juga menekankan perlunya memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan menggali kata-kata dari bahasa daerah dan bahasa serumpun. Semangat seperti inilah yang kemudian dirumuskan dalam strategi pengembangan kosakata bahasa Indonesia yang dituangkan dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUI).

Dengan strategi itu, pertumbuhan korpus bahasa Indonesia kemudian diwarnai oleh kosakata daerah dan kosakata asing. Akan tetapi, karena orientasi pengembangan kosakata bahasa Indonesia didasarkan pada keperluan pengguna bahasa, maka laju pengembangan kosakata dengan memanfaatkan unsur asing jauh lebih banyak dibandingkan dengan pemanfaatan unsur daerah. Di dalam prinsip pemerikayaan kosakata, kemunculan bentuk-bentuk di dalam korpus merupakan suatu petunjuk bahwa bentuk itu diperlukan oleh penutur dan jika bentuk itu belum ada istilahnya dalam bahasa Indonesia, maka bentuk itu berpeluang dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia - melalui upaya penggalian kekayaan bahasa Indonesia maupun kekayaan bahasa daerah - atau juga berpeluang diserap menjadi kosakata atau istilah bahasa Indonesia dengan penyesuaian lafal maupun ejaan.

Dalam pengembangan peristilahan, selama ini sesungguhnya dilakukan dengan kesepakatan yang sangat bagus. Sejak 1974 hingga tahun 2005, tidak kurang dari 325.000-an istilah telah dihasilkan melalui forum kerja sama Mabbim (Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia,

Malaysia). Dari semua istilah yang dihasilkan itu, bahan dasar pembentukan istilah masih bersumber dari bahasa Indonesia. Dari 387.983 kata yang ada di dalam glosarium istilah Indonesia, jika diklasifikasikan atas dasar sumbernya akan diperoleh data seperti yang tampak dalam tabel berikut.

### Sumber Istilah Bahasa Indonesia

Sumber	n	%
Bahasa Asing	61.757	15,9
Bahasa Serumpun	3257	0,8
Bahasa Indonesia	322.969	83,2
Total	387.983	100,0

Ternyata sumber terbesar pengembangan istilah bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia sendiri, yaitu sebesar 83,2%. Data itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kosakata bahasa Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk menghasilkan istilah baru, baik dalam paduannya dengan kata lain dari bahasa Indonesia, paduannya dengan kata tertentu dengan bahasa serumpun, maupun paduannya dengan kata lain yang diserap. Kata bahasa asing - terutama bahasa Inggris - hanya berkisar 15,9%, sedangkan kata yang berasal dari unsur daerah hanya berkisar 0,8% saja. Istilah serapan yang cenderung lebih disukai pengguna sesungguhnya tidak terlalu banyak. PUPI telah diterbitkan pada tahun 1975 dan telah dua kali direvisi, yaitu pada tahun 1989 dan tahun 2004. Kalau dibandingkan, edisi kedua dan edisi ketiga - edisi pertama dan kedua tidak ada perbedaan - akan tampak perbedaan yang amat penting. Perbedaan itu terletak pada konsep sumber pengembangan istilah bahasa Indonesia. Dalam edisi II dinyatakan bahwa kata umum bahasa Indonesia, baik yang lazim maupun yang tidak lazim dapat diangkat menjadi istilah bidang tertentu apabila memenuhi syarat ketepatan pengungkapan konsep, lebih singkat daripada kata lain yang beracuan sama, dan kata itu tidak mempunyai konotasi buruk. Jika bahasa Indonesia tidak memiliki kata yang diperlukan untuk istilah bidang tertentu, usaha pencarian istilah dilanjutkan ke penggalian kosakata bahasa yang serumpun dengan bahasa Indonesia, termasuk bahasa-bahasa daerah di Indonesia dengan tetap memperhatikan aspek ketepatan makna, singkat, dan tidak berkonotasi negatif. Jika dari kedua sumber itu tidak ditemukan,

barulah digunakan istilah bahasa asing dengan penyesuaian seperlunya.

Perihal sumber pengembangan istilah dalam bahasa Indonesia itu ditetapkan berbeda dalam PUI edisi ketiga. Dengan kriteria pemilihan kata yang sama, sumber pengembangan istilah dalam bahasa Indonesia mengalami beberapa perubahan. Sumber pengembangan istilah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bahasa Indonesia - termasuk unsur yang pernah diserap dari bahasa lain - dan bahasa Melayu, bahasa Nusantara yang serumpun (yaitu bahasa Melayu Malaysia dan Brunei Darussalam), termasuk bahasa Jawa Kuno, dan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab.

Dengan demikian, PUI edisi II menerapkan dua pemrioritasan dalam pengembangan istilah, yaitu pemrioritasan bahasa sumber dan pemrioritasan calon istilah. Bahasa sumber pengembangan istilah disusun secara hierarkis dengan urutan bahasa Indonesia, bahasa serumpun, bahasa Inggris, bahasa asing lain. Calon istilah yang dihasilkan setelah menggali dari keempat sumber tadi kemudian dipilih berdasarkan pola prioritas tertentu. Prosedur pengembangan istilah dalam PUI edisi III memberi peluang kepada yang sama terhadap setiap sumber istilah. Pemrioritasan sumber istilah tidak ada lagi. Demikian juga penjajaran kandidat istilah dari berbagai sumber itu untuk kemudian dipilih. Artinya, proses pengembangan istilah dipangkas menjadi lebih singkat.

Cara pengembangan istilah seperti itu tidak membawa keuntungan bagi bahasa daerah. Penggunaan kata di dalam korpus bahasa Indonesia - yang merupakan cerminan ungkapan masyarakat Indonesia sudah membawa bahasa Indonesia ke arah yang menjauh dari bahasa Melayu - tidak berjalan sejajar dengan pengembangan istilah. Prosedur pengembangan istilah yang terakhir memberi peluang yang amat bagus bagi bahasa daerah dalam pengayaan kosakata bahasa Indonesia. Alih-alih pemrioritasan bahasa sumber, pengembangan istilah lebih didasarkan pada ketepatan konsep, keekonomisan bentuk, dan kebebasan konotasi negatif. Prinsip ini sejalan dengan prinsip perencanaan pengembangan istilah yang termuat di dalam *Guidelines for Terminology Policy* (2005) yang menekankan perlunya pertimbangan aspek keekonomisan, ketepatan, atau konotasi. Sebuah istilah dianggap lebih tepat daripada istilah yang lain karena istilah itu lebih pendek, lebih tepat maknanya, atau tidak memiliki konotasi negatif, baik secara politis maupun secara semantis.

Pengembangan kosakata, selama ini berpedoman pada pendekatan deskriptif. Pendekatan ini mengamati dan menganalisis istilah yang beredar di masyarakat. Pengembangan istilah dilakukan melalui pengumpulan istilah, pembakuan, dan harmonisasi. Pada tahap awal, semestinya pengembangan peristilahan dimulai dengan mendo-kumentasi keragaman istilah yang dipakai masyarakat dengan memperhatikan keragaman budaya, bahasa, disiplin, dan profesi (*Guidelines for Terminology Policy*). Pendekatan ini bertahun-tahun digunakan untuk mengembangkan kosakata di dalam bahasa Indonesia, tetapi tampaknya pendekatan ini tidak tepat untuk kondisi multilingualisme di Indonesia. Protes keras pernah ditujukan kepada Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional karena tingginya frekuensi kemunculan kosakata dari etnis tertentu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa pengembangan kosakata dengan pendekatan ilmiah sebagaimana seharusnya mengembangkan kamus, tidak berlaku bagi bahasa Indonesia yang penuturnya multikultural. Setiap penutur menuntut keterwakilan etnis atau budayanya di dalam korpus bahasa Indonesia dan tututan itu menjadi hal yang sangat penting untuk mengembangkan bahasa Indonesia agar tetap menjadi identitas multikultur itu.

Pengembangan KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) yang selama ini berpegang pada pendekatan deskriptif - kata atau istilah yang muncul dalam korpus diangkat menjadi lema - kini menerapkan pula pendekatan preskriptif. Akibat pendekatan ini, sebuah kata dapat diangkat menjadi lema baru dalam kamus bahasa Indonesia, bukan hanya karena kata itu sudah ditemukan dalam korpus, melainkan juga karena kata itu ada di dalam bahasa daerah tertentu dan kata itu belum ada di dalam KBBI. Dengan demikian, KBBI akan memuat banyak kata daerah yang belum termuat dengan pertimbangan belum adanya kata bahasa Indonesia yang melambangkan konsep itu. Di samping itu, keterlibatan setiap bahasa daerah dalam memperkaya bahasa Indonesia juga menjadi penting untuk dipertimbangkan. Setakat ini, diperoleh sekitar 1.714 kata yang potensial akan diangkat menjadi lema KBBI. Berikut sebagian contoh kata itu.

**anyang-anyangan** *Jw n* keluaranya air seni terlalu sering, biasanya (tidak selalu) disertai rasa nyeri

**be.ba.li** *Bl n* tarian sakral untuk menyertai upacara di Pura

- be.bang.kit *Bl n* sajen persembahan kepada Dewi Durga dan para Butakala berupa buah-buahan dan kue-kue yg melambangkan isi dunia dan planet
- be.rang.ka *Bjr n* keranjang dr anyaman rotan
- be.wing.kol *Tl n* jimat yg diikatkan di lengan
- bu.bak ka.wah *Jw v* menikahkan anak perempuan pertama untuk pertama kalinya: *acara - yang dihadiri para pejabat kemarin siang berjalan dng meriah, walaupun agak sedikit gerimis*
- bu.jang.ga 3 *Ach* pemuda pembawa perisai
- eng.klek /éngklék/ *Jw v* berjalan dengan satu kaki
- ka.ra.wis.ta *Bl n* alang-alang yg sudah disucikan oleh pendeta untuk diikatkan di kepala
- ke.tut *Bl n* anak keempat dan kelipatannya
- ke.wa.ngen *Bl n* karangan bunga beserta uang kepeng khusus untuk sembahyang: *sembahyang menggunakan -*
- ma.ngen.te /mangénté/ *Mm a* bersikap ramah krn berkepentingan
- ne.ke.ret *Tl n* jimat yg diikatkan dipinggang
- pu.lir *Tl v* memetik cengkih dng mengambil buahnya saja (batang cengkih ditinggalkan)
- sa.ka.i.ba *Tl n* permainan khas Minahasa untuk menyambut tahun baru dng menutup wajah dan berpakaian aneh (tidak lazim) kemudian berjalan mengelilingi kampung
- ta.jong *Bjr n* sarung laki-laki ciri khas Samarinda

Pemasukan kata bahasa daerah menjadi bagian bahasa Indonesia mudah dilakukan secara linguistik, tetapi tidak mudah secara sosiologis. Secara linguistik, kata dapat diambil apabila konsep yang dilambangkan oleh kata itu memang baru bagi bahasa Indonesia dan kata atau istilah yang melambangkannya belum ditemukan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, penetapan kata dari daerah tertentu untuk diambil bukan dari daerah lain - padahal konsep itu ada dalam banyak bahasa daerah - jauh lebih sulit. Aspek sosial dan aspek politik akan menjadi pertimbangan yang kadang-kadang mengalahkan pertimbangan linguistik. Tahun 1988, ketika KBBI diedarkan ke masyarakat pengguna, kritik pun segera muncul ketika pengguna

mendapati bahwa kosakata yang diserap dari bahasa Jawa jauh lebih banyak dari bahasa yang lain. Meskipun secara linguistik benar, yaitu bahwa hanya kata yang muncul dalam korpus yang diangkat menjadi lema dalam kamus, tetapi pertimbangan masalah non-linguistik juga harus ikut menentukan perlu diambil atau tidaknya kata itu. Itu sebabnya penanganan bahasa tidak bisa melepaskan begitu saja hak-hak masyarakat, termasuk di dalamnya hak atas pemertahanan etnis, budaya, dan bahasanya. *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities* menekankan perlunya memperhatikan hak-hak masyarakat dalam penanganan bahasa. Untuk menjadi bahasa yang memadai sebagai bahasa modern, bahasa Indonesia harus mengadopsi konsep-konsep ilmu pengetahuan modern yang umumnya berasal dari asing. Untuk menjadi tali pengikat yang baik untuk bangsa multietnis, bahasa Indonesia harus dikembangkan mewakili kepentingan semua masyarakat Indonesia yang multietnik dan multilingual.

#### 4. MULTIKULTURALISME PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

Betapapun bangsa Indonesia telah sepakat menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa Negara, penggunaan bahasa Indonesia masih tetap diwarnai oleh multikulturalisme di Indonesia. Derajat penguasaan bahasa Indonesia seseorang yang tidak sama disertai dengan tingkat kedwibahasaan yang beragam memungkinkan munculnya variasi yang amat berbeda dengan sistem bahasa Indonesia yang dianggap baku. Varian bahasa Indonesia akibat interferensi bahasa daerah membuktikan adanya pengaruh bahasa daerah yang dibawa penutur dalam derajat yang beragam-ragam. Fakta seperti inilah yang kemudian memicu pemikiran untuk mengadakan pembakuan. Maka selain bahasa Indonesia dialek tertentu, harus ada bahasa Indonesia yang baku, yaitu bahasa Indonesia yang merupakan inti bersama dari berbagai varian bahasa Indonesia. Komunikasi resmi harus menggunakan ragam baku ini agar kendala etnisitas tidak akan menghambat komunikasi antaretnis diperingkat nasional. Akan tetapi, tidak dapat ditoloh bahwa upaya membakukan yang menjadi kepentingan bersama itu kemudian harus

dilakukan dengan meminimalkan ciri multikulturalisme. Dalam batas-batas tertentu ciri etnisitas harus dikorbankan agar struktur baku bahasa Indonesia dapat diperoleh.

Multikulturalisme bagaimanapun tetap akan tambak dalam penggunaan bahasa Indonesia, terutama dalam bahasa lisan. Varian dialektal yang sangat banyak jumlahnya di Indonesia menyebabkan pembakuan bahasa Indonesia lisan menemui kendala. Sampai saat ini, pertanyaan seperti apakah bahasa Indonesia lisan baku itu hanya dapat dijawab dalam bentuk definisi, tanpa rujukan bentuk yang pasti. Batasan bahwa bahasa Indonesia lisan yang baku adalah bahasa Indonesia lisan yang tidak mencerminkan ciri kedaerahan penuturnya mudah diucapkan, tetapi tidak jelas rujukannya definisi itu mengingkarkan bahasa Indonesia dengan ratusan ciri bahasa daerah penutur bahasa Indonesia itu. Oleh karena itu, keragaman budaya penutur yang masih terbawa di dalam tuturan bahasa Indonesia menjadi alat identifikasi kebakuan yang ada.

Interferensi ciri kedaerahan yang berupa ciri leksikal atau struktur sintaksis memang dapat diminimalkan, tetapi diri prosodi yang menyertai struktur itu biasanya sulit dihilangkan. Hal ini akibat bahwa kemahiran bahasa yang dituntut dalam dunia pengajaran bahasa - terutama bahasa kedua - adalah kepandaian alih leksikal atau alih struktur. Leksikal atau struktur itu harus diucapkan seperti apa menjadi target yang tidak diutamakan.

## 5. PENUTUP

Bahasa Indonesia lahir, tumbuh, dan berkembang dengan latar multikulturalisme yang amat kental. Kontras multikulturalisme itu disamarkan pada masa kelahiran, tetapi dinyatakan kembali dalam masa pertumbuhan. Sudut pandang keperluan akan adanya sebuah bahasa sebagai wahana yang menyatukan menjadi latar menyamaran identitas kelompok. Ciri kultur kelompok tertentu cenderung diabaikan untuk membentuk satu komunitas yang lebih luas - nasional - karena kelompok-kelompok itu mempunyai cita-cita bersama. Sudut pandang keperluan akan adanya identitas kelompok dalam wahana komunikasi bersama itu kemudian menuntut agar ciri etnis kelompoknya juga diadopsi menjadi unsur bahasa nasional. Keberimbangan unsur etnis yang menjadi pengembangan bahasa Indonesia, khususnya kosakata,

menjadi perhatian atau semacam criteria seberapa besar peran etnik tertentu dalam mewarnai bahasa Indonesia yang telah menjadi milik bersama itu.

#### Daftar Bacaan

- Alisjahbana, S. Takdir. 1957. *Dari Perdjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Rakjat.
- Alwi, Hasan dan Dendy Sugono. 2003. *Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Progres.
- Collin, James T. 2004. "The History of Indonesian and Future of Malay". Dalam Sukamto, Katharina Enndriati (ed.). 2004. *Menabur Benih Menuai Kasih*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Halim, Amran (ed.). 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Keputusan Kongres Bahasa Indonesia I—V tahun 1938—1988*. Jakarta. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Pedoman Umum Pembentukan Istilah Cetakan ke-4*. 2001. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Pedoman Umum Pembentukan Istilah Edisi ke-3 Cetakan ke-3*. 2006. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Sneddon, James. 2003. *The Indonesian Language: Its History and Role In Modern Society*. Sidney: University of New South Wales Press Ltd.
- Sugiyono. 2008. "Pengembangan Kosakata Bahasa Indonesia dari Kongres ke Kongres. Makalah Kongres Bahasa Indonesia IX, Jakarta, Oktober 2008.
- Sugiyono. 2010. "Tonggak-Tonggak Perkembangan Bahasa Indonesia". *Seminar Internasional Kelahiran Bahasa Indonesia*. Universitas Indonesia, 3 Mei 2010.
- Usman, Zuber. 1970. *Bahasa Persatuan: Kedudukan Sedjarah dan Persoalan-Persoalaninja*. Djakarta: Gunung Agung.

# ✓ KECINTAAN AKAN MULTIBUDAYA LOKAL DAN KEGEMARAN MEMBACA: DUA IDENTITAS BANGSA TAK TERPISAHKAN\*)

(THE LOVE OF LOCAL MULTICULTURES AND AVID READING:  
TWO INSEPARABLY NATIONAL IDENTITIES)

Chuzaimah Dahlan Diem  
chuzaidiem@yahoo.com

**Abstrak:** *Di era globalisasi, kemampuan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang ditandai oleh kepemilikan karakter bangsa dengan identitas diri yang kuat merupakan suatu keharusan bagi suatu bangsa. Di antara tanda-tanda tersebut adalah kepemilikan kegemaran membaca dan kepedulian atau kecintaan akan budaya bangsa sendiri (lokal). Namun, kedua hal ini tampaknya masih sangat rendah di kalangan masyarakat Indonesia bila dibandingkan dengan apa yang terjadi di berbagai negara tetangga, apalagi negara maju. Penyebab permasalahan ini sangat bervariasi, mulai dari diri sendiri sebagai pertanggungjawaban individu sampai dengan kelompok yang diwakili oleh berbagai instansi terkait (pemerintah). Makalah ini mencoba meninjau kedua permasalahan di atas berdasarkan berbagai referensi yang dapat dirujuk dan diakhiri dengan beberapa kondisi yang diharapkan.*

**Kata-kata kunci:** *budaya baca, budaya lokal, identitas bangsa, karakter bangsa, kegemaran membaca, lingkungan pendidikan, pembaca gemar (avid readers)*

## PENDAHULUAN

**"Budaya cerminan bangsa."** Inilah ungkapan yang sering kita dengar sehari-hari, terutama di berbagai seminar baik tentang budaya maupun bahasa sebagai sarana untuk memperkenalkan unsur budaya suatu bangsa tertentu. Implikasi dari ungkapan ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya budaya bagi keberlanjutan suatu bangsa, dan oleh sebab itu perlu diperkenalkan, diteliti atau dikaji, diajarkan terutama kepada generasi penerus, dan didesiminasikan secara ilmiah dalam rangka melestarikannya, agar tidak terjadi benturan kepentingan apakah suatu budaya memang betul-betul milik suatu bangsa tertentu atau bukan. Salah satu cara untuk menghindari benturan tersebut adalah melalui kegiatan literasi, terutama membaca dan menulis. Membaca dilakukan untuk memperoleh informasi tentang budaya, sedangkan menulis digunakan untuk mendesiminasikan budaya kepada generasi penerus sampai menjadi suatu karakter bangsa pada diri masing-masing individu warga.

Mengenal sifat pluralistik suatu populasi bangsa dalam batas geografi tertentu memerlukan pendidikan khusus dalam rangka membangun suatu pemahaman yang utuh tentang budaya, dengan harapan dapat membangun ketertarikan untuk menghargai perbedaan. Kesadaran tentang perlunya ketertarikan dan kepedulian akan perbedaan budaya inilah yang disebut **kecintaan akan budaya**, terutama budaya lokal yang sepanjang sejarah bangsa dan manusia telah berdampak kepada status pendidikan multibudaya seperti saat ini.

Sejak tahun 1960an pendidikan multibudaya telah merupakan suatu konsep pendidikan yang penting. Perhatian yang penekanannya diutamakan di sekolah-sekolah dapat menjadi suatu mekanisme dalam mendorong sensitivitas dan pemahaman di kalangan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Good dan Brophy (1986) menjelaskan bahwa perlunya pendidikan multibudaya dalam rangka "mendorong siswa agar berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan kelas serta berusaha agar interaksi yang terjadi bukan semata-mata merupakan suatu bentuk toleransi ..." (h. 410).

Secara formal, konsep pendidikan multibudaya sebagaimana terdapat dalam berbagai literatur sekarang ini lebih merupakan fenomena yang terjadi di Amerika Serikat yang konsepnya bertujuan mengaitkan kepedulian dan kebutuhan akan berbagai kelompok budaya dan etnis. Namun, pada level internasional, literatur penelitian

memperlihatkan masih kurangnya referensi untuk konsep multibudaya sebagaimana dikembangkan di Amerika Serikat. Vasquez dan Ingle (1982) menyatakan bahwa multibudaya mencakup konsep yang luas; kata budaya mengandung makna pengalaman kolektif, status pekerjaan, warisan etnis, *handicap*, latar belakang bahasa, ras, gender, dan lain-lain. Oleh karena itu, bagi Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri dari banyak suku dan bahasa, dapat ditambahkan bahwa pendidikan multibudaya melibatkan **lingkungan pendidikan** yang menghadirkan suatu tantangan kesempatan yang sama bagi mereka yang berasal dari berbagai etnis, budaya, agama, serta latar belakang pendidikan. Komponen utama dari lingkungan semacam itu merupakan interaksi yang menyenangkan bukan hanya bagi guru tetapi juga bagi anak yang berasal dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, **budaya** itu sendiri dapat didefinisikan secara operasional sebagai 'pola interaksi dan hubungan jaringan sosial dalam suatu masyarakat tertentu,' misalnya masyarakat Sumatera Selatan, Jawa, Sunda, Bugis, Madura, Asmak, dan sebagainya.

Baptiste (1986) menegaskan bahwa pendidikan multibudaya mengacu kepada suatu proses pendidikan yang berhubungan dengan sifat pluralisme budaya. Untuk menginternalisasikan konsep pendidikan multibudaya, setiap warga negara, terutama guru, harus memahami betul definisi tersebut secara lebih luas, sebagaimana diungkapkan oleh Suzuki (1979), seperti berikut:

Pendidikan multibudaya harus membantu warga membangun pemahaman yang lebih baik akan latar belakang mereka sendiri dan juga orang lain yang membentuk suatu masyarakat. Melalui proses ini program pendidikan harus membantu warga menghormati dan menghargai perbedaan budaya, mengatasi sikap-sikap etnosentris dan prejudis dan memahami faktor-faktor sejarah, ekonomi, dan psikologis masyarakat tertentu yang telah menghasilkan berbagai kondisi polarisasi etnis, ketidaksetaraan, dan keterasingan diri yang bersifat kontemporer. Di samping itu, program multibudaya seharusnya dapat membantu mengembangkan kemampuan mereka untuk secara kritis menganalisis dan membuat keputusan-keputusan yang cerdas tentang permasalahan dan isu-isu kehidupan nyata melalui proses demokrasi dan penyelidikan dialogis. Akhirnya, program multibudaya harus dapat membantu mengilhami warga

untuk membangun suatu visi menuju masyarakat yang lebih baik melalui pemerolehan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan sehingga secara berangsur-angsur bergerak menuju kesetaraan dan kebebasan dari kemiskinan, serta ketergantungan kepada orang lain, dan membangun identitas diri yang penuh makna bagi seluruh masyarakat (hal: 47-48).

Karena kita sedang berada di tepi era pasar bebas, maka kita memerlukan fondasi budaya, terutama budaya lokal, yang solid agar dapat berinteraksi dengan masyarakat dunia tanpa merendahkan martabat bangsa sendiri. *'Tak kenal, maka tak bangga,'* Melalui kegiatan dan keterampilan membaca dan kemudian menulis (literasi), seorang anak bangsa diharapkan dapat terlebih dahulu mengenal, memahami, dan mencintai budayanya sendiri untuk kemudian secara berangsur-angsur memahami budaya global (cerdas budaya) demi kemaslahatan dunia. Ini pulalah mungkin yang disebut dengan menuju *'politik Identitas: lokalitas berkonteks global.'*

## KONDISI KECERDASAN BUDAYA DAN LITERASI BANGSA SAAT INI

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah mempercepat perubahan nilai-nilai sosial yang membawa dampak positif seperti bertambahnya kecepatan dan peningkatan tingkat berpikir dan perubahan pola hidup yang lebih efisien dan pragmatis. Dampak negatifnya adalah kebanyakan kita belum dapat menyikapi kederaasan teknologi informasi dan komunikasi ini secara selektif dan bijaksana. Konsekuensinya adalah terjadinya masa transisi dalam kehidupan berbangsa dan berbudaya sehingga berdampak pada kegagapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) di kalangan anak bangsa ini terutama bagi yang masih berada di usia sekolah. Di Sumatera Selatan sendiri, misalnya, hal ini tercermin dari rendahnya **kompetensi lulusan** yang rata-rata hanya 59,71 berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (Diem, 2009).

Kondisi demikian, diasumsikan pertama-tama bermuara pada kemampuan **literasi** (terutama membaca dan menulis) yang masih rendah. Padahal, untuk menjadi orang yang visioner yang berwawasan global, seorang anak harus menjadi pembaca gemar (*avid reader*)

(Sanacore, 1991). Dikatakan bahwa secara keseluruhan kegemaran membaca merupakan prasyarat keberhasilan seseorang dalam mengikuti pendidikan, termasuk pendidikan sains, matematika, dan seni. Namun, fakta menunjukkan lain. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) di Provinsi Sumatera Selatan, yang hanya 71,1, sehingga berada pada peringkat ke 13 dari 33 provinsi di Indonesia telah merupakan hambatan untuk menciptakan warga yang gemar membaca. Apalagi masih ada juga warga yang buta aksara. Kebutaaksaraan (*illiteracy*) penduduk usia sekolah di Sumatera Selatan ternyata masih cukup banyak, yaitu 154.032 orang atau 3,16 % (Depdiknas, 2008).

Di samping itu, baik di kawasan Asia Tenggara maupun dunia kemampuan membaca siswa Indonesia masih berada pada ranking terendah, yaitu dengan skor 51,7 dibandingkan dengan Filipina 52,6, Thailand, 65,1, Singapore 70,4 dan Hongkong 75,5 (Elley, 1992; Baca juga penelitian *IRA PISA Task Force* dalam Topping et al. 2003). Selanjutnya, data UNDP juga menunjukkan bahwa kemampuan literasi orang Indonesia dewasa pun hanya 65,5%, sementara Malaysia sudah mencapai 86,4%, dan mereka yang berasal dari negara-negara maju, seperti Australia, Jepang, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat pada umumnya telah mencapai 99,0%. Selanjutnya ditinjau dari segi profisiensi, tingkat kemampuan literasi bangsa Indonesia juga terendah kedua dari 40 negara yang diteliti. Berdasarkan kelima tingkatan profisiensi membaca, 69% siswa yang berumur 15 tahun berada pada level 1 atau di bawahnya, 25% berada pada level 2, 6% berada pada level 3, dan tidak ada seorangpun yang berada pada level 4 atau 5 (UNDP Human Development Report, 2000).

Penguasaan bidang matematika dan fisika yang merupakan dasar bagi pengembangan teknologi pun baru memperoleh nilai rata-rata 4 sampai 5 dalam skala 0 sampai 10 sehingga menduduki peringkat ke-33 dari 48 negara yang diteliti (Depdikbud, 1998). Untuk tingkat SLTP, kemampuan matematika dan IPA secara berturut-turut berada pada urutan ke 39 dan 40 dari 42 negara peserta (PROPENAS 2000-2004).

Selanjutnya, karena cepatnya perkembangan ipteks dan informasi dunia, bangsa kita terposisikan sebagai keranjang sampah sehingga kemampuan untuk memilah dan mengolah data, serta membuat refleksi secara sistematis dan baik terhadap informasi yang diperoleh semakin menurun (Koesoema, 2004). Ini berarti bahwa masyarakat kita belum dapat merespon perkembangan ipteks

sebagaimana mestinya. Sementara budaya literasi bangsa kita masih belum begitu berkembang, masyarakat kita sudah terlanjur diterjang keganasan media elektronik yang memandulkan kebiasaan membaca dan menulis. Akibatnya, ada kekhawatiran di kalangan sebagian pendidik, bahwa di masa mendatang nanti, bangsa kita menjadi kurang melek secara fungsional (*functionally illiterate*). Beberapa gejala ke arah itu terlihat pada beberapa indikator berikut.

Pada tahun 2000 kebiasaan menonton televisi masyarakat kita adalah sebesar 87,97%. Sebaliknya minat baca koran dan majalah hanya 17,47% di tahun yang sama. Apalagi membaca wacana ilmiah dan atau yang berbahasa Inggris. Pada tahun 2001, Depdiknas Provinsi Sumsel mencatat bahwa prestasi siswa SLTP untuk pelajaran bahasa Inggris hanya antara 26 dan 34 dari skala 0 — 100.

Selanjutnya, penelitian Diem (2001), Diem, et al. (2003), dan Diem (2004) pun menunjukkan rendahnya kemampuan membaca bahasa Inggris siswa SMA yang hanya 47% pada tahun 2001, dan 53,34% pada tahun 2003. Sedangkan untuk siswa SD kemampuannya adalah 44,89% dan SMP hanya 44,73% di tahun 2004.

Khusus untuk kesiapan mengakses ICT global, Indonesia berada di bawah Thailand dan Filipina (Utoyo 2004). Mungkin salah satu penyebabnya berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat kita. Apalagi bila dikaitkan dengan kurang tersedianya infrastruktur (seperti perpustakaan yang terhubung) di berbagai kabupaten kota yang menyebabkan biaya mengakses informasi menjadi mahal, dan akhirnya menempatkan penggunaan ICT bangsa kita menjadi semakin rendah (kurang dari 1% penduduk Indonesia).

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan sementara bahwa penguasaan iptèks bangsa Indonesia masih belum dapat dijadikan ciri bangsa yang berkarakter dan mampu bersaing. Menurut Soetomo (2003) akar permasalahannya terletak pada belum dimilikinya budaya baca dan belajar yang memadai.

### **Penyebab Rendahnya Kecerdasan Literasi Bangsa Kita**

Rendahnya kemampuan literasi bangsa mungkin disebabkan oleh pertama *diri sendiri* sebagai pertanggungjawaban individu sebagai warga negara yang berbudaya dan kedua institusi *pemerintah* sebagai penyedia kemudahan bagi warganya. Sebagai individu, masyarakat kita masih kurang gemar membaca dan menulis. Andai pun mereka membaca, mereka baru tergolong pembaca pasif. Mereka melakukannya karena terpaksa. Kadang-kadang mereka lebih baik

mengobrol atau mengerjakan pekerjaan lain dan bukan membaca meskipun mereka memiliki waktu luang untuk itu. Menurut Alwasilah (2003) sikap seperti itu menandakan minat untuk membaca masih rendah apalagi menulis karena untuk menulis seseorang perlu membaca.

Selanjutnya, pemerintah pun tak kalah perannya dalam mencerdaskan literasi dan sekaligus budaya bangsa. Seperti diketahui, informasi tentang budaya suatu bangsa pada umumnya terdapat dalam perpustakaan, gedung arsip, dan atau museum nasional suatu negara karena setiap karya baik cetak maupun non-cetak wajib disimpan di perpustakaan ataupun di tempat-tempat khusus sesuai dengan bentuk dan jenisnya menurut aturan yang berlaku. Dengan demikian, apabila warga ingin mengakses karya-karya tersebut, ia dapat dengan mudah memperolehnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kedua hal ini saling terkait.

Kegemaran membaca juga didorong oleh keberadaan infrastruktur berupa perpustakaan. Oleh karena itu, rendahnya kecerdasan budaya seperti yang telah didefinisikan sebelumnya, adalah akibat dari ketidakketersediaan bahan bacaan yang berhubungan dengan topik yang relevan yang diminati. Kedua hal inilah yang merupakan dua faktor utama yang membuat kemampuan anak Indonesia untuk bersaing berada pada tingkatan terendah di Asia Timur. Hal ini tentu merupakan kondisi yang **sangat mencemaskan** bagi bangsa Indonesia karena dikatakan bahwa perbedaan antara negara-negara yang skor literasinya tinggi dan yang rendah tersebut erat kaitannya dengan keberadaan perpustakaan yang besar dan frekuensi peminjaman bukunya yang tinggi (Froese 1997). Lebih jauh lagi dikatakan bahwa, untuk melihat apakah suatu masyarakat berbudaya atau kurang berbudaya, dapat dilihat dari keberadaan perpustakaannya.

Sebagai pendukung berbagai temuan penelitian terdahulu, berikut adalah hasil beberapa survei singkat tentang berbagai kemungkinan yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kecerdasan literasi dan kecerdasan budaya masyarakat Sumatera Selatan.

- (1) Kebanyakan warga (di Sumatera Selatan) mengaku bahwa mereka adalah pembaca pasif dan enggan (Survei terhadap 118 guru di Sumsel yang dilakukan penulis tanggal 9 Mei 2009). Dapat diinformasikan bahwa pada umumnya mereka merupakan tipe pembaca sebagai berikut. *Pertama*, 40,4% masyarakat Sumsel adalah pembaca **pasif**; mereka membaca hanya karena terpaksa, misalnya kalau sedang mengikuti pelatihan dan atau akan ujian

saja. *Kedua*, 29,3% mereka adalah pembaca **enggan**. Mereka yang tergolong pembaca tipe ini adalah mereka yang enggan membaca meskipun mereka pandai atau terampil. Sebaliknya, mereka lebih baik mengerjakan pekerjaan lain daripada membaca. Yang *terakhir* adalah pembaca **gemar**, yaitu tipe pembaca yang akan selalu membaca setiap mereka memiliki waktu luang. Mereka akan membaca apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tiga puluh koma tiga persen (30,3%) masyarakat Sumsel termasuk tipe pembaca ini.

- (2) Indonesia hanya menerbitkan 6000 buku/tahun sementara Malaysia 10.000, Jepang 60.000, dan negara-negara maju, seperti Negara Amerika Serikat 100.000 judul buku / tahun.
- (3) Jumlah koleksi perpustakaan provinsi pada umumnya masih relatif sedikit dan *out-of-date*. Di Sumatera Selatan sendiri jumlah koleksi hanya sebanyak 93.014 judul dengan 299.900 eksemplar (Data Badan Perpustakaan Provinsi Sumsel, Des. 2009).

Ketiga poin di atas telah memberi andil kepada sikap masyarakat terhadap pemanfaatan Perpustakaan sebagai tempat menyimpan budaya seluruh umat manusia. Mereka cenderung 'cuek' dengan tanpa merasa bahwa itu merupakan tanggungjawabnya sebagai warga negara yang baik. Hal ini terlihat dari frekuensi kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum yang hanya rata-rata 300 orang per hari (Data Badan Perpustakaan Provinsi Sumsel, Desember 2009).

### **Akreditasi Sekolah Cerminan Mutu Budaya Bangsa**

Kalau di atas disebutkan bahwa tingginya tingkat kecerdasan budaya suatu bangsa tercermin dari tingkat literasinya yang ditandai dengan minat dan kemampuan membaca, jumlah publikasi, dan keberadaan perpustakaan, berikut ini akan ditinjau apakah akreditasi sekolah juga merupakan cerminan budaya masyarakat kita.

Pada tahun yang lalu, terdapat 485 sekolah/madrasah di Sumatera Selatan yang mengikuti proses akreditasi yang dilakukan oleh BAP-S/M Provinsi Sumatera Selatan. Hasilnya menunjukkan, sebagai berikut (Diem 2009a).

- Hanya 5 (lima) sekolah dan 4 (empat) program keahlian yang memperoleh nilai akreditasi A;
- 131 sekolah/madrasah dan 22 program keahlian memperoleh nilai akreditasi B;
- 300 sekolah/madrasah serta 3 program keahlian yang mendapat nilai akreditasi C; dan

- 22 sekolah/madrasah tidak terakreditasi.

Hal ini memperlihatkan bahwa sekolah/madrasah yang benar-benar memuaskan melayani masyarakat masih relatif sedikit dan sebagian besar berada pada kategori **cukup** memenuhi syarat dengan nilai mean total adalah 66.76 (kategori C). Tabel 1 menunjukkan peringkat mean yang diperoleh sekolah/madrasah berdasarkan komponen Standar Nasional Pendidikan dengan kriteria pemeringkatan A = 86 – 100, B = 71 – 85, C = 56 – 70, dan tidak terakreditasi = < 56.

Yang memperihatinkan adalah bahwa hampir semua kebutuhan operasional sekolah menjadi beban negara dengan bantuan pembiayaan berupa Biaya Operasional Sekolah (BOS). Ini terbukti dari komponen standar **pendanaan** yang menduduki peringkat ke-1 sedangkan komponen **kompetensi lulusan** menempati peringkat terbawah.

**Tabel 1: Peringkat Nilai Mean Hasil Akreditasi  
Sekolah: TK-RA, SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA, SMK-MAK Tahun 2009  
Berdasarkan Masing-Masing Standar Nasional Pendidikan**

No	Komponen Standar Nasional Pendidikan	Urunan masing masing standar (%)	Urunan setelah masing-masing standar ditambahkan
1	Standar Isi	37.8	37.8
2	Standar Proses	03.6	41.4
3	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	01.7	43.1
4	Standar Pembiayaan	00.9	44.0

*Sumber: BAP – S/M Provinsi Sumsel yang dianalisis dan dipresentasikan oleh Chuzaimah Dahlan Diem pada Seminar Hasil Akreditasi BAP-S/M Sumsel, tanggal 15 Oktober 2009.*

Selanjutnya, setelah seluruh komponen SNP tersebut dikorelasikan satu sama lain dan kemudian diregresikan untuk melihat kontribusi masing-masing komponen terhadap khususnya kompetensi lulusan, maka hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Dari Tabel 2 diketahui bahwa ternyata hanya 4 (empat) komponen yang berhasil memberikan urunan terhadap *Kompetensi Lulusan* para

siswa, dengan kontribusinya hanya sebesar 44%. Selebihnya, 56% adalah faktor lain yang berdasarkan data yang dianalisis ini tak dapat terdeteksi. Urutan terbesar berasal dari Standar Isi (37,8%), diikuti dengan Standar Proses (03,6%), kemudian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (01,7%), dan akhirnya Standar Pembiayaan (0,09%).

**Tabel 2**  
**Hasil Urutan Beberapa Komponen Standar Pendidikan Terhadap Kompetensi Lulusan**

PERINGKAT KE-	KOMPONEN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	MEAN	NILAI MUTU
1	Pembiayaan	74.83	B
2	Penilaian	74.57	B
3	Proses	67.02	C
4	Pengelolaan	66.74	C
5	Isi	65.99	C
6	Tenaga Pendidik dan Kependidikan	64.37	C
7	Sarana dan Prasarana	63.38	C
8	Kompetensi Lulusan	59.71	C
	TOTAL MEAN	66.76	C

Sumber: Analisis yang dilakukan Chuzaimah D. Diem (2009).

Kenyataan ini menarik untuk didiskusikan. Ternyata dana yang besar atau cukup tidak menjamin tingginya kompetensi lulusan siswa. Juga menyedihkan bahwa beberapa komponen standar, seperti penilaian, pengelolaan, dan sarana prasarana tidak berkontribusi sama sekali. Khusus komponen yang terakhir ini, mungkin harus menjadi perhatian kita karena sangat erat kaitannya dengan topik yang dibahas dalam makalah ini di samping banyak sudah penelitian di tingkat dunia yang mengatakan bahwa terdapat korelasi yang positif antara keberadaan sarana pendidikan, terutama perpustakaan dan keberhasilan/prestasi siswa. Misalnya, *Ohio Educational Library Media Association* (2004) menemukan bahwa perpustakaan yang pelayanannya baik dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang prestasinya lebih baik." Hasil penelitian Newmann (2001) menunjukkan bahwa "perpustakaan berfungsi sebagai sumber utama bagi masyarakat kurang mampu ..." termasuk yang berada di pedesaan dan hasil penelitian Diem (2009) pun jelas memperlihatkan bahwa kunjungan ke

perpustakaan berdampak positif dan signifikan terhadap prestasi membaca siswa, yaitu sebesar 23%.

Di samping itu, yang tak kalah menariknya di sini adalah kecilnya urunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (1,7%), yang termasuk di dalamnya adalah guru, pustakawan, laboran, teknisi komputer, dan sejenisnya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga pendidikan seharusnya merupakan kunci utama bagi kelulusan siswa karena selain guru, pustakawan beserta perpustakaan merupakan unit vital dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi anak baik di sekolah maupun di masyarakat melalui kegiatan literasinya. Dengan kata lain, apabila keterakreditasi sekolah baik, sebagaimana ditandai oleh kedelapan komponen standar nasional pendidikan, maka baik pula kecerdasan budaya para warga pun turut baik.

## **KONDISI YANG DIHARAPKAN UNTUK MASA MENDATANG**

Terkait dengan permasalahan di atas, berbagai **peluang** mungkin dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegemaran membaca dan sekaligus menjadi pemicu penguasaan kemampuan dan atau kecintaan terhadap budaya sendiri sehingga terkristalisasi sebagai karakter bangsa di masa mendatang. Meskipun demikian setiap peluang selalu diiringi oleh berbagai **kendala**; untuk itu harus diantisipasi baik oleh guru, orangtua, dan terutama pemerintah.

### ***Peluang***

- 1) Jumlah anak-anak usia sekolah yang cukup banyak (37,4% atau  $\pm 75$  juta jiwa — dari jumlah penduduk) dapat merupakan potensi yang luar biasa untuk menumbuhkan politik mempertahankan identitas dalam pembangunan nasional;
- 2) Keberadaan ICT merupakan peluang bagi bangsa ini untuk memperoleh bahan bacaan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi sebagai prasyarat penguasaan bidang lain termasuk bidang budaya;
- 3) Tantangan era global yang kadang-kadang datang secara bersamaan akan memberikan peluang bagi bangsa ini untuk menumbuhkembangkan budaya kompetisi; dan

- 4) Keberadaan Sumatera Selatan sebagai provinsi masa depan merupakan peluang bagi anak-anak untuk ikut berkisah di kawasan Asia Pasifik.

### **Kendala**

- 1) Pendidikan masih belum merata, sehingga kesempatan bagi sebagian besar anak Indonesia yang pada umumnya tinggal di daerah terpencil untuk mengenal apalagi memahami pentingnya budaya sendiri menjadi terhalang. Di Sumatera Selatan terdapat sangat banyak sekolah mulai dari Taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah atas. Namun yang memenuhi syarat kelayakan minimal SNP masih relatif rendah. (Lihat Laporan BAP Provinsi Sumatra Selatan 2009).
- 2) Sarana dan prasarana pendidikan di Sumatera Selatan secara umum belum sepenuhnya mendukung penumbuhkembangan kecintaan untuk membaca dan budaya sendiri. Keberadaannya baru sekitar 63,38% (Diem 2009) dengan perpustakaan yang masih sangat jauh ketinggalan. Di tingkat SMA baru sekitar 30% perpustakaan yang memenuhi syarat minimal kelayakan berdasarkan Pedoman Perpustakaan Sekolah.
- 3) ICT yang dikembangkan oleh swasta lebih mementingkan unsur bisnisnya dan mengabaikan unsur pelestarian budaya dan peningkatan kegemaran membaca;
- 4) Belum dimanfaatkannya kemajuan sistem informasi secara maksimal di lembaga pemerintah maupun swasta, terutama sekolah, mengakibatkan terhambatnya komunikasi antarlembaga;
- 5) Kebijakan pengembangan sekolah, biasanya diputuskan berdasarkan pertimbangan politik, bukan kebutuhan teknis.
- 6) Masih kentalnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Upaya**

Untuk membantu anak menjadi pembaca gemar dan penulis mandiri, perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan keterampilan iterasi secara bertahap (*Scaffolding Literacy Development*). Di samping itu, perlu adanya pendidikan multibudaya baik di sekolah maupun di masyarakat agar masyarakat kita mengenal, memahami, dan mencintai budayanya sendiri sebelum mengenal dan atau memahami budaya global. Pemerintah provinsi harus menjadi pelopor gerakan gemar

membaca dan cinta budaya lokal dengan cara terlebih dahulu membangun perpustakaan umum digital di Provinsi sebagai perpustakaan induk dan terhubung ke berbagai kabupaten/kota. Khusus untuk wilayah kecamatan, pengembangan perpustakaan dan minat baca merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, begitulah seterusnya sampai saatnya nanti seluruh perpustakaan sekolah terhubung dengan perpustakaan yang terdekat dan perpustakaan provinsi. Untuk itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini pustakawan, juga secara berangsur-angsur harus ditatar dan dikirim untuk meningkatkan keterampilannya di samping menyiapkan calon pustakawan baru yang direkrut melalui seleksi yang ketat dengan mengutamakan kepemilikan kegemaran membaca dan dedikasi yang tinggi melalui pendidikan di bidang ilmu perpustakaan dan literasi baik di luar maupun dalam negeri.

## **SIMPULAN**

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan kecintaan akan budaya, termasuk budaya lokal, tak dapat dipisahkan dari kegiatan gemar membaca. Kedua aspek ini merupakan dua hal yang merupakan identitas bangsa yang berkarakter dan bermartabat yang perlu dimiliki oleh setiap warga agar pada saatnya mampu bersaing di era global. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, seperti perpustakaan yang berbasis ICT, serta komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, terutama pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan terdepan.

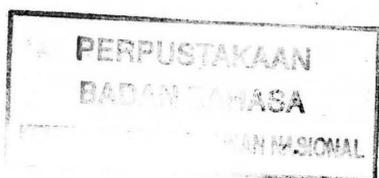
## **REFERENSI**

- Alwasilah, A. Chaedar. (2003). Membangun bangsa yang mampu menulis. Makalah yang disampaikan pada *Seminar Pendidikan dan Pengajaran Bahasa dan Sastra Ke-4*, yang Diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Tanggal 25 Mei 2003, di Palembang, Sumatra Selatan.
- BAN Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Sumatera Selatan. (2009). *Direktori Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2005—2009*. Palembang: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, BAP – S/M Sumsel.

- Baptiste, H. P. Jr. (1986). Multicultural education and urban schools from a sociohistorical perspective: Internalizing multiculturalism. *Journal of Educational Equity and Leadership*, 6, 295-312.
- Diem, Chuzaimah Dahlan. (2009).** *Akreditasi sekolah cerminan mutu pendidikan*. Makalah disampaikan pada Seminar Akreditasi BAP-S/M Provinsi Sumatra Selatan, Tanggal 15 Oktober 2009 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan, di Palembang.
- Diem, Chuzaimah Dahlan; Ihsan, D.; Purnomo, M. E.; & Indrawati, Sri. (2003). Pengembangan model program membaca untuk meningkatkan kemampuan membaca dan keterampilan belajar. *Linguistik Indonesia*, 21(2), 203-227.
- Diem, Chuzaimah Dahlan. (2001). Pengaruh penguasaan *meaningful vocabulary* dan *study skills* terhadap *reading comprehension*. *Forum Kependidikan*, 20(2), 85-98.
- Diem, Chuzaimah Dahlan. (2000). Kebiasaan membaca dan kemampuan berbahasa Inggris guru SMU se-provinsi Sumatera Selatan. *Forum Pendidikan*, 25(03), 257-268.
- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan. (2008). *Data pokok pendidikan tahun 2007/2008 Provinsi Sumatra Selatan*. Palembang: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan.
- Elley, W. B. (1992) How in the world do students read? The Hague: International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
- Froese, V. (1997) The relationship of school materials and resources to reading literacy: An international perspective. In L. Lighthall dan K. Haycock (Eds.) *Information rich but knowledge poor? Emerging issues for schools and libraries worldwide* (pp. 283-303). Seattle, WA: International Association of School Librarianship.
- Good, T.L. & Brophy, J. E. (1986). *Educational psychology: A realistic approach*. (3<sup>rd</sup> ed.). New York, NY: Longman.
- Koesoema, A. Doni. (2004). Pendidikan manusia versus kebutuhan pasar. Dalam Tony D. Widiastono (Ed.), *Pendidikan manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sanacore, J. (1991). Expository and narrative text: Balancing young children's reading experiences. *Childhood Education*, 67, 211-214.

- Soetomo, S. (2003). Membangun bangsa 100 tahun mendatang melalui budaya baca dan belajar. <http://www.watershedpress.com/100tahun.html>. Diakses 17 Maret 2006.
- Suzuki, B. H. (1979). *Multicultural education: What's it all about? Integrated Education*, 17, 47-48.
- Topping, K. et al. 2003. *Policy and practice implications of the program for international student assessment (PISA) 2000: Report of the IRA PISA Task Force*. (Online). <http://slj.reviewsnews.com/index.asp?layout=article&articleid=CA318993&publication=slj>
- UNDP. (2000). *UNDP human development report*. Jakarta: UNDP.
- Utoyo, Indra M. (2004). Enterprise mobility: Lebih sekedar solusi akses. *E-Bizz Asia*, 2(20), 86-87.
- Vasquez, A. G. & Ingle, H. T. (1982). Multicultural and minority education. In *Encyclopedia of Educational Research* (5<sup>th</sup> ed., No. 3, pp. 1267 – 1269). New York, NY: Free Press.

<sup>7)</sup> Disampaikan pada Seminar Internasional dengan Tema: “**Politik Identitas: Lokalitas Berkonteks Global dalam Wacana Multikultural**” yang Diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Tanggal 02 Juni 2010, di Palembang



# Dari Kesatuan ke Kebersamaan Identitas Nasional dalam Masyarakat Indonesia yang Plural

*Prof. Dr. Faruk HT*  
UNiversitas Gadjah Mada

## 1. Pengantar

Satu waktu, mungkin sekitar 5—6 tahun yang lalu, saya berkesempatan mengunjungi sebuah kabupaten yang terletak di pedalaman Kalimantan Timur. Dengan menumpang bis air/sungai dari kota propinsi Samarinda dibutuhkan waktu 9—10 jam untuk dapat mencapai daerah tersebut. Sebagai orang yang lahir dan dewasa di Kalimantan Selatan, perjalanan menyusuri sungai dalam waktu yang relatif lama, bukan hal yang terlalu mengherankan saya. Begitu juga segala cerita mengenai binatang-binatang sungai ataupun hutan yang misterius dan gaib yang saya dengar di sepanjang perjalanan itu. Tapi, tetap ada yang menakjubkan saya, yaitu sebuah cerita yang justru bersangkutan dengan tata kehidupan masyarakat modern, tepatnya cerita tentang tata kehidupan politik lokal yang hidup dan berlaku di wilayah tersebut. Sebagaimana yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia lainnya, di wilayah itu berlaku juga tata politik demokrasi modern dengan partai-partai, Pemilu, dan lembaga-lembaga perwakilan rakyatnya. Akan tetapi, bila ditanya mengenai pemenang Pemilu, mengenai mayoritas penguasa kursi di DPRD, orang cenderung tidak menjawabnya dengan menunjuk pada partai (-partai) tertentu, melainkan para kerabat tertentu. Sebagai misal, yang berkuasa sekarang di lembaga perwakilan rakyat tersebut adalah kerabat A dan kerabat ini berkuasa secara lintas partai, masuk ke berbagai partai politik. Kecenderungan demikian jelas memperlihatkan bagaimana institusi politik modern hanya berlaku dan hidup secara formal, sedangkan substansinya adalah institusi masyarakat tradisional yang berbasis ikatan-ikatan kerabat (tribal). Apa yang dinamakan KKN, yang pemberantasannya menjadi target gerakan reformasi mahasiswa dulu, termasuk dalam kecenderungan yang demikian. Terdapat kesenjangan dan bahkan pertentangan antara institusi negara-bangsa yang formal dan bersifat nasional dengan institusi sosial yang berbasis pada budaya-budaya

etnik tradisional, antara dunia sistem dengan dunia penghayatan sehingga seakan menggaungkan kembali konsep dualisme ekonomi/budaya dan konsep masyarakat plural sebagaimana yang dikemukakan Burger dan Furnivall sejak zaman kolonial dulu.

Sejak masih disebut sebagai Hindia-Belanda, artinya masih merupakan negara kolonial Belanda, Indonesia memang hidup dalam tata kehidupan yang dualistik. Entah dengan motivasi untuk memecah belah, entah untuk kepentingan pragmatis dan eksploitatif, ataupun sekedar untuk mempertahankan eksklusivitas, pemerintah kolonial Belanda membangun sebuah tata pemerintahan kolonial dengan tidak hanya tidak menghapuskan tata pemerintahan lokal, melainkan bahkan memanfaatkannya. Dan, karena imajinasi kebangsaan Indonesia tidak sekedar dimungkinkan oleh tumbuh dan berkembangnya kapitalisme cetak sebagaimana yang dikemukakan Anderson, melainkan juga dimungkinkan oleh tumbuh dan berkembangnya sistem birokrasi pemerintahan kolonial tersebut, tidaklah mengherankan jika nasionalisme itu tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan kesadaran akan dan juga usaha-usaha untuk melestarikan budaya-budaya lokal yang begitu banyak dan beraneka di seluruh nusantara. Ketika berbagai organisasi pemuda dari berbagai latar belakang etnik menghimpun diri untuk menyatakan paham dan ikrar kebangsaan mereka, berbagai organisasi yang masing-masing menggunakan nama daerah atau asal etniknya itu sekaligus menampilkan, menegaskan, dan menumbuhkan kesadaran akan adanya pluralitas budaya yang ada di dalam dan bersama gagasan mengenai kebangsaan di atas. Karenanya, tidak mengherankan jika sesudah kemerdekaan, para pendiri bangsa Indonesia tersebut mencantumkan kata "Bhineka Tunggal Ika" pada lambang negaranya.

Namun, tidaklah mudah untuk menempatkan nasionalisme itu dalam konteks masyarakat etnis nusantara yang plural di atas, atau sebaliknya. Sukarno, dengan antara lain bantuan Muhammad Jamin, cenderung menjadikan Indonesia sebagai esensi dari pluralitas masyarakat dan kebudayaan yang beraneka di atas dengan, antara lain, mencari unsur-unsur sosial dan kebudayaan yang sama atau terbagi di antara masyarakat dan kebudayaan etnis yang satu dengan yang lain, atau dengan menegaskan dan mereproduksi gagasan-gagasan mengenai Timur yang dianggap menjadi ciri-ciri yang sama di antara berbagai masyarakat itu, tidak hanya pada lingkup nusantara,

melainkan bahkan Asia dan Afrika atau segala yang non-Barat. Gagasan Ki Hadjar Dewantara mengenai kebudayaan Indonesia sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah juga termasuk dalam kecenderungan yang demikian. Semuanya bermuara pada konsep mengenai negara-bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan. Halnya berbeda dari pandangan Mohamad Hatta. Meskipun menyatakan diri sebagai nasionalis dengan partai yang berideologi nasionalisme, Mohamad Hatta mempunyai konsep yang berbeda dari Sukarno. Bagi Hatta, masyarakat dan kebudayaan kebangsaan Indonesia bukanlah esensi atau inti atau puncak dari aneka masyarakat dan kebudayaan daerah, melainkan sebagai strategi atau alat belaka bagi bangkitnya kedaulatan rakyat yang pada kenyataannya merupakan kumpulan masyarakat-masyarakat dan kebudayaan-kebudayaan etnis yang beraneka. Menurutnyanya, kebangsaan merupakan satu-satunya alat yang efektif untuk melawan imperialisme, kebangsaan hanya digunakan dalam hubungan antara rakyat Indonesia yang plural itu dengan dunia luar atau bangsa-bangsa lain. Karena itu, negara-bangsa yang ia tawarkan bukanlah negara kesatuan Indonesia, melainkan Indonesia serikat. Dalam Indonesia serikat ini masyarakat dan kebudayaan daerah mempunyai otonomi untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Meskipun kemudian gagasan mengenai negara-kesatuan, dengan "keikaan"-nya, menjadi gagasan yang resmi dan sekaligus dominan, dualisme yang sudah dikemukakan di atas ternyata belum juga berakhir. Begitu Orde Baru tumbang, gerakan reformasi mahasiswa membuka jalan bagi otonomi daerah yang lebih luas, segera tampak betapa ringkihnya gagasan mengenai kesatuan tersebut. Kecenderungan demikian semakin kuat seiring dengan semakin kuatnya dua arus ideologi global yang baru yang memberikan legitimasi terhadap lokalisme dan multikulturalisme.

## **2. Konteks dan Efek Historis, Kultural, dan Politik dari Konsep Kesatuan**

Dibandingkan dengan gagasan mengenai perserikatan dari Mohamad Hatta, gagasan mengenai kesatuan merupakan gagasan yang bisa dikatakan menguasai panggung sejarah Indonesia, setidaknya sampai dengan berakhirnya masa Orde Baru. Kecenderungan demikian dimungkinkan, terutama, oleh konteks historis dari kelahiran dan perkembangan nasionalisme Indonesia sendiri, yaitu konfrontasi langsung paham tersebut dengan kekuatan politik, ekonomi, dan

kebudayaan yang berasal dari luar, kekuatan pemerintah kolonial Belanda. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hatta sendiri, dalam interaksi dengan dunia luar, yang muncul ke depan adalah kebangsaan Indonesia yang melampaui batas-batas masyarakat dan kebudayaan daerah yang ada di dalamnya. Dan, konfrontasi langsung dengan kekuatan luar yang semacam itu tidak hanya terjadi sampai pada masa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, melainkan setidaknya sampai dengan dicapainya kesepakatan dalam Perjanjian Gianti di tahun 1949. Setelah kesepakatan tersebut pun, konfrontasi dengan kekuatan luar itu terus-menerus direproduksi oleh Sukarno melalui gagasannya mengenai anti-Nekolim. Pada masa Orde Baru reproduksi konfrontasi yang demikian tetap berlanjut dengan intensitas yang tidak kalah tingginya. Hanya saja, kalau Sukarno atau Orde Lama menempatkan kekuatan asing itu sebagai negara-negara dan bangsa-bangsa penganut kapitalisme, Orde Baru, di bawah pimpinan Suharto, menempatkannya sebagai negara-negara, bangsa-bangsa, dan bahkan agen-agen lokal dari komunisme.

Selain itu, gagasan mengenai kesatuan juga merupakan gagasan dengan akar kultural dan/atau maknawi yang sangat kuat. Tradisi keagamaan penganut monotheisme, baik agama Islam yang sudah melembaga di Indonesia, maupun agama Kristen yang menjadi endapan dari gagasan-gagasan filosofis Eropa, terus-menerus menyebarkan wacana yang menanamkan gagasan yang demikian. Dalam tradisi ini seluruh isi alam semesta, dengan keanekaan isinya yang luar biasa, dikembalikan hanya ke dalam satu faktor, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yang sekaligus menjadi pusat konsistensi dan koherensi keseluruhan isi alam itu. Modernisme, bermula dari berbagai wacana ilmu pengetahuan modern, menggantikan gagasan mengenai Tuhan tersebut dengan faktor tunggal yang baru, yaitu apa yang mereka sebut dengan hukum alam. Masih dalam lingkup modernisme ini dapat ditemukan serangkaian wacana ilmiah maupun filosofis yang misalnya menempatkan sejarah umat manusia yang beraneka menjadi sebuah rangkaian perkembangan yang linear, yang bermula dari masyarakat dan kebudayaan pra-modern menuju masyarakat modern sebagai puncak dari perkembangan tersebut. Modernisme kesenian juga merayakan gagasan mengenai kesatuan ini sebagai tolok ukur dari estetika. Kesatuan, dengan demikian, tidak hanya merupakan sesuatu yang rasional, sah secara akademik maupun filosofis, melainkan bahkan menjadi sesuatu yang estetik

dan bahkan penuh dengan aura yang nyaris sakral. Dalam konteks kebudayaan Indonesia sendiri, yaitu kebudayaan yang berbasis kelisanan, komunitas tribal yang sederhana, yang terbangun dari hubungan yang nyaris langsung atau bersifat “tatap-muka”, gagasan mengenai kesatuan yang demikian menjadi lebih mudah diterima karena persoalan-persoalan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang muncul dalam relasi-relasi kolonial yang kompleks tidak lagi dapat dibaca dan ditempatkan dalam peta kognitif tradisional yang tersedia.

Dalam berbagai konteks di atas, gagasan mengenai kesatuan memperoleh legitimasi yang berlipat ganda, yaitu legitimasi religius, legitimasi akademis, legitimasi kultural, dan bahkan legitimasi estetik. Berbagai legitimasi tersebut tidak hanya memperkuat kecenderungan gagasan kebangsaan diterjemahkan sebagai kesatuan, melainkan bahkan membuat gagasan tersebut mendorong terciptanya berbagai institusi yang membentuk, mengontrol masyarakat yang terkait untuk berpikir, bersikap, dan berperilaku ke arah yang mendukung gagasan tersebut. Pertama, karena berbagai legitimasi di atas, kesatuan Indonesia cenderung diidentikkan dengan kekuatan, “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. Dalam hal ini segala ancaman dan usaha-usaha pelanggaran terhadapnya dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat melemahkan masyarakat dan bangsa Indonesia sehingga harus dicegah dengan berbagai cara, termasuk dengan cara-cara kekerasan. Kedua, karena mendapatkan legitimasi religius, pelanggaran terhadap kesatuan dapat dianggap sebagai dosa, “membela tanah air sebagian dari iman”. Ketiga, legitimasi ilmiah membuat pelanggaran terhadap kesatuan dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kehendak alam, bertentangan dengan akal-budi, merupakan perbuatan orang yang “tidak waras” atau “gila”. Keempat, pelanggaran terhadap kesatuan dapat pula dianggap sebagai perbuatan tercela, tidak pantas, tidak sesuai dengan harmoni kehidupan. Pembasmian terhadap gerakan-gerakan separatistis di masa Orde Lama, kepekaan yang berlebihan dari pemerintah Orde Baru terhadap apa yang dinamakan “SARA” dengan berbagai efeknya menunjukkan kuatnya pengaruh gagasan mengenai kesatuan di atas.

Karena masyarakat Indonesia, pada kenyataannya, adalah masyarakat yang plural, tidak hanya dalam batas-batas etnisitas, melainkan juga dari segi sosial, ekonomi, dan bahkan kebudayaan, gagasan mengenai kesatuan itu cenderung direalisasikan menjadi “persatean”, menjadi pengingkaran dan

bahkan penindasan terhadap keanekaan aspirasi masyarakat, terhadap demokrasi. Atau, bila dinyatakan secara lebih spesifik, gagasan tersebut sebenarnya dibangun dan dipertahankan dengan menyembunyikan praktek-praktek penindasan dari satu kelompok sosial tertentu terhadap yang lainnya, baik kelompok sosial yang berdasarkan wilayah maupun kelas. Kecenderungan demikianlah yang, tampaknya, membuat dualisme dalam kehidupan masyarakat dan negara-bangsa Indonesia menjadi terus bertahan.

### **3. Kebersamaan**

Konsep kesatuan mengimplikasikan leburnya bagian-bagian yang merupakan aneka komunitas menjadi sebuah entitas baru, satu komunitas baru, semacam sintesis dari antitesis antara kelompok-diri dengan kelompok(-kelompok) lainnya. Ketika masih sangat dikuasai oleh gagasan tersebut, Indonesia memang tidak mengabaikan begitu saja gagasan mengenai kebhinekaan dengan misalnya membangun berbagai institusi bagi pelestarian dan pengembangan budaya-budaya daerah. Akan tetapi, aneka budaya daerah itu cenderung lebih dipahami sebagai varian dari kesatuan bangsa Indonesia yang menjadi variannya, eksistensi yang beraneka dari satu esensi, baik esensi itu bernama kepribadian bangsa, Pancasila, nilai-nilai luhur, ataupun yang lainnya. Dalam kasus bahasa, signifikansi bahasa-bahasa daerah cenderung diukur atas dasar kemampuan kontributifnya bagi pengembangan dan penyempurnaan bahasa Indonesia. Halnya berbeda dari konsep serikat atau perserikatan. Dalam konsep ini terkandung pengertian mengenai kemandirian bagian-bagian. Masyarakat dan kebudayaan daerah adalah kekuatan-kekuatan dengan otonomi penuh yang dengan sadar menyatukan diri atau, tepatnya, berserikat dengan masyarakat dan kebudayaan yang lain untuk mencapai tujuan bersama ataupun tujuan masing-masing.

Konsep serikat atau perserikatan itu tampak sangat rasional. Berbagai masyarakat dan kebudayaan daerah itu seakan dengan sadar, untuk mencapai tujuan masing-masing, membentuk semacam organisasi yang bernama negara-bangsa. Rasionalitas yang demikian mengimplikasi adanya hubungan alat-tujuan dengan menempatkan negara-bangsa, kebangsaan, persatuan dan kesatuan sebagai alat bagi tercapainya tujuan masing-masing anggota dari

serikat itu, yaitu masyarakat dan kebudayaan daerah. Halnya berbeda dari konsep kebersamaan. Sebagaimana yang diimplikasikan oleh kata sama, kesamaan, di dalam konsep yang kemudian ini terkandung gagasan mengenai kesatuan. Akan tetapi, konsep kebersamaan ini sekaligus juga mengandung makna kemandirian masing-masing anggota sebagaimana yang justru terdapat di dalam konsep serikat. Hanya saja, jika konsep serikat mengimplikasikan adanya rasionalitas, relasi alat-tujuan, konsep kebersamaan mengimplikasikan suatu ikatan emosional sebagaimana yang terdapat dalam komunitas-komunitas etnik atau daerah yang bersifat tradisional, tribal.

Dengan demikian, kebersamaan menjadi satu konsep yang tidak hanya dapat menampung dan mengoperasikan gagasan nasionalisme yang aspiratif terhadap masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai masyarakat yang mandiri, melainkan juga memberikan nuansa makna komunalitas sebagaimana yang terdapat dan yang menjadi dunia penghayatan dari masyarakat dan kebudayaan daerah itu. Dalam hal yang terakhir ini kebersamaan benar-benar menampakkan eksistensi kebangsaan sebagai sebuah komunitas, dapat membuat kebangsaan bukan sekedar sebagai seperangkat gagasan abstrak dari dunia sistem yang membuatnya berjarak dari dunia penghayatan masyarakat, melainkan justru menjadi dunia penghayatan yang setara dengan komunitas-komunitas lokal tanpa harus membuat komunitas-komunitas lokal itu menjadi terhapuskan. Lebih jauh, gagasan mengenai kebersamaan ini menjadi sebuah gagasan yang benar-benar responsif terhadap dua arus wacana global sebagaimana yang sudah dikemukakan, dua arus wacana yang tidak hanya memberikan legitimasi terhadap lokalisme, melainkan juga memungkinkan terbentuknya lokalisme yang mengglobal dan globalisme yang melokal. Yang tidak kalah penting adalah adanya implikasi “jaringan” dalam konsep kebersamaan itu, yaitu semacam keterbukaan dari komunitas lokal untuk tidak hanya toleran terhadap eksistensi komunitas lokal yang lain; melainkan bahkan untuk bekerja sama dengannya. Dalam hal ini kebersamaan mengandung pula makna mengenai multikulturalisme, tidak sekedar pluralisme.

Kecenderungan demikianlah, tampaknya, yang membuat slogan politik SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dalam dua Pemilu terakhir dapat menyentuh perasaan rakyat, dapat membuat rakyat seakan menyadari dan menemukan diri dan sekaligus aspirasi mereka yang selama ini mungkin hanya

mengendap dan tertekan di bawah sadar akibat dominasi gagasan mengenai kesatuan yang membuat mereka tidak bisa keluar dari kecenderungan budaya yang dualistik. Kecenderungan demikian pula tampaknya yang membuat slogan itu dengan segera diterima dan bahkan direproduksi, sepanjang pengetahuan saya, setidaknya oleh salah sebuah stasiun televisi dan oleh masyarakat yang tinggal di lingkungan tempat saya tinggal ketika mereka menggunakan dua aspek kunci dari makna kebersamaan dalam perayaan hari kemerdekaan Indonesia tahun 2009 yang lalu: *togetherness* dan *community*.

#### **4. Kebersamaan dan Identitas Nasional**

Kebersamaan mengimplikasikan multikulturalitas sehingga konstruksi identitas nasional Indonesia yang terdiri dari pluralitas masyarakat dan budaya itu tidak lain daripada sebagai masyarakat multikultural. Namun, jika apa yang dinamakan identitas nasional adalah seperangkat atribut yang membedakan satu masyarakat-bangsa dengan masyarakat-bangsa yang lain, tentu multikulturalitas itu merupakan konsep yang tidak memadai karena tidak mampu memenuhi fungsi yang demikian. Hanya saja, karena identitas nasional hanya menjadi sebuah kerangka dasar belaka, perbedaan identitas antar-bangsa dapat dipenuhi melalui muatan substansial dari masing-masing budaya etnik yang ada di dalamnya. Lebih jauh, karena mengimplikasikan keterbukaan, identitas nasional yang demikian tentu saja tidak mengandung risiko yang sebesar konsep kesatuan.

## **Keberkesanan Lokalitas Dalam Puisi Melayu : Satu Kajian Identitas Kembara Budaya Global**

Oleh: *DR Siti Zainon Ismail* (PADAT, Malaysia)

**Bismillahirrahminirrahim**

### **1. Pendahuluan**

Penyair sebagai manusia telah menggunakan daya apresiasinya untuk mengubah pengalaman hidup menjadi karya seni. Dia ingin berkongsi demi kudrat anugerah Ilahi walau menyedari diri hanya peniru alam. Sejak awal sudah diperikan penyair dan seniman hanya berada di tingkat ketiga bawah. Setelah Tuhan Maha Pencipta, beralih kepada seorang tukang kayu kemudian penyair meniru dan menulis puisi setelah seorang tukang menghasilkan sebuah kerusi.

Catatan zaman Yunani ini terkadang masih terdengar juga hingga kini. Seni hanya sementara, rohnya yang abadi ialah ciptaan Ilahi dan diubah menjadi seni yang lebih berfungsi memenuhi cita kehidupan. Di sinilah bahasa jiwa begitu dominan hingga masih-saja dijoloki sebagai karya yang sukar di fahami, apa lagi yang bernilai susastera. Namun sebagai penyair yang sudah menjati diri, tidak terikat dengan pandangan yang melemahkan perjuangan, dia tetap utuh berdiri berkarya demi hati nurani dan tugas ilmu yang didasarnya. Kerana dia tidak hanya bergantung kepada alam semula jadi Ciptaan Ilahi, tidak menyerah kepada bakat alam sebaliknya dia dapat menyaring yang terbaik menggabungkan rasa jiwa dan pemikiran dengan masalah masyarakat, bangsa dan hal dunia semasa. Penyair harus melebur seluruh kecintaan rohani dan munda masuk ke rumah dunia yang lebih besar dan menyeluruh. Di sinilah puisi dapat menembusi isu globalisasi disamping menjaga hak peribadi, masyarakat dan masalah rumah tangga yang sudah menjati diri dengan citra lokalisasi.

Tulisan ini akan menampilkan contoh puisi oleh empat orang penyair (Malaysia) bagi menjelaskan isu berkenaan. Mereka menulis di arena luas di tanah airnya juga merakam dengan mengahwinkan isu semasa di tempat yang

baru dijejaki dengan mengheret nilai lokalitas yang dapat diserapi sebagai karya milik anak bangsa itu sendiri.

## 2. Lokalitas dan Globalisasi

Dalam suasana dunia semakin terbuka, kehidupan manusia pun seakan makin menyatu menjadi milik sepunya. Dengan nilai globalisasi yang melanda - terutama perubahan sikap manusia dan budayanya, manusia seharusnya makin peka untuk menyaring sistem nilai yang sesuai dengan hati nurani. Globalisasi yang umumnya mengetahui saling berkaitan oleh pertumbuhan nilai saintifik, teknologi, pertumbuhan - penurunan ekonomi, kewangan - sehingga manusia dalam kelompok masyarakat seakan bergantung dengan mainan dunia global ini. Tingkah laku manusia dan masyarakatnya saling bertimbal balik, menerima langsung isu global, menolak milik masyarakat asalnya (etnik) hanya kerana mengejar, seakan terikat pula kepada teknologi informasi terutama dengan sumber maklumat yang cepat melalui sistem internet.

Namun demikian dalam sudut kehidupan seni budaya, globalisasi hanya cetusan maklumat teknologi semasa. Ia sebagai budaya popular seakan menjadi milik sepunya begitu mudah diterima kerana '*belonging to the people*' sehingga '*linked by people*' - malah budaya popular ini juga akan menyedar menyatu kelak sebagai tradisi (lih (FFN, May 2003:17-26). Di sini juga akan mengalir nilai tradisi sebagai projek (penyair) anak negeri di wilayah kelahiran masing-masing.

Tulisan ini akan mendekati teknik pemikiran Barbro Klein (ibid) yang melihat '*world of nations - interplay of nationalism and international*. Di sini dilihat betapa kesedaran kebangsaan begitu penting sebagai satu ciri budaya anak negeri, sehingga tampil mengekalkan ciri tempatan atau lokalitas itu.

## 3. Kajian puisi Melayu

Puisi Melayu moden (sajak) dengan rasminya disebut sebagai *Puisi Baharu Melayu* mula mendapat perhatian penyair pada awal tahun 1940an (lih. Ahmad Kamal dan Ahmad Razali, (DBP, 1990). Tradisi penulisan pantun, syair, gurindam sudah mula diambil dengan gaya yang lebih bebas dari segi bentuk, walaupun di sana sini masih tradisi ragaman klasik terutama ciri pantun. Tradisi ini banyak terkumpul dalam kajian yang lebih awal sebagai *Puisi Baharu*

*Melayu Zaman Permulaan* ( Ali Haji Ahmad, DBP 1959) dan *Puisi Baharu Melayu 1942-1969* (DBP 1961). Sehingga tahun awal 1960an, umumnya penyair Melayu menjadikan terbitan karya puisi dari Indonesia sebagai rujukan awal. Terutama daripada golongan penulis – wartawan dan bakal guru yang juga merupakan pejuang kemerdekaan terutama yang bergabung di Maktab Perguruan Sultan Idris (sekarang lebih dikenal sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI). Puisi baru ini juga diungguli oleh para wartawan muda yang berkumpul di Singapura hingga puisi digarap sebagai bahan propaganda melawan penjajah. Usman Awang sejak awal tahun 1950an dalam kumpulan Asas 50 masih terikat dengan bentuk tradisi terutama lenggok bahasanya yang romantik walau nadanya memaut rasa perjuangan, ‘ Pahlawan sejati/ dalam hatinya bernyanyi/ tanah air dan bangsa/ di mana terpaut cinta mulia. Ritma pantun dan syair masih terasa (aa/bb)(lih. Usman Awang, 1994,150).

Dalam kertas kerja ini, ditumpukan kepada karya penyair golongan kedua yang sudah lepas dari pendidikan perguruan (kecuali Kemala). Keempat-empat penyair ini memang berdiri dalam ruang peralihan puisi baharu selepas memasuki arena tahun 1960an. Mereka ialah:

1. Kemala ( 1941), asas pendidikan guru, pegawai sastera, dan pensyarah
2. Latif Mohidin ( 1941), asas pendidikan seni lukis, penyair dan pelukis sepenuh mana
3. A Ghafar Ibrahim (AGI, 1943), pendidikan guru- seni lukis, guru, pensyarah, penyair - pelukis
4. Firdaus Abdullah (-1944), pendidikan sains politik, wartawan, pensyarah-profesor , birokrat sastera, Senator

Lebih menarik, mereka ialah berketurunan Minang. Di sinilah nilai lokalitas itu begitu ketara, di mana pun mereka berkarya. Di sinilah titik tolak, saya melihat, konsep merantau Minangkabau itu menjadi teras dan melihat bagaimana sifat merantau itu sudah mendarah daging dalam jiwa sehingga episod kembara dan perjalanan antarabangsa (ke dunia globalisasi) tidak menghilangkan semangat jadi diri penyair berkenaan. Mereka tetap mengheret nilai tempatan atau isu lokalitas walau jauh di benua asing.

#### 4. Identitas etno- sejarah budaya Melayu

Kajian etnografi budaya kerap menemukan kesan pra sejarah , sejarah awal dan asal usul sebuah penempatan. Bagi suku kaum etnik dan bangsa Melayu, Palembang sudah diterima sebagai pusat budaya asal Melayu. Sejak Sungai Melayu disebut dalam teks *Sejarah Melayu* dengan kedatangan anak raja empat bersaudara muncul di dunia, di negeri Palembang. Palembang sudah menjadi sejarah yang bermitos budaya tinggi. Perjanjian Demang Lebar Daun dengan Sang Sapurba (Nila Utama) telah membayangkan betapa orang Melayu mempunyai pola dan sistem budaya sebelum kedatangan unsur luar (Siti Zainon, 2009, 22). Begitu juga apabila Sang Sapurba dilantik menjadi raja di Palembang kemudian ingin mencari wilayah untuk pusat kerajaan Melayu sudah menampilkan sikap keluar dari wilayah asal, meneroka ke wilayah baru di rantau. Sejarah budaya ini sudah menjadi tanda dan lambang, dalam perkembangan puisi Melayu. Muhammad Haji Salleh dan *Sajak-sajak Sejarah Melayu*, menjadikan teks *Sejarah Melayu* sebagai lambang kekayaan budaya Melayu yang berasal dari Palembang, dan merakam tentang bukit Seguntang dalam bait “ Ceritera yang kedua” ( Muhammad Haji Salleh, 1992, 6)

Dari puncak bukit Siguntang

Terkelip kuning lembut putik cahaya

Terketar di udara, berdasun halus apinya

Sejenak memancar seperti bintang timur

Empuk memegang tangan Malini

....

Dalam kes ini kita akan melihat watak dan pemikiran penyair tidak dapat dipisahkan dengan lokalitas etno (keturunan asal) mereka. Malah dapat diandaikan kemelayuan itu tumbuh sejak salah seorang saudara empat beradik ini beraja di Pagar Ruyung, atau sejak zuriat Raja Suran dari negeri Hindustan tiba di bumi Palembang. Begitu pula ‘putera rahsia?’ Sultan Mahmud Melaka (akhir) diterima oleh Ratu Jamilan di istana Pagarruyung, penyair Melayu memang tidak dapat memisahkan asal mitos Palembang-Minangkabau. Maka dalam berbincangan ini isu lokalitas dan globalisasi akan membicarakan

penyair yang terkait dengan warisan budaya Melayu-Minang dan kita lihat latar belakang keluarga mereka,

**Kemala** (1941) memang kerap mengaku berasal daripada moyangnya Minang –Jawa. Leluhur dari titih Datuk Tambusai bagai mengiringi langkahnya yang tidak jenuh mengembara. Langkah awalnya bermula sebagai guru muda di Kuala Selangor, belajar dan mengembang ilmu hingga menjadi editor majalah *Dewan Sastera*. Beliau belajar hingga memperoleh ijazah Ph.D dan kini sebagai pensyarah tamu di Universiti Putera Malaysia. Inilah lambang kerja me (di) rantau kerana ilmu membuat puisinya terus berkembang hampir 50 tahun penglibatan sebagai penyair. Karya waris di rantau Minang itu tertebat ke sarwajagat. Melalui kembara ini puisi pun bertebat di dunia antara bangsa dan tetap mengheret nilai lokalitas yang menjati diri. Kemala juga adalah penerima anugerah SEA Write, Bangkok 1986.

**Latif Mohidin** (1941) – lebih dikenali sebagai pelukis penyair. Lahir di kampung kecil Lenggeng, Negeri Sembilan. Pendidikan awalnya dalam seni lukis bermula setelah beliau serius melukis dalam kesibukan keluarga Minang di rumah ayahnya Haji Mohidin sebagai Sheikh Haji di Singapura. Anak kecil yang belum mengerti kehebatan lelaki, merasa aneh melihat rumahnya kenapa dipenuhi bakal haji dengan gaya hidupan yang ribut, bicara keras, ketawa, merokok dan mengaji sebagai persiapan untuk belayar ke Mekah. Di situ dia hanya bersuara dengan mata, melihat selipar, capal penuh di muka pintu. Diam-diam dia naik ke loteng melukis kekusaran harinya. Orang ramai, tapi dia sepi, menyendiri – melukis. Yang menjadi sehabatnya, kertas, arang, tinta dan cat warna air. Dari sini pintu kembara pun terbuka. Dengan bakat itu dia telah ditawarkan untuk belajar ke German Institute of Fine Art. Bermulalah kembara penyair sebagai perantau waris Minangkabau.

**A. Ghaffar Ibrahim** (1943), kelahiran dari keluarga Minang di Baranang daerah kecil perbatasan Negeri Sembilan-Selangor. Ayahnya menjaja kain (*menggaleh*), perkakas dapur berkeliling atau di pasar malam. Berhari-hari ayahnya tidak pulang ke rumah, kerana berniaga hingga ke Singapura. Konon ayahnya menulis sebagai wartawan yang menyamar, tetapi wajah ayah dan ibu makin samar. Yang diingatinya hanya nenek berpantun

bergurindam, dan beliau turut meniru gaya neneknya yang kerap berlipur lara. Di Beranang, pemuda sudah belajar silat dan menari piring, maka bermulalah anak lelaki berusia 6 tahun bersilat, menari piring ketika menerima tamu yang berkunjung ke kampung atau menari di depan pengantin. Dia tumbuh sebagai guru, belajar terus hingga mendapat ijazah Sarjana pendidikan seni rupa di Amerika. Penerima Anugera SEA Write Award 2005.

**Firdaus Abdullah** mencatat beliau lahir di Kuang (1944) atau mengaku lahir di situ. Datuknya Haji Jaafar membuka kedai makan Minang di Jalan Melaka, dibantu oleh ayahnya Haji Abdullah. Tetapi beliau tidak tertarik dengan dunia dagang. Sebaliknya terlibat sebagai pemuda pejuang bahasa dan bangsa Melayu melalui Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS). Memulakan langkah sebagai wartawan dan terus belajar hingga memperoleh ijazah Ph. D dalam bidang Sains Politik. Menjadi pensyarah, Timbalan Naib Canselor, Pengarah DBP, kini sebagai senator bersuara di parlimen. Puisinya tidak begitu banyak tetapi di sana sini tetap mewarnai citra lokalitas walaupun menulis di dunia antarabangan yang global.

## 5. Lokalitas dan wilayah etnografi

Apakah ciri etno dalam puisi atau lebih tepat bagaimanakah konsep nilai lokaliti itu bersumber daripada kecintaan kepada indentiti etnik? Seni budaya (di sini hasil kerja > puisi) telah mengheret kajian pemikiran *folklore* etnografi. Bukankah puisi sebagai kerja kreatif adalah hasil kerja artistik sehingga sebahagian ciri konvensional melalui simbol bahasa telah dapat memunculkan gaya tempatan? Gaya tempatan – lokalitas ini sudah lama di heret, di bawa ke rantau oleh kesedaran estetik yang sudah lama mengakar. Malah melalui disiplin antropologi-budaya kita dapat mengumpul bahan etnografi dalam puisi sebagai sumber teks dengan latar sejarah budaya (etnografi) penyair yang dianalisis. Sejauh manakah penyair masih ingin mengekal unsur tradisional dalam suasana globalisasi semakin menggila? Bagaimana pula penyair dapat berdiri setara sebagai

*world of nation* - bangsa dunia – tetapi tetap bergelora dengan semangat nasionalisme walau berdiri di arena internasional?

### **5.a. Etnografi – awal pengenalan konsep rantau**

Ke empat penyair yang diperkatakan ini berada di wilayah rantau Minang (di seberang Selat Melaka, Semenanjung Tanah Melayu). Kedatangan perantau Minang sudah mula dicatat sejak zaman Kerajaan Melayu Melaka, terutama ketika Sultan Mansur Shah mula dicurigai oleh isteri Baginda, Raden Galuh Cendera Kirana. Kelompok Minang ini datang melalui sungai setelah merentas Batang Hari, datang sebagai petani tetapi menjadi 'orang suruhan' anak-anak raja...kalau jalan lecah dimintalah pemuda dari 'Minang- Siak' mendokong anak-anak istana. Begitu juga Tun Mamat dititah membawa dulu orang Inderagiri untuk sampai ke Gunung Ledang. Puncak kedatangan kumpulan Minang lebih ketara apabila Raja Kecil menyerang kerabat Sultan Sulaiman di Riau Penyengat. Minang menyokong Raja Kecil Siak dan Bugis menyokong anak Melayu Johor-Riau pada akhir abad ke 17. Hingga akhir awal abad ke 19, mereka pula adalah pekerja yang khusus dibawa untuk melombong bijih, berniaga dan menjadi petani, sama ada di Negeri Sembilan, Selangor terutama di Beranang, Semenyeh, Puchong, Segambut, Ampang, Kuang dan Gombak. Di sinilah tempat asal kelahiran empat orang penyair ini. Kemala (lahir di Gombak, Selangor), Latif Mohidin (Lenggeng, Negeri Sembilan), A Ghafar Ibrahim (Beranang, perbatasan Negeri Sembilan-Selangor), dan Firdaus Abdullah (Ranah Minang/ Kuang, Selangor). Di sinilah mereka membesar, mendengar cerita orang Minang di rantau yang masih segar segala salasilah, cerita lisan sastera rakyat yang dituturkan oleh datuk dan nenek mereka. Kemala, Firdaus Abdullah, mendengar Kaba, belajar silat Dabus di Gombak. A Ghafar Ibrahim mengutip cerita lisan tutur nenda dan menari pencak silat tari piring di Beranang dan Latif Mohirin langsung melihat sikap perantau Minang yang akan berangkat ke Mekah, tanpa melupakan salung, capal, kopiah, sarung pelikat di bahu dan lirik kaba walaupun sudah tiba di Singapura ketika itu (awal 1950an).

## 6. Analisis karya dari simbol etnografi, lokalitas ke globalisasi

Seni paling tulus lahir dari kalbu bangsa dan paling bening mencerminkan wujud pribadinya' ( Subagio,1971, 51). Disamping itu pengkarya juga tidak melepaskan nilai idealogikal segala wacana moral kemanusiaannya' ( Freadman and Miller, 1992,55). Dalam kes ini idealogi mengasihi isu lokal , asal usul waris budaya menjadi tonggak kenangan dan diangkat hingga menimbulkan jati diri. Bagi penyair Firdaus, ideologi mencintai tanah leluhur warisnya telah menjadi begitu ideal, sempurna untuk tetap dikenang. Hal yang sama juga berkembang di jiwa penyair lainnya.

**6.1. Kemala** sejak kecil sudah berpencak, berqasidah dan berzanji. Puisi awalnya adalah larik rindu resah anak mula yang terlempar jauh di Tanjung Karang, Kuala Selangor yang terpisah oleh kesukaran jalan raya yang kumuh. Harus menyeberang sungai Selangor dengan feri yang lamban. Di situ beliau meratap mendapat berita perginya ibu yang dikasihi. Kemala merintih, malu dan kesal. Tetapi akhirnya dia menemukan tongkat sakti, lagu ibunda dengan ritma tradisional, puisi larik yang sarat rindu. Rindu pemuda dipisahkan oleh kekasih (orang tua) dan tinggal kenangan hanya dibelai oleh ibu saudara. Dia pun menjadi sensitif oleh kesukaran hidup, manusia pura-pura dan terus mencari kasih sayang. Di rantau dia menemukan itu semua. Dibawa dirinya menyatu ruang di Singkarak, meniup pipit batang padi di Tanjung Karang tetapi lagu hatinya ke tanah seberang, sehingga zikir qasidah menyatu beralun kaba seperti dalam “ Si Bisu” ,

berikan si bisu  
pisau  
pisau kasih pisau jerih  
pisau bakal  
membisu  
sedih  
berikan sedih  
lidah

lidah tasbih lidah fasih  
lidah bakal melidah  
luka  
luka duka segurun  
memipis luka yang luka  
luka salih luka putih  
luka, luka bulan  
luka, luka iman  
berikan si bisu iman bulan

(Hanouma, 1992)  
dlm. *Titir Zikir*, 1995)

Puisi ini ditulis di Hanouma? Tetapi beliau membawa nafas 'lidah tasbih' dia tidak merintih kerana lukanya putih, luka bulan dan penemuan abadi yang dilukisannya memberi si bisu iman bulan. Kita menemukan lagu batini, keinsafan kaba yang merindu, namun terselit keinsafan 'luka salih/luka bulan yang dijawab oleh iman bulan. Bukankah inilah latihan anak lelaki Minang yang membesar di surau dan madrasah, 'pergilah bujang merantau, di rumah berguna belum. Lalu bersama di madrasah belajar agama dan silat sebelum penuh ilmu di dada untuk merantau ke kota? Tradisi itu terbawa dalam puisinya ketika masih di rantau orang dengan semangat segala keperitan hidup harus diselesai dengan penuh kesedaran. Kasih persahabatan bila di rantau juga terpapar dalam kembaranya hingga harus mencari pusara penyair yang bersemadi jauh di negara orang. Baca puisi "di Pusara Utuy Tatang Sontani". Tidak semua warga Indonesia akan mencari pusara penyair yang hilang jauh ini tetapi ucap Kemala, Daunan maple emas menggemersik doa

bumi Ilahi tiada batas: antara  
kita khalifah-Nya, lagu batin penuh kasih  
tafakur musim gugur  
selayang kenang julur-jalur sulit  
detik dalam detik  
tapi Utuy kau harus pergi

walau purnama belum timbul, istirahatlah  
saudara, pagi dan bibit bakal muncul  
gunung jiwa tersergam anggun

(Moskow 1989)

dlm. *Titir Zikir*, ibid

Simpati kemanusiaan Kemala begitu jelas. Dengan doa disampaikan kenangan berada di bumi Tuhan sebagai kota milik manusia sejagat. Tidak ada batas politik atau tanah air orang, sebaliknya dengan kesan globalisasi yang luas, beliau boleh saja menemui orang yang dirindui. Salah seorang itu ialah penyair Nusantara yang harus mengungsi oleh peristiwa politik bangsa. Seorang Kemala berhasil membawa Utuy yang sudah menjadi bangsa dunia dan membawa pulang ke tanah air hanya melalui bait puisinya yang jelas melalui rumah globalisasi antarabangsa.

**6.2. Latif Mohidin** membesar dengan visual capal, kopiah, sarung pelekat atau Bugis bersilang di bahu lelaki Minang di kota metro Singapura sejak awal tahun 1950an. Matanya merayap ke suana hiruk pikuk celoteh dengan dialek Minang yang pekat. Dia membisu lebih banyak memerhati dan jarinya lebih gembira melukis suasana di atas loteng atau merayau ke rumah pelukis. Dia pernah ke Lorong 38 Jalan Geylang di hari Minggu melihat pelukis Nas Achnas melukis. Beliau gemar melukis wajah orang di sekitar rumah, wajah kawan-kawan di kelas, mendekati Apek Tongkang atau Mamak kacang putih daripada melukis P.Ramlee, Kasma Booty yang terpapar di majalah *Mastika*, *Mutiara* dan *Hiburan*. Di sinilah kerja mata hati sudah bermula. Bukan meniru wajah (foto) yang sudah tersedia.

Puisi pun bermula sejak *Journey of a Work of Art* '...in silence, he gives form to what he sees with his mind's eye, intergrating some of the experiences oh his culture and the meaning of his life' (Latif, *Line from*

*point to point*, 1993, 181) . Memang Latif adalah pelukis dan penyair sunyi, diam dan penuh renungan. Apakah kebudayaan bagi Latif? Mendapat didikan di Jerman, merantau ke seluruh Eropah dan Amerika. Memang beliau sudah menjadi bangsa dunia, melukis dan menulis di Koln, Amsterdam, di Berlin. Tetapi dia membawa pulang semangat pucuk rebung, siput dengan buntut terbalik, kulit teripang juga perahu bercadik Nusantara. Dia menggali unsur warisan ibunda. Maka salung pun ditiup mendayu walau dia jauh di Pulau Siciley, sehingga dia tidak tertarik melukis Kuala Lumpur yang memang tidak berbeza dengan pasar raya di Kidamma, tidak juga berbeza dengan Batu Road, tetapi kenapa sungai Gombak tetap berlumpur? (kemudian di buka kota diberi nama Kula Lumpur) Bukankah di sini dulu rawa-rawa, lembah tempat perahu dari Kelang memuat pedagang =-perantau Minang singgah di Pelabuhan Batu Hampar (di muka Masjid Jamek Kuala Lumpur sekarang) hingga memaparkan denyut luka “ Rawa-Rawa” (dlm. *Rawa-Rawa*, 1992, 1), Rawa-rawa paya yang pekat kelam

mataku ini tidak akan kulelapkan  
 kuingat kembali puisi dinihari  
     getaran keringat di dalam lumpur  
 lagu unggas menggapai-gapai udara  
     kepak kecil mēnerjang terbenam  
 ranting hanyut ke muara perlahan  
     angin masih menjalar ke bukit  
 suara kanak-kanak di liang kemarau  
     hati ibu berkumpul mencakar bumi  
 Jangan kau gantikan sarafku ini  
     Tubuhku semarak anyaman di rimba .

Penyair membawa resah kota yang baru dijengahnya sekembali dari perantauan. Kenapa tanah air tidak menjaga hati ibu....tanah air yang sekian lama mencakar bumi? Bagi anak yang mewarisi darah Minang, semangat ibu > ibunda / bunda kandung adalah segalanya. Konsep bunda kandung yang menjaga harta pusaka, terbiar di tanah air yang sedang riuh membangun? Apakah setelah jauh merantau dia harus kembali

menyatu dengan ‘merak kayangan di rimba? Inikah pelarian atau surut ke belakang ingin menyatu dengan warisan – mengangkat nilai lokalitas dalam puisi yang masih kaya dengan harta pusaka bumi tercinta?

Barangkali puisi “ Pelayaran” (1974) setelah jauh mengembara penyair membawa rasa abadi menemui kembali khazanah pusaka tanah air . Beliau dia selalu ingin kembali menyatu dengan berita lama (kaba),

Hati ini berlagu juga  
mata ini berkisah jua  
darah ini mengalir jua

Belayarlah

Hatiku

Mataku

Darahku

Jauh, jauh

Dan beri kabar

Pabila kau mendarat.

Anak rantau kembali ke tanah leluhur dengan membawa kesan rindu ingin cepat mendengar kabar ,apakah yang terjadi sepanjang ketiadaan ibunda ini?

Dalam bidalan Melayu telah diperikan , “ setinggi - tinggi terbang bangau, hinggap jua di belakang kerbau.” Dan ini jugakan kembali seorang Latif Mohidin yang mengheret salung, terkenang sawah dan kerbau dan melukiskan ruh tanduk menjadi kun , pucuk rebung dan buntut siput nun jauh di negeri salju. Satu contoh etnografi asal kampung atau wilayah penyair yang bertembung dalam sosok kota metro internasional dan globalisasi tetapi tidak semuanya harus melupakan tanah leluhur, nilai warisan bangsa – di sinilah gara-gara kasihkan tanah leluhur, tanah air sebagai kesan perjuangan dan kesedaran kebangsaan - nasionalisme.

- 6.3. Sejak awal tahun 1970an **A.Ghaffar Ibrahim (AGI)** telah membawa roh silat dan tarian piring dalam puisi “ Tak Tak Tun” dan “ Dun Dun Cak”. Para kritikus yang mencari estetika dan keindahan sajak, kecewa dan menolak karya ini kerana tidak menampilkan ciri keindahan puisi. Bertahun beliau tidak peduli, meneruskan konsep gaya 3 V (vokal, verbal, visual) ke arena pentas baca puisi. Karya ini tolak. Dianggap vulgar , melucukan dan mempermainkan nilai keputisan sajak. Mereka lupa atau membiarkan sikap sini AGI yang ditampilkan seakan dalam suara berjenaka, dengan suara serak basahnya ber “ Ya – Ya – Ya “

Sebaliknya saya dengan tegas memperkenalkan sajak ini sebagai mengheret rentak alami seni Minangkabau, terutama ketika mengikuti gerak langkah AGI mengangkat sembah , duduk bersila sebelum bangun membaca gerak pencak tari piring. Untuk menjelaskan makna puisi tanpa larik lengkap ini, pelajar harus turut menajam fahaman entografi penyair, asal dari Beranang yang terdiri daripada komuniti Melayu-Minang. Di sini pelajar diajak mendengar kompang, gendang, serunai (salung) sebagai mengiring rentak bacaan Tak Tak Tun ataupun Dun Dun Cak. Kajian etnografi ini sekurang-kurang membuka minda pelajar sastera yang hanya membaca buku puisi dan menjadi penonton pasif di halaman pentas.

Dun Dun Cak, hanya membunyi (vokal) daripada gerak visual seorang pesilat tari piring. Paluan gendang ibu dan anak dititih berbunyi Dun, Dun di sambut dengan-titih Cak.....(gendang anak). Tetapi oleh kerana beliau berlakon berseorangan di pentas, beliau seakan hanya bermain irama dengan pukulan kompang saja. Tidak sebagai komentar atau tulisan tentang irama etnografi gendang dan kompang. Tahun 1970an merupakan detik kosong dari sudut pandangan etnomuzik. Malah belum muncul sarjana lulusan bidang etnomuzikologi ketika itu.

Untuk mengkaji puisi AGI mahu tidak mahu harus kembali ke watak etnologi budaya beliau. Kepekaannya kepada bunyi air, angin, deru angin memukul awan. Malah deru batin digoda gelora. Maka tradisi randai, tepuk sarawa, dan dekah Sutan Mudo turut mewarnai watak budaya Beranang ini. Berbanding dengan Latif yang diam di dalam sunyi, AGI berada sebaliknya, riuh ketawa berdekah, bersorak sorai dengan kompiang, berpencak, melompat....dia yang resah cuba mengalirkan jadi jadi diri. Ya dia menemukan puisi dengan berkaba. Lihat puisi yang berjudul “ Apa yang Nak “ (lih. Hasni dan Shamsudin, peny, 1995, 11-12),

Nak dicapai bulan bulan tinggi  
Nak dicapai langit langit nun  
Nak dicapai awan awan lari  
Nak dicapai angin angin lalu  
Nak dicapai bintang bintang terang

Apa yang nak

Nak dicari angin ingin tahu  
Nak dicari nama nama ada  
Nak dicari kain kain benang  
Nak dicari benang benang kusut...

....

(lih. Hasni dan Shamsudin, ibid, 11)

Sajak 35 baris ini jelas menampilkan keringinan, keresahan penyair. Apa yang di mahu, apa yang ditunggu, mencari nama, pangkat, gelar semua sudah ada (untuk orang ternama, terkenal, bergelar dsb) tetapi manusia masih belum puas untuk terus mencari, mahu, teringat, atau nak (hendak). Pengulangan perkataan (yang kadang-kala membosankan untuk dibaca) dapat dijawab oleh penyair, kerana beliau menghidupkan getar teater warisan, seakan berandati, berkaba, sambil memukul rebana yang berkerincing. Gaya pembacaan puisi inilah diseret di pentas antarabangsa

masuk dan tembus ke ruang global sejak tahun 1970an, berentak randai di Australi, Amerika, Thailand, Filipina, Indonesia .

6.4. Bagi **Firdaus Abdullah** , melihat air terjun Niagara yang terlintas tetap Danau Singkarak atau Maninjau. Malah tetap terlintas ‘ adik berkebaya, berbaju kurung’ (Siti Zainon , 2009,74). Unsur tradisional ini (sejarah, latar danau, dan cita kebaya dan baju kurung) telah dibawa jauh ke rantau luar. Lebih tepat dia berada di dunia global yang canggih masih di himbau nilai tradisi yang sudah diwariskan sejak lama. Walaupun kenyataan sudah berubah (tempat) , namun penyair masih dan tetap terheret rindu ke ruang asal. Kita semak puisi “ Niagara”.. Niagara. Setiap kali aku ingin mentafsir/hakikat wujud/ dan mitosmu/ kenanganku melayang / ke tempat yang jauh/ ke masa yang silam/ kepada sariyati/ke rahsia terpendam,

Kenangan kepada Sariyati adalah

Kerana dia

pusat kasih

pumpunan rindu

yang semakin rimbun

dan semakin subur

dalam ingatan

Dalam kajian etnografi turut dicatat tentang dongeng, mimpi dan rindu. Unsur ghaib ini kerap wujud dalam minda sebagai tanda ingatan dan dilambangkan oleh unsur persekitaran yang baru...hal ini terjadi kepada jiwa penyair, hanya oleh deruan air terjun , kesegaran udara, dapat menggugah batin, rindu semakin rimbun dan subur...rindu pada puteri tercinta Sariyati. Lebih jauh lagi deru air Niagara di depannya (dunia realiti – globalisasi ) seakan tidak wujud malah berganti kesedaran, mengenang tugas belum langasai kepada tanggung jawab kepada

kemiskinan keluarga dan ibu tercinta. Keinsafan makin menggemuruh, ‘ adalah sesalan yang pahit/ yang hanyut di arus takdir.../ Penyair seakan meratap jalur hidupnya, kasih tak sampai dan rindu kepada puteri tercinta...namun Niagara tetapi ‘ kaubangkitkan /ghairahku/ terhadap rahsia terpendam/ yang hanya dapat dikawan oleh penyair sendiri, kerana ‘ segala misteri’ .

Kecintaan penyair ini kepada tanah leluhur Minang memang jelas terungkai, baik melalui tutur hariannya apa lagi dalam bait dan ungkapan puisinya, dalam “ Senandung Rindu di Pulau Hawaii” terpapar ritma ulangan yang kerap terdengar dalam ungkapan kaba,  
Selingkar pulau Hawaii  
Selingkar rindu berangkai-rangkai

Pagi minggu dan sinar mentari  
Kurindui khamsiah dan hartini  
Darah daging kusendiri  
Kental-kenta kasih buya dan umi

...kenangan di rantau, bagaimana memisahkan kasih sayang, pada hal Hawaii pulau berbulan madu boleh saja menghapus rindu. Tetapi tidak anak waris Minang kalau di rantau kerana hatinya sudah terpaut terikat dengan wilayah sejarah yang kaya dengan nilai tradisional yang murni, walau

lereng gunung jalan berliku di tepi lurah  
ku kenang mesranya Murni di Pulau Perca  
tujuh tahun dulu di Berastagi  
bersama lagi ‘ si kumbang cari’...

Penyair mengheret diri lara ketika di rantau. Mengenang upik jauh di bali Berastago. Tergoda dengan Kathryn Stuneta tetapi semua pahit , cinta manis pun berlalu kerana ‘terbatas dengan kongkongan tradisi dan adat’

Di sinilah nilai warisan sebagai citra lokalitas yang dipegang teguh oleh penyair walau hidup sudah lepas di dunia kebebasan barat.

## 7. Kesimpulan

Bidalan Melayu lama telah memerikan, ' tempat jatuh lagi dikenang inikan pula tempat bermain ' bagai menjadi sandaran kasih dan iman di jiwa dan minda penyair. Ini dijelaskan oleh Raymond W, ' may find expression not just in literature, but in the arts in general' (Freadmin, 56), ini muncul dalam seni persembahan teater, seni musik dan muzik yang kembali menggarap nilai lokal yang berbau etno dan sudah terkenal dengan kajian etnomuzik umpamanya. Latif dengan semangat warisan leluhur penuh kecintaan bangsa, masih mendengar gema salung walau jauh di rantau, AGI meneruskan tradisi berkompang, gerak rentak piring yang berdenting, Kemala dengan alunan puput rindu, ditambah dengan dengung zikir, dan ratap Qazidah, dan Firdaus harus dan tetap ingin mengekalkan adat dan adab Melayu Minang. Sehingga di jiwa mereka puisi bukan sekadar pengucapan kata-kata tetapi semangat jati diri harus dikekalkan, dibawa di mana berada. Pegangan ini telah menunjukkan kesedaran bahawa walaupun penyair dapat menyatu dan telah diterima sebagai bangsa dunia tetapi dia tidak menyingkir dirinya sebagai titih warisan bangsa yang menggenggam tugas perjuangan bangsa. Dengan lain kata dia tidak menakluki segala unsur globalisasi tidak meniadakan kemajuan teknologi (sebagai alat) tetapi roh harus menyatu konsep lokalitas, yang lebih bersifat dalaman, cinta, kasih dan amanat puisi yang digarap. Di sinilah simbol muncul sebagai tanda, tanda pengenal suatu bangsa Melayu dan mereka masih terikat dengan etnografi Minang. Di sini ikon muncul dengan simbol makna nyata dan diimbangi dengan nilai estetik (Cirlot. 1985).

Walaupun Baha Zain pernah mencatat lebih 27 tahun lalu (1973), ' di Malaysia tidak ada usaha kembali kepada tradisi ' dan hanya menyebut unsur tradisi masih bersisa ritma pantun dalam bait puisi Usman Awang. Tetapi hari ini semakin marak isu globalisasi semakin menyentak jiwa penyair untuk meneruskan bukan saja citra tradisi tetapi bentuk pantun, gurindam dan tromba makin berkembang. Bentuk tradisi digali dikaji dan tumbuh senarai penyair yang memilih puisi warisan ini. Antaranya Zurinah Hassan yang mula bernyair, bergurindam, dan Ahmad Salju menghidup

bentuk pantun dengan citra moden. Dengan lebih tepat, kesedaran menoleh ke warisan telah dilakukan bagi mengimbangi diri dan bangsa yang tercalar oleh arus gelombang globalisasi, bukan saja sekarang malah sejak bangsa tanah air kita dijajah. Tetapi hati dan nurani kita tetap mempertahankan maruah bangsa. Malah dengan tegas dan bangga Kemala bertanya ketika berada jauh di benua salju, berjumpa manusia sebangsa seperti dalam puisi “ Mim Tujuh Puluh Enam” , (Kemala, 1999)...

maka 'mengembara di bumi  
asingkah kami di sini? Ini  
bukan soal saudara, tataplah  
cepat kau bermesra dengan  
bahasa nusantara, walau ideologi  
membedakan, tapi kulit sawo matang  
kita membawa angin sejarah  
mengelus, kau menjadi pelarian  
dan sulit kembali ke Padang atau ke Yogyakarta  
tanah Jerman menerimamu  
dan aku mengembara sejenak  
Ingin menulis sketsa hayat...

Sekali lagi etnografi bangsa dan sejarah tidak dapat memalsukan kenyataan budaya. Puisi adalah produksi budaya dari jiwa seniman. Seniman penyair, ahli muzik , malah teater, cuba kembali menggali warisan dengan citra baru sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Di sini dapat dirumuskan dengan ayat yang sederhana, globalisasi telah menimbulkan kesedaran jati diri seniman untuk mempertahankan nilai warisan daripada ditelan arus zaman. Keberkesanan lokalitas menjawab permasalahan popular, globalisasi tidak mungkin menghilangkan semangat dan nilai lokalitas seni budaya.

Insyallah

Sekian, Allahdulillah

Gombak – Bangi Selangor. 06-20 Mei 2010

## BACAAN

Baharuddin Zainal, 1980. *Esei Sastera*. K.Lumpur: Dewan Bahasa an Pustaka

Cirlot, J.E. 1985. *Dictionary of Symbols*. London: Routledge & Keaagen Paul

Freadman, R, and Miller, Seumas, 1992. *Re-Thinking Theory*. New York: Cambridge

University Press

Hasni Abas dan Shamsudin Jaafar, peny. 1995. *Puisi-puisi Kunjungan*. K.Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka

Kemala, 1995. *Titir Zikir*. K.Lumpur: Pustaka Cipta

—————, 1999. *Kumpulan Puisi Mim*. K.Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustala

Latif Mohidin, 1992. *Rawa-Rawa*. K.Lumpur: Pustaka Cipta

Muhammad Haji Saleh, 1992. *Sajar-Sajak Sejarah Melayu*, K.LumpurL Dewan Bahasa

dan Pustaka

Siti Zainon Ismail, 2009. *Memasuki Taman Puisi*. K.Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka

—————, 1989. *Percikan Seni*. K.Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Subagio Sastrowardojo, 1971, *Bakat Alam dan Intelektualisme*. Jakarta : Pustaka Jaya

The Folklores Fellow's Summer School, 2002 (FFN, May 2003, 17-26)

Usman Awang, 1994. *Puisi-puisi Pilihan Sasterawan Negara*. K.Lumpur: Dewan Bahasa

dan Pustaka

---

## CV Ringkas

DR SITI ZAINON ISMAIL ialah mantan Profesor Budaya Universiti

Kebangsaan Malaysia. Bidang khusus kajian ilmiahnya melibat dunia Kesenian Tradisional dan Budaya Warisan. Kajian yang telah dibukukan antaranya, Garis dan Warna (1984), Rekabentuk Kraftangan Tradisional (1986), Percikan Seni (1989), Tekstil Tenunan Melayu (1993), Busana Melayu Johor (1995), Pakaian Cara Melayu (2006,2009 – cetakan ke 3) , Aceh : Suara dari Hujung Tambak, (2009), 100 Pepatah Petitih Melayu (2010) dll. Beliau juga penyair dan penulis kreatif yang menghasilkan lebih 20 judul buku puisi, 12 buku cerpen dan 4 buah novel. Penerima Anugerah SEA Write Award, Bangkok 1989, Gelar Cut Nyak Fakinah Aceh (1990) atas sumbangannya menulis dan mengenalkan Seni Budaya Aceh,di luar Nangroe Aceh Darussalam dan anugerah Budayanita Selangor (2006).

Sebagai pelukis beliau telah mengadakan lebih 16 pameran solo dan pameran bersama sama ada di dalam mahupun di luar negara. Kini beliau terus mengkaji khazanah seni budaya Warisan Melayu, menjadi penasihat kegiatan seni warisan, dan turut memerialisasikan penubuhan Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor (PADAT) dan dilantik sebagai Ahli Lembaga dalam bidang Persembahan Seni Warisan Melayu.

# Merajut Identitas Melalui Revitalisasi Bahasa Lokal

*C. Ruddyanto* ✓

BALAI BAHASA DENPASAR  
cruddyanto@yahoo.com.au

## Abstrak

Setiap individu atau kelompok memerlukan identitas dan bahasa dapat menjadi lambang identitas itu. Namun, di dalam pencarian identitas itu, penutur bahasa di Indonesia menunjukkan sikap yang berbeda. Di pihak yang satu ada kecenderungan untuk menjadikan bahasa sebagai unsur budaya yang ditinggikan, di pihak yang lain ada yang justru tidak peduli akan bahasa yang diturunkan oleh leluhurnya. Godaan untuk meraih identitas sebagai warga dunia melalui penggunaan bahasa asing mengurangi kukuhnya cengkeraman pada akar budaya.

Sumpah Pemuda yang sudah menjelan usia keseratus sebenarnya tidak pernah lapuk untuk dijadikan dasar pembentukan bangsa. Namun, agar sumpah itu tidak sekadar jadi ucapan gegap gempita tanpa upaya pewujudannya, perlu ada langkah nyata yang terencana. Langkah itu berkenaan dengan upaya revitalisasi bahasa. Sementara itu, agar tidak kebablasan, hubungan bahasa lokal dan bahasa nasional perlu dirumuskan dengan baik.

## 1. Identitas

Identitas adalah ciri-ciri, gambaran, atau keadaan yang khas yang digunakan untuk mengenali seseorang (atau sesuatu). Setiap orang memiliki ciri khas sehingga dia dapat dibedakan dari yang lain. Jika ciri khas itu tidak ada, tidak

ada pula individualitas. Semua orang sama. Tidak ada rivalitas atau kompetisi yang memicu keinginan untuk mencapai yang lebih baik dari yang lain. Ciri khas tidak selalu bawaan dari lahir, tetapi juga dapat terbentuk atau terwujud dalam perjalanan hidup. Identitas dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif bahkan dari nilai yang ditetapkan oleh diri sendiri. Orang yang terlahir cacat fisik, misalnya, menganggap kecacatan itu sebagai identitas yang tidak diinginkannya. Jika kemudian tumbuh motivasi, baik dari dirinya sendiri maupun dengan bantuan dari luar, untuk mengatasi perbedaan kondisi tubuh itu, kecacatan itu tidak lagi bernilai buruk walau tetap menjadi identitasnya. Umumnya orang cenderung berupaya mengejar identitas yang bernilai positif.

Identitas tidak hanya dapat dikenakan pada individu, tetapi juga kelompok. Identitas kelompok manusia terbentuk oleh adanya kesamaan di antara anggota kelompok itu yang tidak terdapat pada kelompok yang lain. Dengan kata lain, identitas kelompok adalah kekhasan yang dimiliki oleh setiap anggotanya, yang membedakannya dari kelompok lain.

Orang memerlukan identitas untuk dapat dianggap sebagai “seseorang” (*somebody*) yang mempunyai arti, dan bukan “bukan siapa-siapa” (*nobody*) yang tak punya arti sama-sekali. Orang yang memiliki kegemaran mengoleksi peranko, boneka, serangga, dan tanaman, misalnya, cenderung memberi perhatian terhadap perbedaan di antara koleksinya. Semakin perbedaan itu khas, semakin besar perhatian itu diberikan kepadanya. Kekhasan suatu kelompok masyarakat yang positif merupakan daya tarik perhatian dan potensi yang dapat menjadi dasar bagi kita untuk diperhitungkan oleh kelompok masyarakat yang lain. Jika bangsa Indonesia ingin diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain, identitas yang melekat pada bangsa ini haruslah yang bersifat positif. Identitas yang positif dapat diperoleh dengan upaya pembentukan bangsa. Jadi, identitas yang positif berdasarkan tata nilai yang diterima masyarakat dunia adalah sesuatu yang harus diupayakan.

## 2. Lokalitas dan Globalisasi

Keberadaan suatu entitas, terlebih-lebih makhluk hidup, di lokasi tertentu berakibat bahwa entitas itu harus berinteraksi dengan lingkungannya. Jika interaksi itu berjalan dengan baik, lokasi itu menjadi habitatnya. Makhluk hidup memerlukan habitat untuk hidup. Adaptasi itu juga akan membentuk

identitas. Suatu kelompok masyarakat yang menemukan habitatnya di daerah yang bertanah subur akan beradaptasi dengan lingkungannya dengan menjadi petani. Identitas masyarakat itu akan terbentuk dalam pergulatan hidupnya sebagai petani.

Jika di atas dikatakan bahwa habitat membentuk identitas, menghancurkan habitat atau membiarkan habitat menjadi hancur dapat mengikis identitas masyarakat yang tinggal di dalamnya. Pemusnahan habitat adalah proses bunuh diri, dalam arti menghapus identitas diri sehingga menjadi masyarakat tak penting (*nobody*). Dengan demikian, lokalitas adalah hal yang penting untuk tidak tercerabut dari habitatnya.

Sebagai makhluk berpikir, manusia mudah untuk adaptasi di mana pun. Hal itu memungkinkan manusia untuk siap hidup di berbagai lingkungan dan situasi. Namun, setinggi apa pun tingkat mobilitasnya, manusia cenderung hidup dengan nyaman di habitatnya.

Dewasa ini, kemajuan di berbagai bidang memungkinkan orang “bergaul” secara global. “Bergaul” di sini tidak hanya secara fisik bertemu dengan orang lain. Orang yang tinggal di daerah pedalaman yang sudah memiliki fasilitas berteknologi multimedia, dapat mengetahui apa yang terjadi pada kehidupan di tempat lain yang jauh dan bahkan mungkin tidak akan pernah terjangkau olehnya.

Kemajuan teknologi memungkinkan kelompok masyarakat mengembangkan perdagangan, pendidikan, dan budaya yang tidak sebatas lingkungan hidup asalnya. Bahkan, demi pemenuhan hasrat untuk lebih berkembang batas-batas itu memang harus ditembusnya sebelum orang lain “menyerbu” masuk. Artinya, suatu masyarakat dianggap berkembang jika sudah dapat keluar dari cangkang yang telah mematangkannya, seperti embrio ayam yang memecahkan cangkang telur karena siap menjadi anak ayam.

Keluar dari cangkang berarti siap mengglobal. Globalisasi membuat paradigma baru bagi kehidupan. Di sinilah letak persoalannya: jika batas-batas itu sudah disingkirkan, apakah kita mampu mengembangkan hidup kita, atau orang lain yang akan menguasai dunia kita? Apakah kita akan menjadi bangsa yang diperhitungkan, atau kita sekadar jadi penonton dan melakukan apa yang didiktekan orang lain?

### **3. Bahasa sebagai Identitas**

Di atas sudah disebutkan bahwa interaksi antara manusia dengan lingkungannya membentuk habitat. Habitat tidak hanya berupa struktur fisik lingkungan tempat mereka hidup karena hasil interaksi itu juga terefleksikan dalam bahasa. Dengan demikian, bahasa juga merupakan bagian dari lingkungan hidup yang dapat menjadi identitas penuturnya (bdk. Crystal 2000:36) Di Indonesia fungsi bahasa sebagai identitas juga tertuang pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 (untuk bahasa Indonesia) dan Politik Bahasa (untuk bahasa Indonesia dan bahasa daerah).

Dewasa ini sikap masyarakat bahasa di Indonesia terhadap bahasa ibunya sangat beragam. Ada yang dengan setia dan bangga berusaha melestarikan dan mengembangkan bahasa ibunya, ada yang merasa kehilangan karena tidak mampu mencegah proses kepunahannya, dan ada pula yang tidak peduli dan cenderung beralih ke bahasa yang lain (Dixon 1997:107—114, lihat juga, antara lain, Collins 2006). Berbagai sikap ini mengundang masalah. Ada kekhawatiran, jika bahasa daerah dikembangkan terlalu jauh, akan muncul bibit primordialisme yang dapat menjadi bahan bakar separatisme. Pada titik ekstrem yang lain, banyak kritik dilontarkan karena terjadi pengabaian terhadap kepunahan bahasa.

Di Indonesia ada ratusan bahasa lokal—istilah yang diperkenalkan oleh Grenoble dan Whaley (2006:15) ini digunakan di sini alih-alih bahasa daerah yang lebih berkonotasi politis. Dalam bahasa-bahasa itu terkandung banyak pikiran dan kesadaran penuturnya tentang dunianya. Dalam hal kosakata, misalnya, ada bahasa yang kaya akan kata yang mengacu ke macam-macam anak binatang, daun tumbuhan, buah kelapa dalam berbagai fase, dan cara membawa sesuatu dengan anggota badan. Bahasa yang lain kaya akan ungkapan tentang fenomena alam, seperti ombak, awan, salju, dan hujan. Bahasa yang lain lagi mendeskripsikan hubungan kekerabatan dengan sangat cermat.

### **4. Sumpah Pemuda sebagai Politik Keberagaman**

Penjajahan bangsa Barat di bumi Nusantara berlangsung lebih dari tiga abad. Selama masa itu, berbagai kalangan telah berupaya melakukan perlawanan untuk membebaskan diri dengan hasil yang boleh dikatakan tidak signifikan.

Kalangan yang melakukan perlawanan itu umumnya berasal dari lingkup lokal, bersifat eksklusif dan homogen. Artinya, mereka adalah kelompok yang memiliki lebih banyak kesamaan asal dan etnisitas, yang hampir pasti berarti juga kesamaan budaya, bahasa, dan bahkan agama. Baru setelah memasuki abad kedua puluh, keberagaman itu mulai dipikirkan untuk dikelola dalam rangka persatuan. Persatuan itu tidak hanya sebagai modal perjuangan berjangka pendek, yakni meraih kemerdekaan, tetapi juga bersifat visioner dalam rangka membangun bangsa besar ke depan.

Sumpah pertama, “Bertanah Air Satu: Tanah Air Indonesia”, merupakan landasan penting untuk menyatakan wilayah bagi bangsa baru yang merupakan gabungan berbagai kelompok etnis ini. Dengan menetapkan wilayah, bangsa Indonesia menjadi “bangsa bernegara” (*state nation*) yang kontras dengan “negara berbangsa” (*nation state*). Dalam bangsa bernegara, wilayah negara beserta batas-batasnya ditentukan lebih dahulu, baru kemudian diupayakan kesatuan budaya, termasuk bahasa, sebagai perekat bangsa (Ferguson 2006:17). Konsekuensi dari sumpah ini adalah bahwa setiap warga bangsa mempunyai hak untuk tinggal di mana pun dalam wilayah Tanah Air Indonesia. Mereka berhak menikmati kehidupan di daerah mana pun dalam wilayah itu kapan pun mereka mau.

Sumpah kedua, “Berbangsa Satu: Bangsa Indonesia”, meletakkan dasar-dasar pembangunan bangsa. Bangsa biasa didefinisikan sebagai ‘kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri’ (lihat KBBI edisi keempat, halaman 133). Banyak bangsa yang tidak memenuhi kriteria itu kecuali yang terakhir. Bangsa Amerika, misalnya, sangat majemuk untuk disebut memiliki kesamaan asal keturunan. Begitu pula bangsa Indonesia, jika dilihat pada masa itu, masih lebih banyak yang “merasakan” perbedaan daripada “menyadari” persamaan di antara kelompok etnis. Kajian bahwa sebagian besar penduduk Nusantara ini berasal dari rumpun yang sama belumlah menjadi sarana penyadaran. Oleh sebab itu, alih-alih bertolak dari kriteria keturunan yang sama, implikasi sumpah itu lebih kita pandang sebagai tekad bahwa bangsa ini mewarisi adat, bahasa, dan sejarah yang sama. Melalui kehidupan berbangsa, setiap warga dapat mewarisi unsur budaya dari berbagai kelompok etnis: orang Makassar dapat menikmati masakan Padang, orang Batak mahir menarikan tari Bali, orang

Banjar luwes mengenakan busana Jawa, atau orang Sasak piawai memainkan alat musik Papua.

Sumpah ketiga, “Menjunjung Bahasa Persatuan: Bahasa Indonesia”, adalah sarana yang paling efektif untuk menyatukan tanah air dan bangsa. Dengan bahasa yang dituturkan seantero Nusantara, hak setiap warga untuk menikmati kehidupan di bagian mana pun di republik ini dapat terpenuhi dengan baik. Juga dalam hal berbangsa, warisan unsur-unsur budaya yang memiliki potensi keberterimaan paling tinggi adalah bahasa. Pada saat orang sampai pada kenikmatan menyantap masakan, menarikan tari, mengenakan busana, atau memainkan alat musik dari etnis lain, sangat mungkin ia sudah mengenal lebih dulu kata *balado*, *kecak*, *kebaya*, dan *tifa*. Berbagai wacana sehari-hari pun kaya akan kosakata dari bahasa lokal. Bahkan tidak mengherankan bahwa hari demi hari semakin banyak orang yang juga menjadi penutur bahasa lokal lain.

Kekayaan kosakata lokal, jika disumbangkan ke kosakata bahasa Indonesia akan membawa hasil yang luar biasa. Pada saat ini desakan bahasa asing, taruhlah Inggris, terhadap pemakaian bahasa Indonesia sudah sangat kuat. Di samping masalah gengsi, orang biasanya berdalih bahwa bahasa Inggris lebih kaya sehingga dapat mengisi rumpang leksikal bahasa Indonesia. Namun, kita juga perlu belajar dari sejarah bahasa Inggris yang begitu terbuka bagi masuknya kosakata dari berbagai bahasa. Mungkin kosakata “asli”-nya tidak lebih dari sepuluh persen. Kita tidak berpretensi bahwa bahasa Indonesia masih “miskin” untuk mengungkapkan gagasan modern. Namun, dengan memperkaya diri dengan kosakata lokal, kita memiliki modal untuk memodernkan korpus bahasa Indonesia.

Gagasan ini bukanlah baru. Dulu tahap penciptaan atau pepadanan istilah asing lebih dahulu melalui pencarian bahan dari kosakata lokal. Jika hal itu sekarang dipandang tidak efisien, masalahnya terletak pada ketersediaan bahan yang siap pakai. Kita tidak memiliki korpus bahasa daerah yang mudah diakses sehingga pencipta mudah menyerah dan berpaling ke bahasa asing. Dengan perkembangan teknologi komputer yang pesat saat ini tidak ada alasan untuk mengatakan sulit melakukan hal itu.

## 5. Revitalisasi Bahasa Lokal

Isu kepunahan bahasa lokal atau bahasa ibu sudah merebak sejak pertengahan abad kedua puluh. Tanggal 21 Februari ditetapkan sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional oleh UNESCO, bahkan lembaga itu sudah menganjurkan pemakaian bahasa lokal sebagai medium pendidikan sejak 1951. Dengan memperingati Hari Bahasa Ibu diharapkan ada upaya serius di berbagai negara untuk melindungi bahasa-bahasa lokal dari kepunahan. Penetapan Hari Bahasa Ibu juga dipicu oleh keprihatinan atas penggunaan bahasa yang tidak dipahami oleh siswa sebagai pengantar di jenjang pendidikan dasar sehingga menghambat keberhasilan pencerapan materi. Di pihak yang lain, absennya penggunaan bahasa minoritas utamanya di dunia pendidikan dapat menggiring bahasa itu menuju kepunahan.

Sejumlah pakar di Indonesia yang mendukung anjuran pemakaian bahasa lokal sebagai bahasa pengantar di sekolah, sekurang-kurangnya untuk belajar literasi. Usul bahasa lokal sebagai bahasa pengantar pendidikan pernah dicanangkan oleh Mu'adz (2002). Implementasi usulan ini menyangkut dana yang tidak kecil walaupun mungkin dapat menghindarkan bahasa lokal dari ancaman kepunahan. Alih-alih, usulan Kaswanti Purwo (2006 dan 2009) tentang pendidikan bilingual agaknya lebih mudah di realisasikan. Sejauh ini, yang lebih lazim dilakukan adalah menjadikan bahasa lokal sebagai mata pelajaran yang sebetulnya merupakan solusi darurat. Pada praktiknya mata pelajaran itu sering menjadi beban bagi siswa untuk sekadar menghindari nilai merah sehingga pemerolehan bahasa tidak berjalan secara alamiah. Kalaupun bahasa lokal akan diajarkan sebagai muatan lokal proses pembelajaran harus menyenangkan. Di sini tidak hanya dituntut adanya guru yang mahir berbahasa tetapi juga mahir menyampaikan materi secara menyenangkan.

Kadar laju ke arah kepunahan sangat beragam dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Ada bahasa yang dalam hitungan belasan tahun ke depan dapat diprediksi punah, ada pula yang mungkin sampai puluhan tahun. Sekalipun demikian, banyak pemerhati budaya, khususnya bahasa, yang merisaukan hal itu seakan-akan kepunahan bahasa adalah keniscayaan.

Antisipasi yang biasa dilakukan untuk mengatasi kepunahan adalah upaya revitalisasi. Upaya ini harus melibatkan partisipasi banyak pihak, tidak bisa hanya pihak pemerintah atau para pembina bahasa. Revitalisasi juga tidak bisa hanya dengan memberlakukan kebijakan yang membuat orang merasa

terpaksa menggunakan bahasa itu karena keterpaksaan itu dapat berujung pada frustrasi yang justru menimbulkan antipati.

Revitalisasi memerlukan perencanaan yang matang dan implementasi yang mantap (bdk. Grenoble dan Whaley, 2006:26). Perencanaan yang matang mengandaikan adanya identifikasi masalah, pemecahan masalah yang dituangkan dalam bentuk program, koordinasi di antara pelaksana program, dan evaluasi bersama sebagai bagian perencanaan. Yang dimaksud dengan implementasi yang mantap adalah implementasi yang dilakukan dengan konsistensi yang tinggi, yang menyangkut komitmen pelaksana program dalam mengalokasikan anggaran, tenaga, dan waktu. Untuk itu sudah ada berbagai saran, antara lain datang dari Lauder (2006), Alwasilah (2010), Ruddyanto (2010), dan Saragih (2010).

Fungsi bahasa lokal sebagai sarana komunikasi di tingkat lokal tidak dengan sendirinya hanya untuk bertukar gagasan tentang topik-topik kedaerahan. Percakapan dua orang dari etnis yang sama di warung kopi bisa saja menyangkut hal-hal “modern” yang bisa diungkapkan dengan bahasa lokal. Kemampuan bahasa lokal menjalankan fungsi seperti itu dapat mencegah berpalingnya penutur asli ke bahasa yang lain. Bagaimanapun juga bahasa lokal memang perlu dipromosikan dan politik bahasa nasional yang selama ini membatasi fungsi bahasa lokal perlu ditinjau lagi (Ruddyanto, 2009).

Pemerolehan bahasa lokal secara alamiah harus didukung dengan pemajanan secara berlimpah. Jika siswa hanya terpajan pada bahasa lokal sewaktu diajarkan di kelas, setelah itu di luar tidak ada pemajanan sama sekali, pemerolehan itu akan berjalan sangat lambat karena apa yang diberikan di kelas akan segera dilupakan di luar kelas. Oleh sebab itu, perlu ada sumber pemerolehan bahasa yang lain. Salah satunya adalah pengadaan buku bacaan yang murah, menarik, dan memiliki keterbacaan yang tinggi. Bacaan itu juga bisa disediakan dalam bentuk media massa. Kamus yang sederhana dan mudah diperoleh dan digunakan akan melengkapi bacaan-bacaan itu.

Pendidikan informal juga perlu dikemas dengan bahasa lokal. Sarana pendidikan informal itu dapat digabungkan dengan sarana hiburan dan sarana penyebaran informasi. Program televisi, rubrik media massa cetak, mainan anak-anak, dan sebagainya perlu disajikan dalam bahasa lokal. Cerita rakyat

dan unsur-unsur budaya lain dapat dikembangkan menjadi cerita film, tontonan pentas, permainan, atau apa pun yang diperlukan dan digemari kaum muda.

Pemerintah perlu memperluas pemakaian bahasa lokal. Bahasa lokal perlu ditampilkan juga pada papan nama, petunjuk, dan rambu-rambu lain di tempat umum di samping bahasa Indonesia. Pemerintah juga perlu gencar menganjurkan dan memberi contoh untuk menggunakan bahasa lokal untuk nama kegiatan dan hajatan yang dilangsungkan di daerah. Undang-undang dan peraturan pemerintah yang menyangkut kepentingan orang banyak juga perlu diterjemahkan dalam bahasa lokal seperti yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai bahan pertimbangan untuk merevitalisasi bahasa lokal, berikut ini catatan Grenoble dan Whaley (2006) yang mengutip beberapa faktor yang oleh Kelompok *Ad Hoc* UNESCO dianggap menentukan vitalitas bahasa.

1. Pewarisan bahasa antargenerasi
2. Jumlah absolut penutur
3. Proporsi penutur dalam seluruh populasi
4. Kecenderungan dalam ranah bahasa yang ada
5. Respon terhadap ranah dan media baru
6. Materi untuk pendidikan bahasa dan literasi
7. Kebijakan bahasa oleh lembaga pemerintah termasuk status dan penggunaan resmi
8. Sikap anggota masyarakat terhadap bahasa mereka sendiri
9. Jumlah dan mutu dokumentasi

Transmisi atau pewarisan bahasa dapat terjadi jika generasi yang berikut merasa perlu untuk mempertahankan bahasa itu. Keperluan itu antara lain dimotivasi oleh alasan fragmatis, yaitu bahwa pemakaian bahasa itu memberikan keuntungan ekonomis, memudahkan transfer informasi (komunikasi), dan menumbuhkan rasa bangga. Keuntungan ekonomis dapat diperoleh jika kemahiran berbahasa lokal memberi jaminan pekerjaan untuk hidup. Kemudahan komunikasi dimungkinkan jika informasi yang akan ditransfer (gagasan, berita, perasaan, dan sebagainya) dapat diungkapkan dengan bentuk linguistik yang tersedia dalam bahasa itu. Bahasa lokal memiliki kosakata yang relatif lengkap untuk mengungkapkan konsep yang berkembang dalam budaya masyarakat penutur bahasa itu. Umumnya bahasa lokal “tidak

siap” atau “tidak disiapkan” untuk mengungkapkan konsep-konsep yang berasal dari luar budaya masyarakatnya. Kebanggaan berbahasa lokal umumnya tumbuh jika masyarakat penuturnya memiliki hal-hal yang membanggakan. Misalnya, produk budaya (kesenian, ekonomi, olahraga, pertanian, arsitektur, sistem religi, dan teknologi) sangat maju. Dalam banyak kasus di Indonesia kesenian dan sistem religi lebih menonjol dari bidang-bidang yang lain sehingga mereka yang bangga berbahasa lokal berasal dari kalangan seni (tradisional) dan agama.

Kecenderungan dalam ranah pemakaian bahasa yang ada juga dapat direncanakan dengan memperluas ruang pemakaian sesuai dengan politik bahasa, fungsi bahasa lokal tidak digunakan untuk bahasa pengantar di lembaga pendidikan formal dan di bidang administrasi pemerintahan. Sesungguhnya dua bidang ini sangat mendukung vitalitas bahasa sekalipun demikian bahasa lokal tetap berpeluang untuk menjadi bahasa pendukung di kedua ranah itu. Dalam banyak kasus bahasa lokal masih digunakan pada tingkat pendidikan awal dan dalam komunikasi antara pejabat pemerintahan dengan rakyatnya dalam situasi yang tidak terlalu formal.

Tidak terpakainya bahasa lokal di sekolah tidak berarti bahwa akses siswa ke bahasa itu terputus samasekali. Di banyak daerah bahasa lokal diajarkan sebagai mata pelajaran dengan demikian, untuk di bidang ini diperlukan buku ajar dan buku penunjang. Bahan-bahan tersebut dapat menjadi sumber pemerolehan bahasa. Bahan-bahan pendukung untuk pendidikan informal jauh lebih banyak lagi peluangnya.

Kebijakan bahasa juga dapat dibuat secara semerta. Banyak daerah yang sudah memiliki peraturan daerah yang dibuat oleh lembaga legislatif walaupun harus diakui banyak pula yang tidak efektif. Lembaga yang secara ideal terlibat di dalam kebijakan bahasa adalah pemerintah di daerah, lembaga kebahasaan, dan perguruan tinggi. Sekurang-kurangnya tiga lembaga inilah yang perlu berkoordinasi untuk membuat perencanaan bahasa dan sekaligus mendistribusi tugas dalam implementasinya.

Dokumentasi kebahasaan meliputi hasil kodifikasi bahasa itu seperti, kamus, tata bahasa, dan hasil-hasil penelitian tentang bahasa itu. Di Indonesia ada bahasa yang sudah lama menjadi objek kajian, tetapi ada juga yang hampir-hampir belum pernah memperoleh perhatian dari para bahasawan. Jumlah

dokumentasi yang berkualitas pun tidak merata. Dokumentasi kebahasaan ini dapat diperbanyak dengan kualitas yang memadai melalui kebijakan bahasa.

Faktor-faktor ini dapat dikondisikan, yang jika berhasil tentu juga akan menciptakan kondisi yang merupakan faktor-faktor lain bagi vitalitas bahasa. Jumlah penutur, misalnya, dapat terkondisikan jika pewarisan bahasa dapat berlangsung dengan baik. Tanggapan terhadap media dan ranah baru juga akan berkembang jika bahasa lokal dapat menjadi sarana ekspresi yang efektif. Demikian juga sikap penutur tentu saja akan positif terhadap bahasa lokal.

#### **6. Bahasa Indonesia dan Bahasa Lokal: Konstruksi Cakar Ayam**

Hubungan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa lokal sebagai bahasa daerah perlu dirumuskan ulang (Ruddyanto 2009). Pengembangan bahasa lokal sering dikhawatirkan oleh perencana bahasa akan menghambat pengembangan bahasa Indonesia, bahkan bisa “menuangkan minyak ke api” separatisme. Jika alasan kecurigaan itu benar, terlalu banyak masyarakat dwibahasawan di dunia ini yang potensial bermasalah. Namun, jika orang dapat melihat kedwibahasaan sebagai hal yang positif, potensi itu tentu juga dapat dicarikan upaya peredamannya. Minyak tidak akan membakar jika tidak ada api. Sebaliknya, api dapat membesar tidak hanya karena minyak.

Jika bahasa Indonesia dan bahasa lokal dapat dikembangkan secara serasi, hubungan antarbahasa di Indonesia dapat digambarkan sebagai konstruksi cakar ayam: bahasa lokal adalah kolom-kolom vertikal yang mencengkeram bumi, sedangkan bahasa Indonesia adalah kolom-kolom horizontal yang menautkan (penutur) bahasa lokal yang satu dengan yang lain. Kepunahan bahasa lokal harus dianggap kehilangan kolom penopang yang merugikan bahasa Indonesia.

Pengembangan bahasa Indonesia tidak perlu menjadi hambatan bagi pengembangan bahasa lokal dan sebaliknya. Hal ini sebenarnya sudah tecermin pada perubahan sikap yang tertuang dalam Politik Bahasa. Dalam Politik Bahasa 1975, kontribusi dalam pengembangan bahasa hanya dinyatakan dari bahasa lokal ke bahasa Indonesia. Sementara itu, pada pernyataan Politik Bahasa 2000, bahasa Indonesia diakui juga sebagai sumber pemer kaya bahasa

lokal. Kedwibahasaan membuka peluang untuk pemerayaan timbalik (*mutual*).

## 7. Penutup

Usulan ini diharapkan dapat menjawab persoalan tentang upaya pencarian identitas bangsa di tengah keragaman. Penghormatan atas perbedaan dan keberagaman harus bermuara pada pembentukan satu bangsa seperti yang dicita-citakan pendiri negara ini melalui Sumpah Pemuda. Proses persatuan itu tidak perlu menghilangkan identitas lokal, tetapi sebaliknya justru bangsa ini perlu mewarisi bersama identitas-identitas yang menjunjung kesamaan nilai sebagai identitas bangsa.

## Daftar Pustaka

- Alwasilah, A.C. 2010. "Pemertahanan Bahasa Ibu dan Pendidikan". Makalah yang disampaikan pada Seminar Internasional Hari Bahasa Ibu" di Bandung, 19—20 Februari.
- Alwi, Hasan dan Dendy Sugono, 2000. *Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Collins, J.T. 2006. "Bahasa Daerah yang Terancam Punah: Tinjauan di Maluku dan Kalimantan". Makalah yang disajikan dalam Seminar Pelestarian Bahasa Daerah, Pusat Bahasa, Jakarta, 9 Desember.
- Crystal, D. 2000. *Language Death*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dixon, R.M.W. 1997. *The Rise and Fall of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Grenoble, Lenore A. dan Lindsay J. Whaley. 2006. *Saving Languages: An Introduction to Language Revitalization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kaswanti Purwo, Bambang. 2009. "Pengembangan Bahasa Daerah: Kekuatan Politik dan Kepentingan Pendidikan". Dalam Subagyo, P.A. dan Sudartomo Macaryus (ed.). *Peneroka Hakikat Bahasa*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma. Hlm. 203—218.

- Lauder, M.R.M.T. 2006. "Revitalisasi Bahasa Minoritas" Makalah yang disajikan dalam Seminar Pelestarian Bahasa Daerah, Pusat Bahasa, Jakarta, 9 Desember.
- Mu'adz, Husni. 2002. "Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pengantar dan sebagai Mata Pelajaran dalam Sistem Pendidikan" dalam Hasan Alwi *et al.* (ed.). *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Ruddyanto, C. 2009. "Perencanaan Bahasa Bali: Sebuah Kasus Penanganan Bahasa Daerah". Dalam *Peneroka Hakikat Bahasa* disunting oleh P. Ari Subagyo. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.
- Ruddyanto, C. 2010. "Revitalisasi Bahasa Daerah: Beberapa Alternatif untuk Mengantisipasi Kepunahan". Makalah yang disampaikan pada Seminar Internasional Hari Bahasa Ibu" di Bandung, 19—20 Februari.
- Saragih, A. 2010. "Revitalisasi Bahasa Daerah: dalam Konteks Sosial Bahasa Indonesia" Makalah yang disampaikan pada Seminar Internasional Hari Bahasa Ibu" di Bandung, 19—20 Februari.

✓ **Pedagogi Pemberdayaan Identiti dan Multikulturalisme:  
Pentingnya Paduan Sastera dan Sains Sosial  
dalam Menghadapi Era Globalisasi\***

Azhar Ibrahim Alwee  
Universiti Nasional Singapura

“In a changing society like ours only an *education for change* can help. The latter consists in an undogmatic training of the mind, which enables the person not to be driven by the current of changing events but to rise above them.....There must be an informed mind which can discriminate between those genuine elements in the tradition which are still alive and make for emotional stability. And those human attitudes and institutions on the other side which decay because they have lost function and meaning in a changed society. In our ignorance of the dehumanizing effects of industrial civilization upon the mind which allows the growth of that void into which the witch-doctors of propaganda pour their poison. ...”

Karl Mannheim

**ABSTRAK**

Makalah ini cuba merungkai persoalan pepaduan sastera manusiawi dengan sains sosial kritis guna memperkukuh pemberdayaan masyarakat sewaktu berhadapan dengan globalisasi tanpa ada rasa kekerdilan pada partikular/lokalnya, dan ini dapat pula digerakkan dalam kurikulum multikultural. Dalam hal ini pembelajaran sastera yang ditampung oleh analisis sains sosial kritis dan berpedagogi literasi kritis amat penting dalam perancangan pendidikan dan kebudayaan kita. Persoalan globalisasi hari ini mengajak kita untuk

berfikir dengan lebih kritis, tapi tanpa defensif, agar jangan sampai ada satu model yang justru dipaksakan sebagai global sehingga semua mesti akur. Ertinya kelunakan globalisasi dengan laungan keterbukaan jangan sampai pula menutup hak lokal/partikular. Kebersamaan dalam globalisasi makanya mengundang gagasan multikulturalisme dengan menempatkan identitas politik kelompok masing-masing sebagai hak kemanusiaan berkewujudan sama, selagi ia tidak menerbitkan sikap eksklusivisme kelompok dan keangkuhan imperialisme kebudayaan yang menyelinap ke atas budaya lokal, semuanya atas nama globalisasi maupun yang menyusup dalam bentuk hegemoni. Makanya usulan kurikulum multikulturalisme, yang diterap dalam pembelajaran sastera, bisa menjadi salah satu pemberdayaan identitas lokal yang ampuh.

### Pendahuluan

Dalam bahasa, sastera dan budaya, identiti kita tercermin, terakam, malah terbentuk, dalam proses bersilang tambahan, gantian, negosiasi dan terus *menjadi* (*becoming*). Dalam tradisi kesusasteraan kita contohnya, persoalan identiti dapat kita kesan, sama ada sang penulis membicarakan identiti yang diidamkan, identiti yang disanggah, ataupun persoalan identiti yang mahu dipaparkan itu menjadi berkecelaru dan kusut. Walaubagaimanapun sastera sebagai bahan dan wadah pembelajaran adalah *locus* terbaik untuk membicarakan persoalan identiti, khasnya dalam konteks idea multikulturalisme yang digagaskan.

Multikulturalisme sebagai suatu gagasan kebudayaan sayugia disambut, diiktiraf dan dilaksanakan. Bidang pendidikan adalah tempat penyemaianya yang terbaik manakala bidang sastera adalah ranah sesuai untuk membicarakan soal multikulturalisme. Dalam hal ini, persoalan bagaimana sastera diajar dan dipelajari perlu kita semak kembali. Umumnya pembelajaran sastera memerlukan nafas baru, baik dalam pendekatan mengajar (pedagogi) maupun pengisian dan jangkauannya (kurikulum).

Di sinilah tema identiti dan politik identiti baik dikedepankan. Sekiranya pembelajaran sastera hanya terus berlegar dalam pendekatan kajian formalisme yang membeku, ataupun pascamodenisme yang berjenis celaru, sastera tidak akan dapat dimanfaatkan untuk menyegarkan semangat kritis dan kreatif yang membumi, yang amat penting dalam konteks ghairah globalisasi.<sup>1</sup> Jelasnya jika pendekatan formalistik masih mendominasi dalam pembelajaran sastera, persoalan multikulturalisme dan identiti serta kesadaran terhadap keterkaitan universal-partikular tidak dapat dibicarakan. Sayangnya perkara ini jarang yang mahu dipermasalahkan sehingga pemanfaatan daripada studi kultural dan literasi kritis (*cultural studies and critical literacy*) masih belum terjangkau.<sup>2</sup>

### **Makna Pemberdayaan**

Pemberdayaan bererti mengiktiraf dan memberikan suara, kuasa, semangat dan keyakinan serta harga diri kepada individu dan kelompok tertentu dalam menanggapi dan menghadapi cabaran kehidupan ini. Ianya bukan setakat suntikan dan seruan dari luar saja, melainkan juga respons dan impuls dari dalam diri seseorang dan sesuatu kelompok kolektif. Pemberdayaan bermula dengan kesedaran akan lingkungan yang didiami dan yang dihadapi itu secara konkrit dalam kehidupan seharian. Pemberdayaan menjadi kukuh apabila kesedaran tadi menjurus kepada pencerakinan sebab musabab akan perkara/ isu yang berbangkit, menghuraikan dan menyarankan jalan keluar.

Lain perkataan, pemberdayaan terus terpenuh maknanya apabila keprihatinan, pemerhatian, pengupasan itu berjaya menguatkan terus kesedaran serta memacu tindakan konkrit bertolak daripada kejelasan pemikiran yang merungkai dan menyarankan jalan keluar akan isu yang dihadapi itu. pemberdayaan Ianya merangkumi refleksi dan aksi disegandingkan dan saling memperkukuhkan antara kedua-duanya. Menjadi kritis itu sesungguhnya jangan disamakan dengan pemberdayaan. Kritis mungkin saja di peringkat teori atau teks. Pemberdayaan bererti kekuatan teori dan kesanggupan bertindak maupun intervensi guna merubah dan memperbaiki sesuatu yang seharusnya tidak ada sebab berlangsung dalam masyarakat dan negara.<sup>3</sup>

## Sastera dan Identiti

Kesedaran dan keprihatinan terhadap persoalan identiti menjadi fokus banyak masyarakat membangun. Identiti setiap bangsa atau kelompok itu tidak pernah wujud dalam vakum. Sebaliknya ianya dikondisi oleh sejarah, ideologi semasa, pandangan dunia dan kepentingan tertentu. Sastera yang sering dianggap sebagai cerminan kepada sesuatu masyarakat itu, bisa juga menyingkap sedikit sebanyak tentang persoalan identiti yang dihadapi dalam masyarakat, termasuk pada diri sang penulis itu sendiri, yang juga menjadi ahli masyarakat tersebut.

Identiti yang terpapar dalam sastera tentunya tidak semua yang baik dan relevan walaupun kita mau mengangkatnya sebagai suatu yang jati atau otentik. Baik sastera dalam yang dikanon, atau sengaja dipinggirkan kita dapat ragaman identiti yang mahu diketengahkan. Ada identiti yang mahu dijulang, ada yang mahu ia diulang, ada yang mahu ianya disanggah, ada yang mahu ianya ditegah.

Mengenal lanskap sastera yang terkandung dalamnya cerminan dan persoalan identiti, terus mengajak kita berfikir bagaimana pula dapat kita memanfaatkan renungan kita dalam soal ini. Yang penting dapat kita kenalpasti bahwa: Adakalanya sastera bisa merakam suatu krisis identiti. Adakalanya ianya memuja suatu identiti tertentu. Adakalanya ia mengecam identiti-identiti yang lain. Adakalanya kita mengesani kegusaran pada identiti tertentu selain ada pula yang mengusul identiti baru yang diyakini sebagai yang paling otentik.

Dengan ini, harusnya dapat kita bedakan daripada laungan yang mengatakan bahwa sastera, bahasa dan agama kita sebagai tunjang identiti. Itu sering kita dengar dalam laungan nasionalis terdahulu. Tentunya kita setuju. Tapi dengan peredaran dan cabaran semasa, kita harus lebih cermati soal identiti itu. Kalau identiti itu bersifat statik dan mutlak ianya adalah penjara yang akan melahirkan krisis identiti yang lebih parah di saat lingkungan sosial, politik dan ekonomi bergerak dan berkembang. Soalnya sekarang identiti apa yang mahu kita pupuk dan bangunkan.

Sebelum membicarakan soal sastra dan pemberdayaan identiti, sebaiknya kita mengupas sedikit tiga perkara berikut: (a) nasionalisme dan identiti, (b) budaya dalam era globalisasi, dan (c) memaknakan multikulturalisme. Perbincangan ini penting sebagai latar kepada perbincang tentang pemberdayaan identiti dalam era globalisasi yang mengundang kita memikirkan dengan serius persoalan politik identiti, multikulturalisme dan identiti nasional.

### a. Nasionalisme dan Identiti Nasional

Golongan nasionalis yang etno-cauvinis, kerana dek asyik mengklaim keistemewaan kepribumian/kesukuan etnik, sehingga mereka leka sampai menghalalkan pula prejudis dan pembencian terhadap kelompok etnik yang lain, dan menuntut dasar monokulturalisme sebagai dasar kebudayaan negara. Banyak negara membangun selepas merdeka mengamalkan dasar ini, dan kesannya amat parah. Malah, pemahaman kita tentang identiti nasional sebaiknya jangan kita pandang sebagai monumen budaya, melainkan ianya sebagai *“a living set of relations that must be constantly engaged and struggled over”*<sup>4</sup> manakala *“the vision of national identity steeped in a shared vision of social justice and a respect for cultural differences.”*<sup>5</sup> Makanya harus selalu kita beringat bahwa di saat kita mahu memupuk budaya nasional, yang benar-benar inklusif, usahlah pula kita menidakkan hak kelompok yang lain dalam negara yang sama itu. Sepertimana diingatkan Fanon:

“A national culture is not a folklore, nor an abstract populism that believes it can discover the people’s true nature. It is not made up of the inert dregs of gratuitous actions, that is to say actions which are less and less attached to the ever-present reality of the people. A national culture is the whole body of efforts made by a people in the sphere of thought to describe, justify, and praise the action through which that people has created itself and keep itself in existence. A national culture in underdeveloped countries should

therefore take its place at the very heart of the struggle for freedom which these countries are carrying on.”<sup>6</sup>

Sebenarnya dalam membicarakan globalisasi, perkara nasionalisme harus kita perhatikan sama. Nasionalisme itu penting dalam perkembangan masyarakat membangun dalam fasa sejarahnya yang tertentu. Tapi dalam era pasca kemerdekaan, menurut Fanon, para pejuang nasionalis harus memastikan “*a rapid step must be taken from national consciousness to political and social consciousness.*”<sup>7</sup> Tambah beliau, “*if nationalism is not made explicit, if it is not enriched and deepened by a very rapid transformation into a consciousness of social and political needs, in other words into humanism, it leads up a blind alley.*”<sup>8</sup> Ertinya gagasan nasionalisme yang kita pegang harus jangan berhujung pada pengghetoan kelompok kita sendiri dalam warga kemanusiaan yang lebih besar. Di sini juga perlunya kita diingatkan pada keterbatasan nasionalisme sebagaimana yang pernah disinggung Edward Said. Menurut beliau:

“Nationalism is the philosophy of identity made into a collectively organized passion. For those of us just emerging from marginality and presecution, nationalism is necessary thing: a long-deferred and –denied identity needs to come out into the open and take its place among other human identities. But that is only the first step. To make all or even most of education subservient to this goal is to limit human horizons without either intellectual or, I would argue, political warrant. To assume that the ends of education are best advanced by focusing principally on our own separateness, our own ethnic identity, culture, and traditions ironically places us where as subaltern, inferior, or lesser races we had been placed by the nineteenth-century racial theory, unable to share in the general riches of human culture.”<sup>9</sup>

Apa yang disebut Said adalah dilemma dalam mana jua masyarakat, khasnya dalam mengatur pendidikan yang dapat mengimbangi antara keperluan kesatuan universal dan keharusan kepelbagaian setempat. Ertinya, identiti

nasional/lokal dalam arus cabaran globalisasi bisa merespons dalam dua segi. Pertama identiti nasional/lokal bisa terus terpinggir, dan hanya menjadi seperti 'hiasan' aja, atau budaya nasional melalui proses terperusuk ke dalam kerana adanya sifat defensif terhadap globalisasi, disebabkan ianya digerakkan oleh sejenis nasionalisme sayap kanan yang tertutup. Di tempat kita, situasi yang pertama itu agak membimbangkan.

Dalam membicarakan multikulturalisme, kita tidak dapat memisahkan persoalan nasionalisme. Malah dalam era globalisasi, nasionalisme itu sendiri menyentuhkan kehadirannya dalam dalam wacana kebudayaan maupun lapangan pendidikan. Masalah ini dirumitkan oleh sejenis nasionalisme yang timbul, yakni yang bersifat eksklusivis, sempit, otoritarian dan juga cenderung xenophobia. Tapi ada juga nasionalisme yang berwajah terbuka dan inklusif, walaupun tidak keseluruhannya sempurna. Yang penting kita perlukan nasional yang mengarah kepada pembentukan identiti nasional yang inklusif yang disuguhkan oleh kemajmukan identiti budaya yang pelbagai. Yang dimaksudkan ini pernah dicirikan oleh Giroux:

"A progressive notion of nationalism requires the coordination of a democratic politics of difference and multiculturalism with a notion of border crossing, diasporic politics, and postnationalism that recognizes the transits, flows, and social formations being produced on a global scale. It is precisely in the interaction of the national and global that a borderline space exists for generating new forms of transnational literacy, social relations, and cultural identities that expand the meaning of democratic citizenship beyond national borders."<sup>10</sup>

## **b. Budaya dalam Era Globalisasi**

Hari ini globalisasi banyak diperkatakan. Sambutan yang gah sayangnya tidak diseimbangkan dengan renungan yang kritis. Baik ahli politik, segolongan ahli akademik, wartawan dan lainnya cenderung melihat globalisasi sebagai

jalan selamat dan jalan termaju. Malah boleh kita katakan ada semacam *ghairah* globalisasi, yang membayangkan adanya satu tanda minda tertawan (*captive mind*)<sup>11</sup> yang senang menyambut apa jua yang 'global' (secara spesifik Euro-Amerika) tapi kerdil untuk mengiktiraf maupun memperdulikan yang lokal itu sendiri.

Apakah itu yang dimaksudkan sebagai globalisasi budaya yang sering dikatakan hari ini, malah disambut dengan *ghairah* oleh sesetengah sebagai "dunia makin kecil" atau "dunia tanpa sempadan." Tapi keterkaitan bagaimana, dan apakah yang global itu sebenarnya? Dalam hal ini sambutan *ghairah* seperti itu baik kita seimbangkan dengan pandangan kritis yang mana hakikatnya sukar kita nafikan. Pemikir Katolik dari Amerika Latin, Jose Comblin tegas mengaitkan globalisasi ini dengan kuasa ekonomi neo-liberal yang mendominasi dunia hari ini. Menurut beliau:

"The economic power dominating the market has many ways to control culture itself. Whoever dominates the form, dominates the content. People speak of globalization of culture; it is an extension of the globalization of economy. Today's world culture is not something new; it is not a new creation inherently universal, superior to all particular cultures. To this day there has never been a universal culture in the sense of an expression of human being as universal. Nor has there been a universal culture in the sense of a cultural merging fashioned by combining all particular cultures. Globalized culture is a particular culture: North American culture."<sup>12</sup>

Ternyata bila banyak sambutan diberikan kepada globalisasi, rupanya terselindung di sebalik itu ialah *satu* paradigma budaya *saja* yang layak menjadi global. Yang konvensional dan standard itu hanya datang dari lingkungan Euro-Amerika, manakala yang lain hanya layak jenamanya sebagai "etnik" atau 'lokal'. Inilah sejenis pencerobohan kultural yang harus kita waspadai, yakni ianya suatu budaya atau unsur luar yang memaksakan cara kita melihat dan memahami dunia ini. Ini menurut Freire adalah *cultural invasion*, yakni "the

*penetration of the invaders in the context of the invaded, without respecting their potentiality to be, imposing their view of the world, breaking their creativity, and inhibiting the expansion of the invaded people.*"<sup>13</sup>

Salah satu kesan daripada menderunya ombak globalisasi ini ialah terjadinya peminggiran budaya setempat atas nama budaya 'nasional', 'metropolitan', 'internasional' yang dianggap lebih canggih dan universal. Budaya lokal terpinggir menjadi *folklore* sahaja. Singkatnya, kalau ada yang terus ghairah menjulang globalisasi, makanya terpanggil sesetengah daripada kita yang mesti menjelaskan bahwa globalisasi itu usahlah ditanggapi muluk-muluk tetapi mesti difahami seluk-beluknya, yakni kesan negatif kepada kita.

Persoalan globalisasi hari ini mengajak kita untuk berfikir dengan lebih kritis, tapi tanpa defensif, agar jangan sampai ada satu model yang justru dipaksakan sebagai global sehingga semua mesti akur. Ertinya kelunakan globalisasi dengan laungan keterbukaan jangan sampai pula menutup hak lokal/partikular. Kewaspadaan ini bukanlah suatu ketakutan pada globalisasi, melainkan memastikan jangan sampai globalisasi menjadi lanjutan imperialisme budaya, dan globalisasi yang menafikan keberadaan dimensi lokal, malah meminggirkannya, adalah *gejojohlisasi*. Yang dipermasalahkan di sini ialah globalisasi neoliberal yang ternyata hanya menguntungkan satu pihak tetapi menggigit pada pihak yang lain sehingga menafikan hak dan kebajikan mereka.<sup>14</sup> Tapi mengkritik globalisme ini jangan juga sampai menelur sikap xenophobia terhadap orang luar. Cabaran globalisasi harus kita berdepan untuk menanganinya, sedang dimensinya yang baik kita sambut, tapi yang negatif harus kita tepis.

Nah di sini apabila kita mendengar sambutan dan keriuhan pada budaya global, maka kita harus berhati-hati. Yakni jangan sampai budaya global itu memaksakan kepada kita semua, bukan saja cara kita berpakaian, makan, minum dan segala, tetapi juga cara kita berfikir dan menentukan arah pandang dan tujuan kita. Di sinilah penegasan pada multikulturalisme itu penting.

### c. Memaknakan Multikulturalisme

Antara perkara yang timbul dalam era globalisasi ini ialah keperluan multikulturalisme yang menyambut kepelbagaian dan kerencaman budaya, tapi juga sebagai sanggahan atau benteng untuk menangkis deruan ombak budaya luar yang dilabekan sebagai budaya global, yang tidak lain menunjukkan ciri imperialisme budaya. Pertama harus kita waspadaai multikulturalisme yang *official*. Darihal mendukung pluralitas dan menjaga keharmonian suku, ras dan agama. Ianya bersifat *celebratory* daripada *cerebral*, dan hanya tergerak kerana adanya kepentingan politik tertentu. Kedua ialah nasionalisme mundur yang mengisbatkan monokulturalisme, secara terang atau secara halus, manakala realitas multikulturalisme diketepikan langsung, atau hanya termanifestasi pada keperluan politik dalam masa- masa tertentu. Dalam nasionalisme mundur hanya ada satu budaya saja yang unggul dan berhak diangkat.

Soal multikulturalisme biarpun agak baru sebagai gagasan konsep sosial dan ilmiah, benih awalnya sudah sekian lama bersama kita, walaupun ianya tidak dikonkritnya dan tidak dirancang. Hari ini multikulturalisme adalah hakikat yang tak bisa dinafi ataupun ditutupi. Rata-rata kita hari ini tidak ada masalah untuk menanggapi dan menerima multikulturalisme, cuma yang harus kita perhatikan ialah apakah jenis multikulturalisme apa yang kita mahu.

Memaknakan multikulturalisme ialah dengan memastikan perbicangannya tidak berakhir pada teori-teori yang menyenangkan hati saja. Mengikhtirafnya sekaligus mengundang mempraktiskannya, selain mengenalpasti rintangan terhadap multikulturalisme itu sendiri. Dalam konteks kita, multukulturalisme bukan setakat memberi ruang kepada yang kelompok ras atau suku-suku etnik yang lain melain ia juga harus memastikan tiada hegemoni budaya dari satu golongan dominan ke atas yang lain. Sekadar mengikhtiraf kepelbagaian pluralitis belum tentu dapat memastikan bahwa setiap budaya itu bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini membawa kita kepada persoalan pemberdayaan budaya agar jangan terjadi semacam hierarki budaya, yang memandang sepi satu budaya lain, dan meletakkan dirinya sendiri di atas.

Persoalan multikulturalisme seharusnya mengajak kita kepada persoalan pemberdayaan dan ini memerlukan dan menyampaikan ke arah pembebasan. Pandangan Freire dalam hal ini, berkenaan *aksi budaya untuk pembebasan ( cultural action for freedom )* amat relevan, yang beliau anggap sebagai proses pendidikan di mana:

“a group of people, through dialogue, come to realize the concrete circumstances in which they exist, the reasons for these circumstances, and the possible solution for them. In order for this to be authentic action, the participants must be free to create the problems or the curriculum along with the teacher.”<sup>15</sup>

Dalam pembelajaran sastra soal pluralitas kanon adalah penting, sama pentingnya dengan mengangkat tema pluralisme dan multikulturalisme sebagai tema pembelajaran sastra. Juga dalam multikulturalisme harus dapat menyuguhkan makna dan keperluan pluralisme yang sensitif pada pluralitas kepercayaan dan jalan spiritualitas, bukan saja keragaman budaya tapi kebersamaan kita kepada mereka yang bukan daripada status sosial dan ekonomi kita, yakni kelompok yang terpinggir. Keberpihakan kita kepada golongan inilah antara yang memberikan makna pada gagasan multikulturalisme itu sendiri.

### **Pemberdayaan Identiti Menerusi Pendidikan Sastra**

Mempersiapkan anak bangsa kita dengan budaya yang transformatif adalah menjadi tugas pendidikan hari ini. Pendidikan sastra budaya harus dirancang yang dapat mengidentifikasikan dan mengapresiasi budaya mereka sendiri, selain transformatif sifatnya, dan peka akan lingkungan lokal dan daerah, sebelum kita ghairah menyebut dan memeluk globalisasi. Kesedaran kritis ini boleh disalurkan dalam bentuk kajian sains sosial yang kritis serta pendidikan sastra yang faham akan kesedaran kritisisme untuk pencerahan sosial, pemberdayaan masyarakat dan selalu berpihakan kepada golongan yang terpinggir dan terlupakan. <sup>16</sup>

Menurut Raymond William sastra itu kritikal sifatnya kerana ianya membawa para pembaca kepada tingkat kesedaran berkenaan struktur dan hubungan yang berlangsung dalam sesebuah masyarakat.<sup>17</sup> Bagi Ngugi O' Thiongo: "*A novel, or any narrative, may create a situation in which people are debating the very issues forbidden in real life by the state. The narrative in its very existence, and in the voices represented within it, are actually breaking the code of silence.*"<sup>18</sup>

### Ngugi wa Thiong'o,

*Penpoints, Gunpoints and Dreams: Towards a Critical Theory of the Arts and the State in*

*Africa.*

Oxford

: Clarendon Press, 1998 ),

h. 27

Makanya sastra yang mahu diajarkan tentunya harus memberikan kesadaran kritis, sehingga membawa keberdayaan untuk melestarikan praxis, bukan penelitian sastra yang bersifat borjuis pembacaannya, yang berasyik dalam taman-taman sastra dan estetikanya, sehingga alpa akan duri dan ranjau yang berada di dalam dan di luar taman sastra itu. Dengan itu harus pula kita fikirkan apakah dan bagaimanakah sastra itu harus diajar? Ini mengajak kita memimikirkan persoalan-persoalan berikut, yang dikemukakan oleh Ngugi: "*What is the philosophy underlying it? What are the premises and guidelines? What and whose social vision is it serving? What, then, is the sort of literature we should be teaching in our schools?*"<sup>19</sup>

Inilah harus menjadi persoalan besar yang harus ditanggapi dalam pengubalan pedagogi dan kurikulum sastra hari ini. Makanya pemilihan sastra dan apa yang sayugia diajar harus memperkirakan segi-segi berikut

dengan harapan membangunkan pemikiran kritis di kalangan pelajar kita. Pertama ialah sastera yang tumbuh dari negara atau rantau kebudayaan itu sendiri. Kedua ialah sastera dari rantau-rantau lain seperti Asia, Latin Amerika dan Afrika. Ketiga sastera dari Eropah dan ceruk rantau yang lain yang dipilih berdasarkan *“relevance to our struggles for life and against inhibitive social structures.”*<sup>20</sup> Ini bererti sastera yang mahu kita ajarkan itu harus *“defeat defeatist propaganda from our enemies or from within our ranks. It should help us to return to the native land among the masses if the working people to build a self-reliant [country] free from external and internal repression and exploitation.”*<sup>21</sup>

Sesungguhnya sastera yang realis dan berkomited aliran kemasyarakatannya akan dapat menjana kesedaran untuk bebas daripada apa jua cengkaman yang membelenggu kemanusiaan. Itulah yang pernah ditegaskan Mochtar Lubis berkenaan sastera yang dapat “menumbuhkan benih pemikiran dan kesedaran serta memahami kondisi manusia dan masyarakatnya” Tambah beliau:

“Untuk ini dapat menjadi kenyataan, buku (sastera) mesti relevan pada keadaan kehidupan manusia dan masyarakat itu tadi. Dan ianya harus dapat menarik perhatian pembaca menerusi kekuatan deskriptifnya dan keteguhan watak-wataknya. Ianya harus memiliki apa yang disebut sebagai “kekuasaan memindahkan” [*transferring power*] para pembaca dari pada keadaan hidupnya kepada keadaan kehidupan yang telah diciptakan kembali oleh sang penulis dalam novel, cerpen dan puisinya.”<sup>22</sup>

Penulisan karya yang baik bukanlah ditulis dari kacamata menara gading yang tinggi, atau dari salon intelektual yang eksklusif, jauh lagi suka menggendangkan slogan (dengan agenda politik) itu dan ini. Karya yang baik adalah berpaksikan nilai kemanusiaan yang harus diakur oleh semua, sehingga si penulis itu “dapat membangunkan kepekaan kepada masyarakatnya sendiri...memiliki dan menyemai nurani sosial dan nurani kemanusiaanya

sendiri.” Di sinilah letaknya persoalan *pemihakan* yang harus ada pada kedua-dua sasterawan dan khalayak yang bijak menilaikan sastera.

Sesungguhnya, keprihatinan menelaah ilmu kemanusiaan dan ketajaman analisis dari sains sosial, adalah suatu upaya yang dapat menyemai kedalaman intelektual yang akan membantu kita peka akan persekitaran sosialnya. Dalam telaah/kritikan sastera, sebaiknya kita melihat teks sebagai lapangan yang dinamik, dan bukan pula longgokan kata-kata yang statis. Dengan penerapan teori sains sosial kritis yang bersedia untuk mengupas persoalan hambatan ideologi berkepentingan, keasyikkan utopia, keterasingan manusia, diskriminasi dan prejudis, patologi massa dan narsisme dan sebagainya. Maka kalau ini berlangsung barulah kita menyaksikan *critical posture* tatkala kita menelaah atau membaca karya sastera. Menelaah sastera adalah upaya kritis. Tapi kritis teks sahaja tidak akan membawa kita ke mana. Sebaliknya, pembacaan yang kritis itu sayugia, *“life-enhancing and constitutively opposed to every form of tyranny, domination, and abuse; its social goals are non-coercive knowledge produced in the interests of human freedom.”*<sup>23</sup>

### **Pedagogi Kritis dan Pembelajaran Sastra**

Sastera sebagai cabang humaniora adalah ranah pendidikan yang bisa menumbuhkan sikap dan semangat kritis dan perspektif pembebasan selagi ia dipadukan oleh imbuhan diagnostik dari sains sosial yang humanistik.<sup>24</sup> Tapi satu lagi pendekatan yang jarang diterapkan ialah wacana pedagogi kritis yang digagaskan oleh Paulo Freire, seorang ahli pedagogi kritis yang tersohor. Beliau mencirikan beberapa telaah yang berguna dalam pedagogi kritis. Antaranya ialah si pembaca itu tadi mengambil peranan sebagai subjek sesuatu perkara yang berlaku atau yang diperkatakan itu. Bagi Freire:

“Its impossible to study seriously if the reader faces a text as though magnetized by the author’s word, mesmerized by a magical force; if the reader behaves passively and becomes “domesticated,” trying only to memorize the author’s ideas; if the reader lets himself or

herself be “invaded” by what the author affirms; if the reader is transformed into a “vessel” filled by extracts from an internalized text.”<sup>25</sup>

Seharusnya, sambung Freire, tatkala kita meneliti teks, kita fahamkan bahawa menjadilah tugas kita untuk merespon sekritis mungkin, bukan setakat mengkonsumsi teks secara pasif:

“Seriously studying a text calls for an analysis of the study of the one who, through studying, wrote it. It requires an understanding of the sociological-historical conditioning of knowledge. And it requires an investigation of the content under study and of other dimensions of knowledge. Studying is a form of reinventing, re-creating, rewriting; and this is a subject’s, not an object’s, task. Further, with this approach, a reader cannot separate herself or himself from the text because she or he would be renouncing a critical attitude toward the text.”<sup>26</sup>

Banyak lagi dari perspektif literasi kritis yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran sastra yang kemudian dapat mengupas persoalan genting yang dihadapi dalam persekitaran yang semakin mencabar.<sup>27</sup> Tentunya bidang dan tahapan perancangan pedagogi dan kurikulum bisa kita huraikan di lain kesempatan, sekadar mengingatkan bahwa dalam pendidikan berperspektif multikulturalisme, disaat kita menyambut kepelbagaian dan kemajmukan ini bukan bererti masing-masing kelompok secara eksklusif berkubu dalam ranah etnik, bahasa dan budayanya masing-masing, melainkan bergerak ke arah apa yang disebut Giroux sebagai sebahagian daripada wacana etika yang menyumbang ke arah “*a viable notion of democratic life.*” Beliau menjelaskan, dan ini amat penting kita renungkan, khususnya di kalangan para pendidik:

“What educators need is a pedagogy that redefines national identity not through a promordial nation of ethnicity or a monolithic conception of culture, but as part of postmodern politics of cultural difference in which identities are constantly being negotiated and

reinvented within complex and contradictory notions of national belonging.”<sup>28</sup>

Makanya dalam konteks masyarakat kita yang majmuk, identiti nasional yang inklusif bisa berjalan sama dengan multikulturalisme. Ini tidak mustahil selagi kita berani berhadapan dengan nasionalisme sayap kanan yang memperjuangkan kuasa etnik dan keagamaan tertentu secara eksklusif. Keistimewaan pada pedagogi multikulturalisme ialah ianya akur pada pedagogi keberlainan (*pedagogy of difference*), yang bertitik tolak pada kewarasan etika, keadilan sosial dan etos demokrasi. Penjelasan Giroux mengenai pedagogi keberlainan baik diperturunkan di sini, kerana baginya pedagogi ini:

“offers opportunities for students to be border crossers: as border crossers, students not only refigure the boundaries of academic subjects in order to engage in new forms of critical inquiry, but are also offered opportunities to engage the multiple referēnces that construct different cultural codes, experiences, and histories. In this context, a pedagogy of difference provides the basis for students to cross over into diverse cultural zones that offer a critical resource for rethinking how the relations between dominant and subordinate groups are organised, how they are implicated and often structured in dominance, and how such relations might be transformed in order to promote a democratic and just society. Difference in this case does not become a marker for deficit, inferiority, chauvinism, or inequality; on the contrary, it opens possibilities for constructing pedagogical practices that deepen forms of cultural democracy in order to enlarge our moral vision.”<sup>29</sup>

### Kesimpulan

**Hari ini, sukar kita menafikan realitas multikulturalisme yang berlangsung dalam masyarakat kita masing-masing. Dengan memberi ruang kepada wacana multikulturalisme, yang mengiktiraf kepelbagaian**

manusia dan budaya, namun tetap kita semua memiliki masalah dan cabaran yang sama keperitan dan kesenangannya, sebagai manusia. Tapi apabila kita menggagas multikulturalisme jangan sampai nanti ianya menjadi suatu yang bersifat paternalistik yang dipaksakan 'dari atas ke bawah,' yang kononnya serba tahu menyelesaikan masalah minoriti/negara.

Tatakala kita menyeru dan mempertegas kebaikan daripada multikulturalisme, sebaiknya juga kita meninjau akan halangan yang cuba membatasi multikulturalisme, sedangkan globalisasi rakus dianggap sebagai jalan terbuka yang terprogresif. Di Amerika Serikat contohnya, golongan konservatif dan kanan tidak senang dengan multikulturalisme kerana ianya dikatakan menghakis identiti Amerika yang 'sebenarnya.' Di tempat kita juga, ada kelompok yang tidak menyenangi dengan pluralisme, sedangkan multikulturalisme hanya disebut secara simbolis tapi tidak pernah ditanggapi secara serius.

Pada masa yang sama, **jangan sampai globalisasi yang kita sambut menjadi sebab sikap kebergantungan kepada metropolis Euro-Amerika. Perlu ditegaskan bahawa tidak sama sekali kita menganjurkan supaya wacana intelektual/sastera/budaya yang dari luar itu kita jauhi atau diketepikan. Tetapi yang mahu kita tekankan ialah sikap khadam kita terhadap wacana yang luar itu, sehinggakan kita kerdil untuk menghargai tradisi yang tumbuh dalam lingkungan kita sendiri. Juga harus kita pastikan bagaimana tatkala kita menangani globalisasi secara berhemah, ianya bukanlah bantahan yang tidak menentu. Juga dalam kita menghargai budaya yang partikular atau global, tidak bererti kita berkonfrontasi apa saja yang berbentuk global.**<sup>30</sup>

Sebaliknya kebersamaan dalam globalisasi makanya mengundang gagasan multikulturalisme dengan menempatkan identitas politik kelompok masing-masing sebagai hak kemanusiaan berkewujudan sama, selagi ia tidak menerbitkan sikap eksklusivisme kelompok dan keangkuhan imperialisme kebudayaan yang menyelina ke atas budaya lokal, semuanya atas nama globalisasi maupun yang menyusup dalam bentuk hegemoni. Makanya usulan

kurikulum multikulturalisme, yang diterap dalam pembelajaran sastra, bisa menjadi salah satu pemberdayaan identitas lokal yang ampuh.

Akhirul kalam, pembelajaran sastra yang mengacu kepada kesedaran sosial yang kritis dan afirmasi etika adalah penting demi menjamin pengisian pembangunan yang terarah untuk memberi makna kepada kehidupan ini. Wajarlah apabila Paulo Freire mengingatkan: “...*critical curiosity should also be accompanied by a rigorous ethical formation side by side with an aesthetic appreciation. Beauty and decency, hand in hand.*”<sup>31</sup> Makanya pengertian sastra yang dapat mengarah kepada pemberdayaan yang bukan saja dapat membuat kita tegas menyahut cabaran masakini, tetapi juga tangkas untuk berhadapan dengan apa jua bentuk dominasi yang mencengkam kita. Sekali lagi harus diingatkan bahwa sastra sebagai suatu dokumen kebudayaan itu tidak boleh ditanggapi secara berasingan daripada fenomena sosial/politik/ekonomi yang lain. Pemberdayaan identiti dan multikulturalisme kita harus tegas dan bebas daripada keterkaguman, keterpesonaan dan kebergantungan pada budaya luar yang senang dilabel global, walhal senang pula memperkcil budaya lokal kita sebagai bukan 'standard' global. Makanya berhemahlah hendaknya kita, dan ini telah baik dipesankan oleh Rendra, penyair Nusantara yang kita kagumi, supaya renungannya itu jangan sampai menjadi, (ataupun menjadi-jadi!):

Kita dikuasai oleh mimpi  
menjadi orang lain  
Kita orang asing  
di tanah nenek moyang kita  
Kebingungan, orang desa mengejar mimpi  
dan menjual diri ke Jakarta  
Kebingungan, orang Jakarta mengejar mimpi  
dan menjual diri ke Jepang  
Eropa dan Amerika

: Rujukan

Alatas, Syed Hussein. "Watak Tertawan di Negara Membangun," dlm. Mohamad Daud Mohamad & Zabidah Yahya, (ed.) *Pascakolonialisme dalam Pemikiran Melayu*. Kuala Lumpur: DBP, 2005.

Azhar Ibrahim, "Teori, Sastra dan Dogmatisisme," dlm. Hajjiah Jais & Muhammad Ikhrum Fadhly Hussin (eds.) *Teori dan Kritikan Sastra Melayu Serantau*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, 2005.

Chan-Tibergien, Jennifer. 'Cultural Diversity as Resistance to Neoliberal Globalization: The Emergence of a Global Movement and Convention,' *International Review of Education*, Vol. 52, No. 1/2, Education and Social Justice (2006), h. 89-105

Comblin, Jose. *Called for Freedom: The Changing Context of Liberation Theology*. Oregon: Wipf & Stock, 2009.

Elias, John L. "Paulo Freire: Religious Educator," *Religious Education*, Vol. 71 No. 1, 1976.

Fanon, Frantz. *The wretched of the earth*. New York: Groves Press, 1963.

Finlay, L.S. & N. Smith, "Literacy and Literature: Making or Consuming Culture," *College Literature*, Vol. 18, 2, 1991.

Freire, Paulo. *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan*. Jakarta: Gramedia, 1984.

Freire, Paulo. *The Politics of Education*. Massachusetts: Bergin & Garvey, 1985.

Gadotti, Moacir & Carlos Albarto Torres, "Paulo Freire: Education for Development," *Development and Change*, 40, 6, 2009.

Giroux, Henry A. "National Identity and the Politics of Multiculturalism," *College Literature*, 22,2, 1995.

Giroux, Henry A. "Literacy, Pedagogy and the Politics of Difference," *College Literature*, 19, 1, 1992.

Mochtar Lubis. "Literature and Liberation: An awareness of self and society," dlm. Edwin Thumboo, (ed.) *Literature and liberation : five essays from Southeast Asia*. Manila: Solidaridad Pub. House, 1988.

Peter Suwadi Wong, "Kultur Bhineka Tunggal Ika sebagai Karakteristik Bangsa Indonesia di Era Globalisasi: Sebuah Tinjauan Injili," *Stulos*, 6, 1, 2007.

Rizvi, Fazal. "Postcolonial and Globalization in Education." *Cultural Studies-Critical Methodologies*, Vol.7, No.3, 2007.

Said, Edward. "Identity, Authority, and Freedom: The Potentate and the Traveler." *boundary 2*, Fall 1994

Said, Edward. *The World, the Text and the Context*. Massachusetts: Harvard University Press, 1983.

Templeton, Alice."Sociology and Literature: Theories for Cultural Criticism," *College Literature*, Vol.19, 2, 1992.

**Thiong'o, Ngugi wa.** *Penpoints, Gunpoints and Dreams: Towards a Critical Theory of the Arts and the State in Africa.* Oxford: Clarendon Press, 1998.

**Thiong'o, Ngugi wa** *Writers in politics : a re-engagement with issues of literature & society.* Portsmouth, N.H. : Heinemann, 1997.

Yahya Wijaya, " Economic Globalisation and Asian Contextual Theology," *Theological Studies*, 69, 2008.

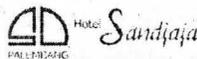
Yeakey, Carol Camp. "Social Change Through the Humanities: An Essay on the Politics of Literacy and Culture in American Society," *New Literary History*, 21, 1991.

**Bahasa Madura di Mojokerto:**  
**Penanda Identitas Etnik Madura-Pendalungan**  
**Agusniar Dian Savitri**  
**Universitas Negeri Surabaya**

Etnik Madura tidak sekadar tinggal di Pulau Madura. Mereka tersebar di berbagai daerah terutama di Jawa Timur. Salah satunya adalah Mojokerto. Masyarakat Madura yang tinggal di Mojokerto sebenarnya bukan masyarakat yang lahir di Madura lalu berpindah ke Mojokerto. Mereka lahir dan besar di Mojokerto, begitu pula dengan orang tua mereka, kakek-nenek mereka, hingga beberapa tingkat ke atas dalam tingkat kekerabatan. Namun mereka tetap mengaku sebagai etnik Madura dan menggunakan bahasa Madura dalam kegiatan komunikasi mereka sehari-hari. Sebagian orang—terutama etnik Madura yang berada di Pulau Madura—menyebut mereka sebagai Pendalungan. Istilah tersebut diberikan karena etnik Madura yang berada di Pulau Jawa bukanlah Madura asli melainkan campuran Madura dan Jawa. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan pengamatan yang bertujuan untuk menghasilkan deskripsi tentang fungsi Bahasa Madura di Mojokerto sebagai penanda identitas etnik Madura-Pendalungan, yang terdiri atas (1) pembentukan identitas personal dan (2) pembentukan identitas kelompok. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik cakap semuka, teknik elisitasi, dan sadap rekam. Dalam pengumpulan data ini digunakan daftar tanya-an. Teknik sadap rekam digunakan untuk mengumpulkan data berupa penggunaan bahasa Madura dalam komunikasi dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat di luar kedua desa tersebut. Hasil yang diperoleh adalah terdapat (1) variasi linguistik yang meliputi penamaan, sistem sapaan, pilihan kata dan kalimat; (2) representasi kelompok, yang keduanya menunjukkan pembentukan identitas personal dan kelompok etnik Madura-Pendalungan di Mojokerto.

# Ucapan Terima Kasih

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan  
Pusat Bahasa  
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan  
Pemerintah Kota Palembang  
Radio Republik Indonesia Palembang  
Surat Kabar Harian Seputar Indonesia  
Surat Kabar Harian Berita Pagi  
Radio Sonora  
Sriwijaya TV  
Hotel Sandjaja Palembang  
Berita Musi.Com  
dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satu persatu.



FORUM KAJIAN IDENTITAS: BAHASA, SAstra, DAN BUDAYA



**FORKIBAstra**

BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN